DIALOG GLOBAL

10.1

3 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Membahas Sosiologi dengan Raquel Varela — **Christine Schickert**

Forum ISA IV di Porto Alegre — **Geoffrey Pleyers, Jacob Carlos Lima, Hermílio Santos, André Salata, Emil Sobottka, Veridiana Domingos Cordeiro, Gustavo Conde Margarites, Priscila Susin, Ricardo Caldas Cavalcanti, Lucas Pereira Wan Der Maas, Izabelle Vieira**

Kebijakan Sosial di Negara-negara Eropa — **Maria Petmesidou, Ana Guillén, Emmanuele Pavolini, Daniel Clegg, Roland Atzmüller, Sigita Doblyte, Aroa Tejero, Silke van Dyk, Tine Haubner, Beatrice Carella**

Tantangan Digitalisasi — **Paola Tubaro, Lévio Scattolini, Felix Sühlmann-Faul, Srujana Katta, Kelle Howson, Mark Graham**

Perspektif Teoretis — **Donatella della Porta**

Dalam Kenangan: Samir Amin Immanuel Wallerstein — **Vishwas Satgar, Sari Hanafi, Stéphane Dufoix, Frank Welz, Anand Kumar**

Seksi Terbuka

› **Karavan Migran sebagai Strategi Mobilitas di Amerika Tengah**

› **Buffalo, NY: Praktik Baik dalam Pemukiman Kembali Pengungsi**

MAJALAH

VOLUME 10 / EDISI 1 / APRIL 2020

http://globaldialogue.isa-sociology.org/

DG

International Sociological Association

› Editorial

Dalam wawancara edisi ini, sejarawan perburuhan Raquel Varela melihat kembali pada Revolusi Bunga Anyelir Portugal pada bulan April 1974. Ia mendiskusikan mengapa penting untuk menceritakan peristiwa dunia "dari bawah," dengan mengambil perspektif dan kontribusi orang-orang yang bekerja serta membahas dampak jangka panjang dari revolusi yang masih tersisa dalam struktur sosial dan ekonomi Portugal.

Pada Juli 2020, sosiolog dan ilmuwan sosial dari seluruh dunia akan berpartisipasi dalam Forum Sosiologi ISA IV di Porto Alegre, Brasil untuk mendiskusikan penelitian-penelitian dan persepsi-persepsi mereka tentang transformasi sosial berkaitan dengan empat tantangan utama abad ke-21: demokrasi, lingkungan, ketidaksetaraan, dan interseksionalitas. Dalam artikelnya Geoffrey Pleyers, Presiden Forum, menekankan pentingnya menganalisis keterkaitan dari perkembangan-perkembangan sosial ini. Jacob Carlos Lima, Presiden Masyarakat Sosiologi Brasil (SBS) memberi kita wawasan singkat tentang sejarah organisasi tersebut dan menyerukan dukungan dan solidaritas komunitas sosiologi dalam menghadapi perkembangan politik baru-baru ini di negara itu dan perjuangan sosial yang terkait. Hermílio Santos, André Salata, dan Emil Sobottka, dari Komite Penyelenggara Lokal Forum, serta enam cendekiawan muda Brasil memberi kita wawasan tentang sejarah dan sosiologi Brasil.

Akibat dari perombakan sistematis negara-negara kesejahteraan Eropa dalam beberapa tahun terakhir, bentuk-bentuk baru kebijakan sosial telah ditetapkan, yang tidak hanya menantang negara-negara yang berbeda di bidang-bidang area yang spesifik tetapi juga pilar sosial Eropa dan Uni Eropa. Dalam simposium pertama kami tentang masalah ini, para ilmuwan mempresentasikan penelitian-penelitian mereka tentang lintasan-lintasan yang telah dilalui saat ini dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beberapa negara Eropa.

Simposium yang kedua mengemukakan salah satu masalah besar di zaman kita: digitalisasi masyarakat, dengan melihat dampaknya terhadap tenaga kerja, pasar keuangan dan juga tentang keberlanjutan. Simposium ini juga membahas bagaimana penelitian dapat berkontribusi untuk mempertahankan atau menciptakan hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang adil dalam platform ekonomi.

Dalam artikelnya, Donatella della Porta memetakan tantangan saat ini dalam studi gerakan sosial. Menurutnya, protes yang sedang berlangsung di seluruh dunia telah membawa agenda isu-isu baru, tetapi juga menuntut cara-cara baru dalam menganalisisnya. Dia berargumen perlunya membawa kembali kapitalisme dan kelas sebagai kategori analitis dalam studi gerakan sosial.

Samir Amin (1931-2018) dan Immanuel Wallerstein (1930-2019), dua ilmuwan sosial dan pemikir politik terkemuka, telah meninggal dunia. Konsepsi strategis Amin tentang *delinking* dan kritik terhadap Erosentrisme mempengaruhi kaum Marxis dan ilmuwan sosial di seluruh dunia. Dengan gagasannya tentang analisis sistem dunia, Wallerstein memperkaya teori sosiologi dengan cara yang mendalam. Sebagai mantan Presiden ISA, ia membangun pertukaran yang berkembang antara anggota lama dan baru yang beresonansi sampai hari ini. Kolega dan teman dari dua anggota komunitas kami yang luar biasa ini mengingat dan menghormati pekerjaan dan kehidupan mereka.

Dua artikel yang ditampilkan dalam Seksi Terbuka berkaitan dengan migrasi ke Amerika Serikat: Veronica Montes meneliti apa yang disebut "karavan migran" sebagai pilihan strategis bagi orang yang menginginkan bermigrasi dari Amerika Latin ke utara. Ayşegül Balta Ozgen memperkenalkan pada kita arti tantangan-tantangan maupun manfaat-manfaat pemukiman pengungsi bagi sebuah kota berpenduduk sedang di Amerika seperti Buffalo, NY. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
Para editor *Global Dialogue*

› *Dialog Global* dapat diperoleh dalam 17 bahasa di website ISA.
› Naskah harap dikirim ke globaldialogue.isa@gmail.com.

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

› Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan Media: Juan Lejárraga.

Editor Konsultasi:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: *(Tunisia)* Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; *(Algeria)* Souraya Mouloudji Garroudji; *(Morocco)* Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; *(Lebanon)* Sari Hanafi.

Argentina: Alejandra Otamendi, Juan Ignacio Piovani, Martín Di Marco, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, US Rokeya Akhter, Juwel Rana, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Muhaimin Chowdhury, Helal Uddin, Md. Eunus Ali, Mostafizur Rahman, Jhilik Saha, Maria Sardar, Tahmid Ul Islam.

Brasil: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Lucas Amaral Oliveira, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttil.

India: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, Manish Yadav, Sandeep Meel.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi, Faezeh Khajehzade.

Jepang: Satomi Yamamoto.

Kazakhstan: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

Polandia: Adam Müller, Jonathan Scovil, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Aleksandra Wagner, Sara Herczyńska, Monika Helak, Aleksandra Senn, Weronika Peek, Anna Wandzel, Zofia Penza-Gabler, Justyna Kościńska, Iwona Bojadżijewa.

Romania: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Bianca Mihăilă, Alexandra Mosor, Mioara Paraschiv, Maria Stoicescu.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Wan-Ju Lee, Bun-Ki Lin, Tao-Yung Lu, Po-Shung Hong, Yu-Min Huang.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Forum Sosiologi ISA IV *akan diselenggarakan pada bulan Juli 2020 di Porto Alegre, Brasil. Presidennya, Geoffrey Pleyers, bersama Jacob Carlos Lima, Presiden Masyarakat Sosiologi Brasil, dan para anggota Panitia Pelaksana Lokal serta enam orang ilmuwan muda memberikan kepada kita wawasan mengenai sosiologi Brasil di masa kini.*

Karena pembongkaran secara sistematis terhadap negara-negara kesejahteraan Eropa, ***kebijakan sosial di negara-negara Eropa*** *telah menjadi suatu topik yang mengemuka dalam penelitian sosiologis dan tindakan politik. Dalam artikel-artikel yang dicakup dalam simposium ini para peneliti menyajikan karya mereka mengenai lintasan dan tantangan yang dihadapi negara-negara kesejahteraan Eropa di masa kini.*

Digitalisasi *akan mengubah masyarakat secara mendasar, dan hal ini sudah berlangsung. Artikel-artikel ini mengkaji dampaknya pada tenaga kerja, pasar finansial dan keberlanjuntan dan membahas bagaimana penelitian dapat menyumbang pada pemeliharaan atau penciptaan hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang adil dalam platform perekonomian.*

DG

Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications.**

› Dalam Edisi Ini

Editorial 2

› MEMBAHAS SOSIOLOGI

Warisan Revolusi Portugis:
Wawancara dengan Raquel Varela
oleh Christine Schickert, Jerman 5

› FORUM SOSIOLOGI ISA IV DI PORTO ALEGRE

Tantangan yang Saling Berhubungan pada Abad ke-21
oleh Geoffrey Pleyers, Belgia 8

SBS Menyambut Forum ISA
oleh Jacob Carlos Lima, Brasil 11

Di Dalam Sosiologi Brasil: Sebuah Penilaian Singkat
oleh Hermílio Santos, André Salata, dan Emil Sobottka, Brasil 13

Narasi Masa Kecil di Institut Pengasuhan
oleh Veridiana Domingos Cordeiro, Brasil 15

Bantuan Sosial sebagai Sektor Kebijakan di Brasil
oleh Gustavo Conde Margarites, Brasil 17

Perjuangan Perempuan untuk Permukiman Perkotaan di Porto Alegre
oleh Priscila Susin, Brasil 18

Tata Kelola Informal terhadap Kekerasan di Recife, Brasil
oleh Ricardo Caldas Cavalcanti, Brasil 20

Ketimpangan Profesional di Brasil
oleh Lucas Pereira Wan Der Maas, Brasil 22

Lintasan Kelas Menengah Rio de Janeiro
oleh Izabelle Vieira, Brasil 24

› KEBIJAKAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA EROPA

Penghematan: Kompromi terhadap Universalisme dalam Layanan Kesehatan?
oleh Maria Petmesidou, Yunani, Ana Guillén, Spanyol, dan Emmanuele Pavolini, Italia 26

Tunjangan Pengangguran di Era Baru Kerja Kasual
oleh Daniel Clegg, Inggris Raya 28

Subjektifikasi Kebijakan Sosial, Polarisasi Masyarakat
oleh Roland Atzmüller, Austria 30

Dukungan untuk Kebijakan Keluarga di Eropa Selatan
oleh Sigita Doblytė dan Aroa Tejero, Spanyol 32

Menjadi Sukarelawan di Jerman: Perbuatan Amal atau Ekonomi Bayang-bayang?
oleh Silke van Dyk dan Tine Haubner, Jerman 34

Akankah Uni Eropa Mempertahankan Pilar Sosialnya?
oleh Beatrice Carella, Italia 36

› TANTANGAN DIGITALISASI

Kecerdasan Buatan merupakan Kecerdasan Siapa?
oleh Paola Tubaro, Prancis 38

Museum Kebaruan Unggul
oleh Lévio Scattolini, Brasil 40

Apa yang Dibutuhkan oleh Digitalisasi Berkelanjutan?
oleh Felix Sühlmann-Faul, Jerman 42

The Fairwork Foundation: Penelitian Aksi terhadap *Gig Economy*
oleh Srujana Katta, Kelle Howson, dan Mark Graham, Inggris Raya 44

› PERSPEKTIF TEORETIS

Kapitalisme, Kelas, Perseteruan
oleh Donatella della Porta, Italia 47

› DALAM KENANGAN

Penghormatan bagi Pemikir Marxis Afrika Terkemuka, Samir Amin
oleh Vishwas Satgar, Afrika Selatan 51

I. Wallerstein: Seorang Sosiolog dan Intelektual yang Menjulang Tinggi
oleh Sari Hanafi, Lebanon dan Stéphane Dufoix, Prancis 53

I. Wallerstein: Memberikan Koherensi Baru kepada Sosiologi
oleh Frank Welz, Austria dan Anand Kumar, India 55

› SEKSI TERBUKA

Karavan Migran sebagai Strategi Mobilitas di Amerika Tengah
oleh Veronica Montes, AS 56

Buffalo, NY: Praktik Baik dalam Pemukiman Kembali Pengungsi
oleh Ayşegül Balta Özgen, AS 58

"Selamat datang di Forum ISA IV di Brasil. Kami berharap pada anda dalam perjuangan untuk kebebasan, demokrasi, dan keadilan sosial ini. Tanpa kebebasan, sosiologi tidak mungkin ada."

Jacob Carlos Lima

› Warisan Revolusi Portugis

Wawancara dengan Raquel Varela

Raquel Varela. Kredit: Veríssimo Dias.

Raquel Varela adalah seorang sejarawan yang berbasis di Universitas NOVA Lisbon di Portugal. Karyanya berfokus pada sejarah perburuhan, negara kesejahteraan, sejarah Portugal dan Eropa pada abad kedua puluh, serta sejarah gerakan sosial. Dia adalah salah seorang pendiri Jejaring untuk Studi Perburuhan Global dan presiden dari Asosiasi Internasional untuk Pemogokan dan Konflik Sosial.

Dalam bukunya *A People's History of the Portuguese Revolution* (*Sejarah Rakyat mengenai Revolusi Portugis*) (2018), ia menceritakan sejarah Revolusi Bunga Anyelir 1974 dari sudut pandang akar rumput (*from below*). Dalam melakukannya, ia mengeksplorasi peran gerakan antikolonial di Afrika, maupun peran para pekerja, perempuan, dan seniman Portugis dalam proses tersebut.

Di sini dia diwawancarai oleh **Christine Schickert**, direktur administrasi Kelompok Penelitian DFG mengenai Masyarakat Pascapertumbuhan di Universitas Friedrich Schiller di Jena, Jerman, dan asisten editor *Dialog Global*.

CS: 46 tahun yang lalu, pada bulan April 1974, kediktatoran di Portugal berakhir dengan kudeta militer. Alasan umum dari kudeta tersebut adalah ketidakpuasan militer terhadap perang yang diluncurkan Portugal di wilayah koloninya. Bisakah Anda ceritakan tentang situasi di wilayah koloni Portugis di Afrika pada saat perang? Apa yang membuat militer kecewa dengan kepemimpinan politik?

RV: Kala itu Portugal adalah negara yang sangat terkebela-

»

kang, merupakan kekaisaran tua terakhir dan sebuah kekaisaran yang berperang dengan sengit melawan revolusi antikolonial selama tiga belas tahun dalam suatu perang kolonial sangat mengerikan yang antara tahun 1961 sampai 1974 telah memobilisasi lebih dari satu juta pemuda. Pada tahun 1974 saja, 150.000 pria dikerahkan untuk perang. Kekalahan perang kolonial disebabkan terutama oleh gerakan kemerdekaan, terutama di Guinea-Bissau yang dipimpin oleh seorang Marxis besar yang terlupakan bernama Amílcar Cabral.

Gerakan kemerdekaan yang kuat tersebut dan pertempuran yang berkepanjangan telah memperjelas realita bagi beberapa pejabat militer, kebanyakan perwira dari jajaran menengah yang bukan jenderal maupun tentara berpangkat rendah, bahwa perang tidak dapat dilanjutkan dan bahwa solusi politik diperlukan untuk mengakhirinya. Maka mereka kemudian mengorganisir kudeta pada 25 April 1974. Komandan kudeta adalah Otelo Saraiva de Carvalho. Mereka mengalahkan rezim dan menyingkirkan diktator Marcello Caetano, tetapi meminta kepada rakyat agar mereka tetap tinggal di rumah. Tetapi rakyat tidak menaatinya dan turun ke jalan.

Yang membuat revolusi di koloni sangat menarik adalah bahwa untuk pertama kalinya, apa yang dikatakan oleh Internasional Ketiga memang benar-benar terjadi: kerusuhan menyebar dari koloni ke pusat, ke metropolis. Setelah tahun 1975, kerusuhan menyebar kembali ke wilayah koloni. Upaya pembebasan diri dari kediktatoran dimulai dengan perang yang-berdarah-darah di koloni-koloni dan kemudian berubah menjadi pesta di jalan-jalan Lisbon. Itu merupakan revolusi selama 19 bulan yang paling radikal di Eropa pascaperang—merupakan revolusi terakhir di masa pascaperang, yang jauh lebih radikal daripada [gerakan protes mahasiswa di Prancis pada] Mei 1968, dan merupakan revolusi terakhir yang mempertanyakan kepemilikan pribadi.

CS: Anda mengatakan bahwa pihak militer menyerukan agar rakyat tetap tinggal di rumah, tetapi mereka tidak menaatinya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak perihal ini? Mengapa mereka bergabung dengan tentara dalam revolusi ini?

RV: Selama 48 tahun, Portugal adalah suatu kediktaktoran dan salah satu negara paling terbelakang di Eropa. Antara tahun 1961 dan 1974, perang kolonial di tiga front memobilisasi lebih dari satu juta orang. Secara proporsional, perang dengan koloni menewaskan lebih banyak orang Portugis daripada jumlah tentara Amerika yang tewas di Vietnam. Untuk menghindari perang dan kemiskinan, banyak orang beremigrasi, terutama ke negara-negara lain di Eropa. Sekitar 1,5 juta orang meninggalkan negara tersebut semenjak tahun 1960. Portugal memiliki tingkat kematian anak paling tinggi, dan surat-surat pribadi istri dapat dibuka suaminya [begitu saja, tanpa menghargai hak isteri].

Di tahun 1974, Portugal memiliki 9,5 juta penduduk. Pada 1 Mei 1974, satu minggu setelah 25 April, dua juta orang keluar rumah untuk merayakan tanggal 1 Mei, bukan hanya untuk menuntut perubahan demokratis seperti berakhirnya kediktatoran, tetapi juga menyuarakan tuntutan sosial revolusioner seperti upah minimum, libur kerja pada Sabtu dan Minggu, upah lembur di malam hari, upah yang sama untuk pria dan wanita. Selama revolusi Portugis, tiga juta orang diorganisasikan dalam komisi pekerja, komisi lingkungan, komisi kota, atau komisi siswa. Ini adalah revolusi yang terjadi tidak hanya di sektor industri, yang merupakan sektor terpenting yang mendorong proses tersebut; pekerja dari semua sektor turut bergabung, misalnya pekerja layanan publik. Dengan demikian rumah sakit diduduki oleh para dokter, sekolah diduduki oleh para guru. Revolusi Bunga Anyelir adalah revolusi di akhir abad ke-20, sehingga Portugal telah memiliki sektor jasa yang sangat besar yang mempekerjakan sejumlah besar pekerja. Dan para pekerja ini merupakan bagian dari revolusi tersebut.

CS: Sekarang ijinkan saya mengangkat poin kedua yang Anda sebutkan: Anda mengatakan bahwa Revolusi Portugal adalah revolusi yang terakhir yang mempertanyakan masalah kepemilikan pribadi...

RV: Enam ratus perusahaan diduduki para pekerja, dan menjadi swa-kelola atau berbentuk koperasi, proses kontrol oleh pekerja mulai diterapkan pada perusahaan besar, dan bank-bank dinasionalisasi dan disita tanpa kompensasi apapun ke sektor perbankan. Kaum borjuis benar-benar meninggalkan Portugal beberapa bulan kemudian, melarikan diri ke Brasil setelah terjadi perampasan. Menurut pendapat saya, meskipun hal ini adalah analisis kontrafaktual (dalam ilmu sejarah, kami tidak boleh mengatakan "jika"—ini bertentangan dengan fakta), hal ini menyebabkan tertundanya penerapan kebijakan neoliberal selama sepuluh tahun. Politik neoliberal tidak diterapkan setelah revolusi karena presiden Amerika pada saat itu, Gerald Ford, dan pemerintahannya benar-benar takut bahwa Portugal dapat menjadi awal dari Mediterania merah [wilayah komunis]. Jadi yang ditunjukkan oleh revolusi Portugis adalah bahwa sebuah krisis ekonomi, seperti yang juga ditekankan oleh Marx, tidak harus menjadi bencana bagi kelas pekerja, melainkan dapat mereka gunakan untuk mengubahnya menjadi krisis politik dari negara dan untuk melawan kelas-kelas utama yang berkuasa.

CS: Omong-omong soal rakyat, buku Anda berjudul* Sejarah Rakyat mengenai Revolusi Portugis*. Apa yang mendorong Anda untuk menulisnya demikian? Mengapa Anda ingin menceriterakannya dengan cara ini?

RV: Jelas, buku tersebut dipengaruhi pemikiran 'sejarah dari bawah' dan sejarah sosial Inggris pada tahun 1960-an, atau lebih langsungnya dipengaruhi oleh Howard Zinn, sejarawan Amerika dan pemikir sosialis. Ada ide bahwa

»

kita harus mencatat sejarah perlawanan, oleh orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang. Jadi kita tak hanya memasukkan catatan sejarah lembaga dan pemerintah, tapi juga sejarah dari bawah, sejarah rakyat, massa anonim yang memainkan peran, perlawanan para pekerja. Bagian penting dari sejarah ini diperlukan untuk membangun suatu pemahaman yang komprehensif. Karena kelas pekerja sering kali tidak memiliki gagasan tentang apa yang dapat mereka lakukan, penting untuk menulis sejarah rakyat, tentang tindakan mereka dan menunjukkan momen-momen khusus dalam sejarah, ketika kelas pekerja sangat kuat dan mengubah dunia, mengubah diri mereka sendiri. Kita berbicara tentang sebuah negara yang hingga tahun 1974 selama 48 tahun adalah negara paling terbelakang di Eropa dan dalam 25 tahun berikutnya menjadi negara terbaik kedua belas dengan layanan kesehatan nasional terbaik di dunia. Hal ini hanya bisa dimungkinkan dengan kekuatan kolektif yang luar biasa.

Yang juga sangat menarik perihal revolusi Portugis adalah bahwa untuk pertama kalinya pendekatan Stalinis dipertanyakan oleh kaum kiri. Gerakan Mei 1968 sudah mempertanyakan hegemoni kaum Stalinis di pabrik-pabrik besar di Prancis, tetapi dalam revolusi Portugis, hegemoni tersebut dipertanyakan lebih lanjut. Apa yang dinamakan kaum ekstrem kiri, atau kelompok paling kiri dari Partai Komunis, memiliki peranan besar dalam memimpin perjuangan tersebut, di komisi-komisi pekerja, di serikat-serikat pekerja besar baik di sektor industri maupun jasa.

CS: Mari kita bicara tentang warisan revolusi Portugis: Apakah tantangan atau kesangsian terhadap hubungan kepemilikan dan reorganisasi perusahaan masih tercermin dalam lanskap politik saat ini baik di tingkat pergerakan atau partai? Dan apakah itu juga telah berkelindan dengan cara Portugal menangani dampak krisis keuangan/krisis utang setelah tahun 2008?

RV: Salah satu perubahan terakhir dalam relasi hak milik yang berlangsung di akhir era pasca-troika terdapat pada perubahan di bidang perumahan, yang ditandai dengan pengendalian harga. Salah satu tuntutan Dana Moneter Internasional dan Jerman/Uni Eropa ketika menegosiasikan Program Penyesuaian Ekonomi untuk Portugal selama krisis keuangan Portugal (2010-2014) adalah meliberalisasi pasar perumahan, yang mengakibatkan dampak buruk pada kelas pekerja (kelas bawah dan menengah). Efek revolusi yang paling lama bertahan adalah konfrontasi dari sayap ekstrem kanan, yang masih berlangsung sampai sekarang.

CS: Ya, ini memang poin lain yang mengejutkan saya: setelah krisis keuangan 2008 di Portugal, tidak seperti di negara-negara lain di Eropa, tidak ada partai sayap kanan yang kuat berkembang. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana ini terkait dengan Revolusi Bunga Anyelir?

RV: Itu jelas adalah buah dampak dari revolusi. Revolusi bukan semata-mata transisi menuju demokrasi, tetapi revolusi yang membuat pembersihan aparatur negara dan mengubah kepemimpinan rezim sayap kanan keluar dari aparatur negara. Terjadi pemutusan hubungan yang nyata dengan kepemimpinan tersebut. Tidak ada budaya dan ruang gerak bagi kaum ekstrem kanan di Portugal. Tentu saja ini bisa berubah, tetapi sampai sekarang, selagi generasi revolusi masih hidup, saya tidak percaya bahwa terdapat kemungkinan akan munculnya sayap kanan ekstrem yang kuat. Dengan sendirinya ini berarti bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sepuluh tahun ke depan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Raquel Varela
<raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk>

Tantangan yang Saling Berhubungan pada Abad ke-21

oleh **Geoffrey Pleyers**, Universitas Katolik Louvain, Belgia, Presiden Forum Sosiologi ISA IV dan Wakil Presiden ISA untuk Penelitian (2018-22), mantan Presiden Komite Penelitian ISA tentang Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47), dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sosiologi Agama (RC22), Sosiologi Kaum Muda (RC34), dan Gerakan sosial, Tindakan Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48).

Pada bulan Januari 2001, 20.000 aktivis dan intelektual publik dari semua benua berkumpul di Porto Alegre untuk Forum Sosial Dunia pertama. Mereka dipersatukan oleh harapan bahwa abad ke-21 akan menjadi lebih demokratis dan bahwa solidaritas internasional dan perjuangan global dapat membentuk globalisasi menuju dunia yang lebih adil dan setara.

Hampir dua dekade kemudian, pada bulan Juli 2020, 5.000 ilmuwan sosial dari semua benua akan menjadi bagian dalam Forum Sosiologi ISA di kota yang sama untuk menganalisis transformasi sosial serta berbagi penelitian dan perspektif mereka dalam empat tantangan utama abad ini dan bagaimana ilmu sosial dapat berkontribusi menghadapinya. Konteks dan suasana umum akan sedikit berbeda kali ini, sebagaimana optimisme milenium telah memudar dan tantangan yang kita hadapi untuk hidup bersama di planet yang terbatas menjadi sangat mendesak.

Ada empat tantangan yang semakin mencolok dalam dua dekade ini, dan terutama pada lima tahun terakhir, yaitu demokrasi, krisis lingkungan, ketidaksetaraan dan interseksionalitas.

Pada pergantian milenium, ekspansi dan pendalaman demokrasi dianggap sebagai hal yang sudah seharusnya demikian. *The color revolutions* [gerakan sosial di berbagai negara di awal tahun 2000-an] dan *Arab Spring* tahun 2011 dianalisis sebagai "gelombang keempat demokratisasi". Namun, sementara tahun 2010 dibuka dengan menyebarnya gerakan demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua benua, hal ini berakhir dengan bermunculannya pemimpin-pemimpin iliberal yang mengancam demokrasi, lingkungan, toleransi, ekonomi dan kesetaraan gender. Sementara itu, harapan pada tata kelola demokratis global yang dapat mengha-

»

dapi isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan meningkatnya ketidaksetaraan telah memudar. Maka sekarang menjadi jelas bahwa untuk menghadapi tantangan global, demokrasi perlu ditemukan kembali dari dalam maupun di luar sistem perwakilan.

Dekade ini juga telah dibentuk oleh melebarnya kesenjangan antara mereka yang super kaya dan penduduk lainnya, dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di negara yang disebut "maju," baik yang telah mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang paling lama (terutama AS dan Jerman) maupun negara-negara yang ekonomi dan kesejahteraannya hancur akibat rancangan-rancangan penghematan (*austerity plans*). Pada bagian kedua dari dekade tersebut, dua isu kembali menjadi keprihatinan yang utama, yakni bencana lingkungan, serta kekerasan gender dan rasisme. Sementara perempuan dari Selatan Global berada di garis depan untuk membela demokrasi dan menentang dimensi penindasan patriarkal, mobilisasi feminis seperti pemogokan 8 Maret, #NiUnaMenos, dan kampanye #MeToo telah menyoroti pelecehan seksual dan pembunuhan perempuan (*femicides*) dalam tajuk utama berita global sekaligus di kehidupan sehari-hari dan di kampus-kampus universitas. Sementara itu pemogokan sekolah oleh kaum remaja telah menjadikan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sebagai keprihatinan global yang utama. Mereka mendorong visi ekologi yang sangat terinspirasi oleh gerakan Selatan Global dan menuntut perubahan sistemik. Laporan terakhir Panel Antarpemerintah Mengenai Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC) menunjukkan angka perubahan iklim yang menakutkan pada abad ke-21 sementara kepunahan spesies secara massal sedang berlangsung.

› Tantangan yang saling berhubungan

Hal yang dapat kita pelajari dari gerakan sosial dan ilmu-ilmu sosial dalam dua dekade pertama abad ini adalah bahwa empat tantangan ini berkelindan sangat dalam. Hubungan yang meningkat antara demokrasi, krisis lingkungan, ketidaksetaraan dan interseksionalitas mengharuskan kita untuk melihat dan mengkonsepkan kembali masing-masing dari konsep ini dengan keterhubungan sebagai titik awal.

Misalnya, memperhitungkan krisis lingkungan, ketidaksetaraan dan interseksionalitas, mengarahkan kita untuk berpikir kembali tentang demokrasi (*rethink democracy*) dengan cara yang berbeda. Di satu sisi, demokrasi terancam dengan meningkatnya negara dengan pemimpin iliberal yang mendekonstruksi nilai fundamental hak asasi manusia, keragaman dan penghormatan yang setara bagi tiap warganegara, sekaligus mendukung percepatan perusakan lingkungan oleh perusahaan transnasional dan memperkuat patriarki, rasisme dan ketidaksetaraan. Di sisi lain, gerakan-gerakan progresif juga menantang demokrasi institusional karena gerakan tersebut membutuhkan perubahan politik, budaya dan sosial serta aksi pada tingkatan di mana sistem demokrasi yang terpusat pada negara-bangsa kurang siap: untuk menangani pemanasan global dan perusakan lingkungan dalam skala global; untuk menangani pelecehan seksual dan pembunuhan perempuan dalam [aspek-aspek] keintiman dan kehidupan sehari-hari dalam budaya patriarki.

Meningkatnya *ketidaksetaraan* adalah ancaman besar pada demokrasi dan lingkungan. Tingkat ketidaksetaraan global telah mencapai suatu tingkat di mana "*top* 1%" dan korporasi global mempunyai kekuatan politik utama di tingkat nasional dan skala global. Jauh dari gambaran ideal Michael Walzer mengenai "pemisahan ruang" (*separation of the spheres*) yang demokratis, dekade terakhir telah menjadi saksi dari naiknya para milyarder ke jabatan presiden di sejumlah negara, sementara kolusi antara elite politik dan ekonomi serta kekuatan lobi yang dominan telah menjadi karakteristik inti dari banyak rezim politik kontemporer.

Bersama dengan gerakan keadilan iklim, para sosiolog menunjukkan pada kita bahwa secara fundamental *perubahan iklim dan perusakan alam* merupakan suatu isu sosial dan bahwa hal tersebut tidak bisa dibatasi tanpa perubahan yang mendalam pada masyarakat. Penyebabnya terletak pada sistem kapitalis global saat ini dan kerakusannya yang semakin besar pada sumber daya alam. Sementara bumi adalah rumah kita bersama, kita memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam bencana lingkungan. Oxfam menghitung bahwa rata-rata jejak karbon dari 1% mereka yang terkaya secara global sama dengan 175 kali dari 10% mereka yang termiskin. Pendekatan interseksional dan gerakan keadilan lingkungan menunjukkan bahwa perempuan, kalangan minoritas dan kurang sejahtera berkontribusi lebih sedikit pada perusakan planet. Mereka membayar harga yang mahal untuk itu, dengan hilangnya harapan hidup yang signifikan serta meningkatnya pengungsi akibat perubahan iklim.

Mengatasi diskriminasi ekonomi, ras, kolonial dan gender yang saling terkait satu sama lain dan kekerasan yang melanggengkannya merupakan suatu tantangan tersendiri pada masa kita ini. Para aktivis feminis kulit hitam, gerakan masyarakat adat (*indigenous*), dan ilmuwan sosial telah menunjukkan sifat keterhubungan antara ras, kelas, dan gender yang menciptakan sistem diskriminasi atau kerugian yang tumpang tindih dan interdependen. Perspektif interseksional mengarah peninjauan kembali tantangan demokrasi, ketidaksetaraan, dan keadilan lingkungan. Demokrasi perwakilan saat ini telah menunjukkan keterbatasannya dalam menangani rasisme dan penindasan patriarkal. Ketidaksetaraan sangat dalam terhubung dengan diskriminasi gender dan rasis, demikian juga dengan penderitaan yang diakibatkan oleh bencana lingkungan dan

»

pemanasan global. Peningkatan kesadaran akan interseksionalitas adalah hasil sekaligus pemicu bangkitnya aktor dan gerakan subaltern. Komunitas masyarakat adat, minoritas, feminis dan petani kecil telah melawan ketidakadilan dengan mengombinasikan praktik, perjuangan sosial, dan pandangan-pandangan dunia (*worldviews*) alternatif.

Gender telah lama dianggap sebagai isu sampingan oleh aktor-aktor progresif yang berfokus pada kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kini gender telah berada di pusat pertarungan untuk demokrasi global. Pada tahun 2020, perempuan kulit berwarna dan yang berlatar belakang minoritas adalah korban pertama rezim iliberal dan otoriter. Mereka juga berada di garis depan untuk membela dan menemukan kembali demokrasi abad ke-21. Mereka merintis jalan untuk dunia di mana relasi intersubyektif, kasih sayang, solidaritas dan kepedulian (pada diri sendiri, manusia lain dan alam) membentuk kembali pengalaman dan pemahaman kita tentang hidup bersama dalam planet yang terbatas ini.

Namun demikian, mengasosiasikan semua aktor tertindas dengan pembaruan ekologi dapat menyesatkan. Sementara gerakan feminis dan masyarakat adat berada di garis depan pertarungan ekologis, kajian Arlie Hochschild terhadap korban bencana lingkungan di Louisiana juga menunjukkan bagaimana korban bisa menjadi basis politik bagi pembaharuan sikap reaksioner dan rasis yang menjadi ancaman langsung pada sistem demokrasi dan lingkungan kita. Hal ini mengingatkan kita pada hubungan mendalam antara cara penangkalan tantangan lingkungan dan masa depan demokrasi.

Menghubungkan keempat tantangan ini menunjukkan kepada kita bagaimana tantangan ini berakar pada relasi kuasa, dalam struktur sosial kita, maupun dalam budaya modern, subyektivitas, pandangan dunia dan ilmu-ilmu sosial kita. Menjadi jelas bahwa tidak ada cara untuk menangani tantangan tersebut sebagai tantangan, tuntutan sektoral, atau bidang penelitian terisolasi yang terpisah. Tidak ada cara untuk memecahkan salah satunya tanpa menangani ketiga lainnya. Secara bersama tantangan-tantangan tersebut menempatkan koordinat-koordinat dari apa yang oleh para ilmuwan Amerika Latin disebut sebagai suatu "krisis peradaban" (*civilizational crisis*).

› Forum ISA 2020: Sebuah kesempatan untuk berbagi analisis

Forum ISA 2020 akan menjadi kesempatan untuk berbagi analisis kita tentang empat tantangan global tersebut dan keterhubungannya. Forum juga merupakan undangan untuk mendiskusikan pertanyaan epistemologis terkait, hubungan kita dengan aktor yang berkonfrontasi dengan tantangan-tantangan ini, dan kontribusi sosiologi dalam menghadapinya. Bagaimana disiplin kita ditransformasikan oleh tantangan-tantangan ini dan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Bagaimana memperhitungkan aktor sebagai produser pengetahuan mengundang kita untuk mengadopsi epistemologi baru? Bagaimana analisis sosiologi inovatif berkontribusi untuk menangkap dan menghadapi tantangan bersama di Era Global? Apa kendala utama yang kita hadapi dalam menangani masalah-masalah ini? Bagaimana konsep demokrasi, ekologi, ketidaksetaraan dan interseksionalitas ditinjau kembali berdasarkan pengalaman, aktor dan tantangan akhir-akhir ini? Bagaimana tantangan-tantangan ini menjadi garis depan utama di arena pertempuran antara aktor progresif dan reaksioner di abad ke-21?

Setelah masuk dua dekade dalam abad ini, ilmu-ilmu pasti dan ilmu-ilmu sosial menunjukkan pada kita bahwa kita berada pada persimpangan dalam sebagian besar tantangan-tantangan ini. Cara manusia secara kolektif menangani tantangan ini pada dekade berikutnya akan membentuk kehidupan manusia pada sisa abad ke-21. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Geoffrey Pleyers
<Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>

SBS Menyambut Forum ISA

oleh **Jacob Carlos Lima**, Universitas Federal São Carlos, Brasil, Presiden Masyarakat Sosiologi Brasil, dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Pekerjaan (RC30)

Pada tahun 2017, Masyarakat Sosiologi Brasil (SBS) telah berusia 70 tahun. Didirikan pada tahun 1937 dengan nama Masyarakat Sosiologi Paulista, organisasi ini baru dapat ditata secara efektif menjadi Masyarakat Sosiologi Brasil pada tahun 1950, tatkala bergabung dengan Asosiasi Sosiologi Internasional yang baru didirikan.

Periode dari tahun 1937 hingga 2017 tidak bersifat berkesinambungan, karena ciri-ciri politis dan organisatoris suatu kategori profesional yang nyaris hanya terkait dengan universitas. Setelah reorganisasinya pada tahun 1950, pada tahun 1954 SBS menyelenggarakan Kongres Sosiologi Brasil yang pertama di kota São Paulo. Sejalan dengan kudeta militer tahun 1964 sosiologi sangat terpukul, berkenaan dengan diterapkannya pensiun wajib bagi sejumlah besar profesor dan peneliti universitas. SBS baru dapat direorganisasi setelah demokratisasi negara pada tahun 1985. Sejak itu SBS berjalan secara teratur, dengan menyelenggarakan kongres tiap dua tahun sekali; kongres kesembilan belas telah diselenggarakan pada tahun 2019 di kota Florianópolis.

Lintasan SBS yang tidak beraturan pada dekade-dekade awalnya disertai dengan didirikannya program-program jenjang *undergraduate* [*bachelor*] pertama dalam bidang sosiologi dan politik atau ilmu-ilmu sosial, yang diawali pada tahun 1933 di kota São Paulo. Hingga tahun 1964, dibuka lagi sembilan belas program baru di berbagai wilayah negara, serta dua program jenjang *graduate* [*master*], juga di São Paulo.

Dalam periode ini produksi sosiologi mengalami peningkatan, seperti juga halnya dengan mempertahankan sosiologi sebagai suatu ilmu; namun penelitian pada umumnya terbatas di São Paulo. Diktatur militer dan perhatiannya pada otonomi ilmu dan teknologi secara tidak disengaja memberikan sumbangan pada ekspansi sosiologi dan ilmu-ilmu sosial. Strukturasi suatu sistem penelitian dan postgraduate [doctor] menghasilkan ekspansi pendidikan *undergraduate* dan *graduate* di seluruh negeri, memungkinkan bangkitnya asosiasi-asosiasi ilmu sosial dan konperensi serta difusi pengetahuan ilmiah di tahun 1970-an. Sistem evaluasi yang diterapkan CAPES (Badan Federal Brasil untuk Dukungan dan Evaluasi Pendidikan *Graduate*) pada program-program *graduate*, ditetapkannya gelar doktor sebagai prasyarat untuk dapat mengajar di universitas-universitas publik, dan akses ke dana penelitian, berujung pada terciptanya parameter-parameter mutu nasional.

Setelah demokratisasi, ekspansi ini didorong oleh peningkatan kebijakan-kebijakan insentif yang memungkinkan konsolidasi sosiologi sebagai suatu disiplin dan suatu bidang penelitian. Internasionalisasi menyertai ekspansi ini, di mana sosiologi Brasil berpengaruh di seluruh dunia. Sejak tahun 2006 disiplin ini diwajibkan di sekolah menengah atas, sehingga memperluas pasar kerja bagi para sosiolog. Penting untuk dicatat bahwa pasar kerja ini terutama dijumpai di pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Dalam sektor-sektor lain hal ini hampir tidak tampak, karena para sosiolog bekerja sebagai teknisi sosial dan perencanaan dalam institusi-institusi publik, organisasi nonpemerintah, dan perusahaan-perusahaan swasta, fungsi-fungsi yang juga dijalankan oleh para lulusan program-program humaniora lain.

Namun capaian-capaian ini telah terancam sejak terjadinya apa yang dinamakan kudeta parlementer tahun 2016. Sosiologi telah menjadi sasaran para penguasa yang telah mempertanyakan manfaat dan relevansinya, baik di uni-

»

Porto Alegre di kala matahari terbenam. Foto oleh Felipe Valduga/Flickr. Hak tertentu dilindungi.

versitas ataupun di sekolah menengah, aksesnya pada dana penelitian, dan sebagainya. Belum lama berselang sosiologi dituduh mengajarkan "Marxisme budaya" yang kabur yang akan mengancam keluarga Brasil.

Serangan-serangan ini mengalami peningkatan, dengan akibat yang mengkhawatirkan, dan sosiologi bukan merupakan satu-satunya sasaran. Pada tahun 2017, dalam rangka reformasi sekolah menengah yang dilakukan secara tergesa-gesa, sosiologi diturunkan tingkat menjadi suatu bidang pilihan, seperti juga filsafat. Pemerintah sayap kanan ekstrem yang menjabat pada tahun 2019 menyerang kedua disiplin tersebut, dengan argumen bahwa universitas publik harus memprioritaskan program-program yang "bermanfaat," dengan kata lain bidang terapan seperti kedokteran hewan, dan bahwa mereka yang ingin belajar sosiologi dan filsafat harus belajar di universitas swasta. Serangan-serangan tersebut telah melangkah lebih jauh dan sekarang bersifat lebih generik, dengan menyatakan bahwa universitas publik, di mana program *undergraduate* sosiologi dan filsafat terkonsentrasi, merupakan pemborosan yang tidak ada manfaatnya dan dianggap sebagai lokus perlawanan kaum oposisi politik.

SBS, bersama para profesional ilmu sosial lainnya, seperti Asosiasi Antropologi Brasil (ABA), Asosiasi Ilmu Politik Brasil (ABCP), dan Masyarakat Brasil untuk Kemajuan Sains (SBPC), telah berupaya bersama untuk melawan kebijakan-kebijakan ini yang telah membongkar struktur publik atas nama penyesuaian fiskal. Sejak tahun 1990-an, kebijakan-kebijakan seperti itu telah mengakibatkan bencana sosial dan politik di negara-negara di mana kebijakan tersebut telah diterapkan, antara lain seperti di Argentina pada tahun 2000 atau Yunani pada tahun 2010.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan Forum ISA IV di Brasil mewakili suatu ruang tambahan bagi perlawanan, bukan hanya bagi pengetahuan sosiologi, tetapi juga bagi pertempuran antara pengetahuan melawan barbarisme. Barbarisme seperti itu disertai dengan fundamentalisme keagamaan yang sempit, dan suatu otoriterisme yang bekerjasama dengan institusi Republik yang seharusnya membela demokrasi namun agaknya tidak mempunyai cukup keyakinan mengenai hal itu.

Selamat datang pada semua. Kami berharap pada anda dalam perjuangan untuk kebebasan demokrasi, dan keadilan sosial ini. Tanpa kebebasan, sosiologi tidak mungkin ada. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Jacob Carlos Lima
<jacobl@uol.com.br>

› Di Dalam Sosiologi Brasil:

Sebuah Penilaian Singkat

oleh **Hermílio Santos**, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil, Ketua Komite Pelaksana Lokal (LOC) Forum Sosiologi ISA IV, dan Presiden Komite Penelitian ISA tentang Biografi dan Masyarakat (RC38), **André Salata**, PUCRS, Brasil, Wakil ketua LOC Forum Sosiologi ISA IV dan **Emil Sobottka**, PUCRS, Brasil, dan Koordinator Program LOC Forum Sosiologi ISA IV.

The Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul merupakan ajang bagi Forum Sosiologi IV. Foto oleh Marcelo Träsel/Flickr. Hak tertentu dilindungi.

Situasi terkini sosiologi Brasil merupakan sebuah paradoks: di satu sisi ada institusionalisasi, produktivitas dan diversifikasi tingkat tinggi, sementara di sisi lain ada upaya gamblang terutama dari pejabat pemerintah untuk mendelegitimasi kontribusi dan relevansi disiplin ini bagi pengembangan masyarakat. Dalam konteks sensitif inilah, untuk pertama kali Brasil akan menjadi tuan rumah suatu acara utama Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA): Forum Sosiologi ISA IV, yang akan berlangsung pada tanggal 14-18 Juli 2020 di Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre. Komitmen Brasil kepada ISA bukanlah sesuatu yang baru dan telah tumbuh secara konsisten

»

dalam beberapa dekade terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh jabatan Fernando Henrique Cardoso sebagai presiden, satu-satunya warga Amerika Latin dan yang pertama yang pernah mengetuai ISA sejak didirikannya ISA pada tahun 1948. Dengan latar belakang yang kompleks inilah, Forum mendapatkan relevansi yang lebih besar lagi untuk melibatkan sosiolog lokal.

Sosiologi Brasil pertama kali muncul dalam cakrawala dengan membingkai pertanyaan tentang identitas nasional melalui berbagai bidang keahlian. Isu etnik dan ras ditangani secara khusus sebagai konsekuensi komposisi yang beraneka ragam dalam populasi lokal: masyarakat Eropa kulit putih, masyarakat Afrika kulit hitam yang diperbudak, dan masyarakat adat setempat. Bahkan jika pertanyaan etnik-rasial dan modernisasi merupakan bahan diskusi yang selalu dijumpai dalam diskusi-diskusi di kalangan para sosiolog, pengaruh para penulis klasik dan berkembangnya dukungan terhadap investigasi empiris membantu diversifikasi dan pengembangan sosiologi nasional dalam beberapa dekade terakhir. Di bawah rezim militer (1964-1985), sementara generasi profesor sosiologi muda terpaksa hidup dalam pengasingan, tanpa terduga, beberapa program pascasarjana sosiologi didirikan, dan beberapa jurnal ilmiah lahir dan dipublikasikan.

Masalah ketidaksetaraan sosial sebagai isu sentral terus menerus menjadi perhatian kebanyakan sosiolog Brasil. Di antaranya, Gilberto Freyre, misalnya, salah seorang pendiri ilmu-ilmu sosial di Brasil, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mungkin sebuah tatanan sosial dapat menyeimbangkan dirinya sendiri terhadap antagonisme yang sedemikian sama mencoloknya dengan yang menandai masyarakat Brasil sejak pembentukannya. Demikian juga dengan Florestan Fernandes, yang memberikan kontribusi yang tak ternilai, melaksanakan—bersama sosiolog seperti Fernando Henrique Cardoso, mahasiswanya di saat itu—penelitian yang padat dan besar tentang bagaimana bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan stratifikasi yang tampak demikian kolotnya dapat bertahan dalam proses modernisasi. Perhatian signifikan yang diberikan pada subyek-subyek ini dapat dibenarkan tanpa diragukan lagi, karena tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dan tetap bertahan, dapat dianggap menjadi atribut sejarah utama dalam masyarakat Brasil.

Periode demokratisasi setelah 1984 melibatkan maraknya gerakan sosial yang menuntut hak-hak atas kewarganegaraan dan partisipasi politik. Demokrasi dan keadilan sosial menjadi terhubung dengan erat. Tema-tema ini secara khusus terasimilasi oleh para sosiolog yang sering kali terlibat sebagai aktor partisipatif dalam bidang kajian mereka. Maka, tidak mengejutkan jika realitas Brasil menuntut analisis sosiologi yang hati-hati yang melampaui narasi ramah tentang ketidaksetaraan yang menandai pembacaan dominan selama lebih dari setengah dari abad kedua puluh. Peristiwa seperti protes 2013 yang umumnya diarahkan untuk menentang kebijakan ekonomi pemerintah dan semua demonstrasi politik yang mengikutinya, mengindikasikan bahwa masyarakat Brasil jauh dari keseimbangan antagonisme yang pernah digunakan untuk mendeskripsikannya, menantang para sosiolog untuk memahami realitas yang terus berubah ini.

Realitas sosial di Brasil juga membutuhkan perhatian dari perspektif multidimensi dan interseksional, menuntut alat analisis yang semakin canggih. Misalnya, orang kulit hitam masih berpendapatan kira-kira 40% lebih rendah daripada orang kulit putih dalam pasar kerja Brasil, dan penelitian empiris menunjukkan bahwa pendapatan juga bervariasi menurut gender, daerah, kelas dan seterusnya. Mempertimbangkan betapa prinsip-prinsip stratifikasi yang berbeda berinteraksi, tidak dapat diragukan bahwa masyarakat Brasil menjadi kasus yang sangat menarik untuk menganalisis ketidaksetaraan yang semakin kompleks dalam masyarakat modern. Urgensi permasalahan sosial seperti itu juga dapat dihubungkan dengan perhatian sosiologi Brasil baru-baru ini terhadap isu lingkungan.

Dalam suatu sosiologi global seperti yang kita praktikkan saat ini, tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Brasil perlu diinvestigasi sebagai bagian dari realitas yang lebih luas, dalam suatu proyek kolektif di seluruh dunia. Pertanyaan-pertanyaan serupa seperti yang dikemukakan di atas belum lama ini digarisbawahi di banyak negara lainnya, dan beberapa peristiwa politik akhir-akhir ini seperti gerakan *Occupy Wall Street*, menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memperhatikan isu demokratisasi, partisipasi dan ketidaksetaraan. Kami yakin bahwa sosiologi Brasil dapat memberikan kontribusi yang besar pada perdebatan ini dan bahwa realitas kami menyediakan bingkai yang menarik untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan empiris ini.

Seleksi enam artikel dari peneliti muda dari berbagai bagian negara ini adalah contoh dari produksi ilmiah nasional bernas yang sedang berlangsung dalam lapangan sosiologi. Meskipun bukan koleksi yang menyeluruh, namun koleksi ini mengindikasikan kualitas kinerja yang tersedia dan keragaman tema, teori dan pendekatan metodologi. Para penulis ini dan banyak ilmuwan sosial lain yang terlibat akan mengambil bagian dalam diskusi yang berlangsung selama Forum ISA, yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Masyarakat Sosiologi Brasil (SBS) dan PUCRS. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Hermílio Santos <hermilio@pucrs.br>
André Salata <andre.salata@pucrs.br>
Emil Sobottka <esobottka@pucrs.br>

› Narasi Masa Kecil di Institut Pengasuhan

oleh **Veridiana Domingos Cordeiro**, Universitas São Paulo, Brasil dan anggota Komite Penelitian ISA dalam bidang Biografi dan Masyarakat (RC38)

Institut Pertanian untuk Anak di Bawah Umur, Batatais, Negara Bagian São Paulo, Brasil. Kredit: Veridiana Domingos Cordeiro.

Selama periode kediktatoran militer (1964-1985), Brasil tidak hanya menyaksikan persekusi politik, penahanan, penyiksaan, sensor, dan penghilangan orang, tetapi juga praktek-praktek paksaan untuk mengontrol anak-anak yang terlantar dan terpinggirkan. Untuk itu, pemerintah telah mendirikan Yayasan Nasional untuk Kesejahteran Anak (FUNABEM) yang bertanggungjawab atas semua kebijakan publik yang berkaitan dengan anak-anak dan pemuda. FUNABEM mencakup Institut Disipliner yang telah ada sebelumnya, dan mengintensifkan penginterniran terhadap anak dan remaja miskin. Masa kecil terkucil yang dihabiskan di suatu institusi total (*total institution*) yang diikuti dengan masa dewasa yang terstigma menandai kehidupan mantan anak asuh tersebut. Setelah beberapa dekade, beberapa orang di antara mereka berkumpul kembali dan menjalin suatu hubungan jejaring melalui media sosial dan pertemuan tahunan untuk mengingat pengalaman masa lalu mereka di kehidupan pedesaan, paksaan dalam institut, ketidakpastian mengenai masa depan, pekerjaan anak, sosialisasi pria, dan disiplin.

Kami mengadopsi kerangka teoretis yang mengartikulasi teori-teori sosiologi mengenai memori untuk memahami dinamika praktek-praktek mnemonik [ungkapan untuk membantu mengingat sesuatu] prosesual yang dilakukan oleh mantan anak asuh Institut Disipliner untuk bernegosiasi dengan waktu dan identitas. Selama empat tahun, kami mengumpulkan data berupa interaksi mereka di berbagai tempat dan bidang untuk melihat bagaimana proses mengingat saling terkait dengan pemikiran-pemikiran, hubungan sosial, dan artefak-artefak. Pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dan etnografi tradisional, hingga ke netnografi [penelitian daring berbasis etnografi]. Kami menggunakan kerja hermeneutika untuk menggali serangkaian narasi ini, serta secara prosedural mengikuti rangkaian waktu untuk bisa menginterpretasi bagaimana pengalaman masa lalu mereka pahami.

Kami menyimpulkan bahwa berjalannya waktu dan terja-

»

Seorang mantan warga binaan mengunjungi Institut untuk Anak di Bawah Umur. Kredit: Veridiana Domingos Cordeiro

dinya perubahan dalam interaksi mereka menentukan landasan interpretasi mereka mengenai siapa mereka (dulu dan kini) dan bagaimana mereka memahami masa lalu. Narasi yang secara luas mereka akui telah memoles interpretasi mereka atas berbagai peristiwa. Narasi-narasinya biasanya menyembunyikan peristiwa-peristiwa yang keras dan makna baru disajikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan peristiwa-peristiwa ini ke dalam suatu rancangan menyeluruh yang digerakkan oleh keberhasilan hidup seseorang. Dengan mengikuti narasi-narasi mereka, tiga unsur negatif diinterpretasikan secara positif: penelantaran orang tua sebagai suatu tindakan altruisme; kekerasan institusional sebagai hal yang sah; dan kerja paksa anak di dalam sebuah institut sebagai pengalaman yang membawa kemajuan.

Keberadaan dalam suatu komunitas mnemonik menciptakan *jaringan validasi* dalam pengertian bahwa interpretasi tertentu cenderung lebih mengungguli [interpretasi] yang lain. Kesadaran yang dibentuk oleh masa lalu menjadi lebih-kurang terpadu karena dengan berjalannya waktu pemahaman-pemahaman yang berbeda semakin diabaikan, bilamana pemahaman tersebut tidak divalidasi oleh orang lain di dalam jaringan tersebut. Meskipun narasi otobiografi didasarkan pada ingatan-ingatan pribadi, namun usaha untuk memahaminya melalui sudut pandang bersama mendorong para mantan anak asuh ini untuk menyesuaikan pandangan pribadi mereka ke dalam suatu cerita kehidupan yang bersifat menyeluruh, positif dan terintegrasi. Banyaknya penderitaan dalam kisah kehidupan mereka (keterpisahan dari keluarga, kekerasan institusional, masa kanak-kanak yang terkucil, dan hidup yang dilandasi stigma, misalnya) dikisahkan sebagai langkah-langkah ke arah sebuah jalan menuju kesuksesan. Institut menanamkan pada mereka nilai-nilai yang dipromosikan oleh institusi-institusi kediktatoran, terutama pembentukan karakter melalui pendisiplinan, yang seringkali berarti harus menaati peraturan tanpa membantah. Dalam komunitas mnemonik seperti ini, dibangunnya narasi bersama memberikan rasa kebersamaan atas masa lalu yang ada, dan pengakuan orang lain terhadapnya. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Veridiana Domingos Cordeiro
<veridiana@uchicago.edu>

› Bantuan Sosial

sebagai Sektor Kebijakan di Brasil

oleh **Gustavo Conde Margarites**, Institut Federal Rio Grande do Sul, Brasil

Para anggota Dewan Konstitusi merayakan diundangkannya Konstitusi Federal Brasil pada tahun 1988. Kredit: Agência Brasil/ Archive.

Sejak dilakukannya strukturisasi negara Brasil yang modern, bantuan sosial telah dikelola secara tidak menentu dan dengan hanya sedikit melibatkan negara. Inisiatif-inisiatif di bidang ini telah diarahkan oleh gagasan-gagasan filantropi dan amal. Selain itu, tindakan-tindakan bantuan sosial diterapkan sebagai ukuran-ukuran jaminan sosial oleh pemerintah Brasil, mengaburkan batas-batas di antara kedua sektor tersebut. Artikel ini, berdasarkan penelitian PhD saya, menganalisis perubahan kelembagaan yang memungkinkan transformasi bantuan sosial menjadi suatu sektor kebijakan yang dipandu oleh konsep hak-hak sosial. Proses ini dapat dibagi menjadi dua tahap yang berbeda: pertama, perumusan Konstitusi Federal (1986-1988) dan kedua, Undang-Undang Organik Bantuan Sosial (1991-1993). Dalam setiap momen ini, ada berbagai aktor kolektif yang berbeda yang menyokong perubahan-perubahan pada pola historis yang dianut oleh negara dalam kaitannya dengan masalah ini, yang menghasilkan pembentukan suatu sektor kebijakan yang baru.

Pada tahap pertama, kontribusi utama terhadap perubahan kelembagaan berasal dari bidang jaminan sosial, [khususnya] melalui partisipasi sekelompok ahli yang dibentuk oleh para birokrat federal yang tertarik untuk merumuskan kembali sistem perlindungan sosial Brasil. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan sistem baru yang didasarkan pada gagasan mengenai perlindungan sosial sebagai suatu hak dari seluruh warga negara dan dijamin oleh negara. Persepsi mereka adalah bahwa bantuan sosial akan memainkan peran penting dalam usulan baru [yang diajukan oleh pemerintah] dengan memastikan bahwa warga di luar lingkup jaminan sosial akan ditanggung oleh jenis perlindungan sosial lainnya.

Fase kedua ditandai dengan masuknya sebuah kelompok yang dibentuk oleh para profesional dan spesialis dari bidang akademik dan profesional pekerjaan sosial. Sampai diundangkannya Konstitusi Federal, para profesional ini tidak terlibat dalam proses tersebut. Integrasi bertahap para aktor dari bidang akademik dan dari profesi pekerjaan sosial dijelaskan oleh transformasi teoretis yang mengubah cara individu dari sektor-sektor ini melihat hubungan mereka dengan negara. Untuk waktu yang lama, gagasan yang disebarkan oleh pandangan strukturalis Marxisme yang mengatakan bahwa tindakan negara adalah instrumen reproduksi masyarakat borjuis, mempunyai pengaruh lebih dominan. Pemahaman teoretis ini mulai mengendur pada akhir 1980-an, dengan menguatnya perspektif Gramscian yang melihat negara sebagai satu ruang untuk perjuangan kontra-hegemonik. Pengalihan ini mengubah cara para profesional dan peneliti di bidang yang terkait dengan kebijakan publik dan pekerjaan sosial, yang sebelumnya dipandang dengan penuh kehati-hatian. Sebagai konsekuensi dari transformasi kerangka teoretis ini, para akademisi dan profesional pekerjaan sosial membentuk kelompok yang utamanya menyokong pemisahan bantuan sosial dan jaminan sosial sebagai sektor kebijakan yang berbeda.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan bantuan sosial sebagai suatu sektor kebijakan di Brasil hanya dimungkinkan karena adanya kombinasi faktor-faktor eksternal di luar dinamika kebijakan sosial Brasil, seperti berakhirnya kediktatoran militer dan perumusan suatu tatanan demokrasi baru, dan aksi kelompok-kelompok yang terkait dengan bidang-bidang seperti jaminan sosial dan pekerjaan sosial. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Gustavo Conde Margarites
<gustavo.margarites@gmail.com>

› Perjuangan Perempuan

untuk Perumahan Perkotaan di Porto Alegre

oleh **Priscila Susin**, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Brasil

Priscila Susin mengamati atap bangunan yang telah diduduki, yang biasanya dikelola oleh kaum perempuan, di pusat kota Porto Alegre, 2019. Kredit: Priscila Susin.

Defisit perumahan di kota-kota besar Brasil mempengaruhi sektor-sektor signifikan [kehidupan] penduduk miskin, dengan memberi dampak lebih besar pada perempuan kulit hitam. Munculnya gerakan sosial perumahan (gerakan pendudukan perumahan) di daerah perkotaan telah membangkitkan repertoar politik baru sejak 1980-an, mengungkapkan tingginya jumlah properti tanpa fungsi sosial dengan cara menempati bangunan yang ditinggalkan di pusat kota. Khususnya, perempuan adalah kelompok mayoritas yang tinggal di ruang-ruang ini, menunjuk pada segregasi multidimensi yang mereka alami dalam kehidupan normatif dan sehari-hari. Penelitian PhD saya bertujuan membangun dialog sementara yang mendalam dengan para perempuan ini, mencoba memahami interpretasi dan pengalaman yang dijalani dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan perumahan sebelum dan setelah terlibat dalam kelompok yang dimobilisasi secara politik dan pindah ke bangunan yang diduduki [mereka].

› Pendekatan interpretatif dan biografi

Penelitian lapangan dilakukan antara 2015 dan 2018 di Porto Alegre, ibu kota Rio Grande do Sul. Untuk mendapatkan data biografi sinkronis dan diakronis, pengamatan partisipasi dan wawancara biografi dilakukan dengan perempuan yang tinggal di dua gedung yang diduduki di pusat kota. Pekerjaan empiris ini mencakup komitmen hampir setiap minggu untuk mengikuti agenda gerakan sosial tersebut demi menegakkan pemahaman terus menerus tentang politik dan rutinitas sehari-hari.

»

Coretan yang berbunyi "pusat kota adalah milik rakyat" di dinding sebuah bangunan yang diduduki di pusat kota Porto Alegre, 2018. Kredit: Priscila Susin.

Metodologi terapan didukung secara epistemologis oleh sosiologi Alfred Schütz, terutama konsepnya tentang "sistem relevansi," dan serangkaian gagasan yang diartikulasikan dengan baik (tercermin juga pada Berger dan Luckmann) tentang bagaimana kemungkinannya untuk memiliki akses terhadap kekhasan keseharian konstruksi sosial terhadap realitas. Metode biografi yang dikembangkan oleh Gabriele Rosenthal menyediakan instrumen praktis untuk merekonstruksi pengalaman biografis 23 wanita yang diwawancarai dalam interaksinya dengan bingkai sosial dan historis.

› Antara ranah simbolik "tradisional" dan yang "dipolitisasi"

Di antara temuan-temuan utama, pengakuan titik temu masalah antara perumahan dan gender dapat dipahami, dengan menawarkan perspektif yang berlandaskan empirik sebagai solusi bagi beberapa keterbatasan metodologis dalam studi ini. Merekonstruksi sistem relevansi orang yang diwawancarai memungkinkan tertangkapnya elemen kendala, perlawanan, dan penanganan yang biasanya tidak tersedia dari kategori-kategori analitik yang sudah disiapkan sebelumnya.

Dengan menyikapi budaya hierarkis dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan bahwa sifat organisasi gerakan sosial juga dapat melenyapkan peluang bagi partisipasi politik perempuan yang adil dalam proses "perjuangan". Namun perkembangan kinerja politik baru yang sedang berlangsung pada dasarnya terkait dengan konfrontasi dan perubahan baru-baru ini dalam prinsip-prinsip pengaturan tradisional hubungan gender seperti yang diamati selama penelitian lapangan.

Tumpang tindih interpretasi laten antara ranah simbolik "tradisional" dan yang "dipolitisasi" juga berulang kali hadir selama analisis biografi. Untuk membenarkan bermukimnya mereka di perkotaan secara nyaris ilegal, orang-orang yang diwawancarai mengungkapkan adanya konflik yang berulang antara mengikuti peran gender yang diharapkan (bersalin dan pekerjaan rumah tangga) dan menggabungkan pemahaman politik yang muncul (perumahan yang memadai dan akses ke kota sebagai hak). Kedua jenis sumber daya presentasi-diri tersebut ternyata dapat menghasilkan modal moral, meskipun yang pertama sebagian besar terkait dengan nilai-nilai kelas yang eksternal dan disahkan secara luas, dan yang kedua berkaitan dengan politik internal dari perjuangan, yang menghasilkan kemungkinan generalisasi perjuangan perumahan sebagai "cara" dan sebagai "tujuan." ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Priscila Susin <pri.qsusin@gmail.com>

› Tata Kelola Informal

terhadap Kekerasan di Recife, Brasil

oleh **Ricardo Caldas Cavalcanti**, Universitas Federal Pernambuco, Recife, Brasil, dan anggota Asosiasi Sosiologi Amerika Latin (ALAS)

Recife, Brasil, 2019. Kredit: Ricardo Caldas Cavalcanti.

Isu tata kelola atau regulasi (formal dan informal) terhadap kekerasan di wilayah yang tidak memiliki hak pilih di Amerika Latin telah menjadi subjek penelitian sosiologis selama bertahun-tahun. Studi ini, yang merupakan subjek karya ilmiah master saya, dikembangkan dengan tujuan menganalisis dan memahami bagaimana kekerasan diatur tanpa mediasi lembaga negara dalam suatu komunitas di bagian selatan Recife, Brasil. Dalam istilah praktis, regulasi kekerasan non-negara berarti pembentukan kesepakatan antara aktor-aktor lokal yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan pemahaman dan resolusi (di luar atau melawan negara).

Hipotesis utama dari penelitian ini adalah bahwa kinerja organisasi kepolisian dan ketiadaan legitimasi sistem peradilan pidana dalam konteks Brasil menciptakan permintaan akan bentuk-bentuk alternatif tata kelola kekerasan. Variabel penting lainnya yang dinamikanya secara langsung memengaruhi regulasi kekerasan lokal adalah berfungsinya pasar narkoba yang fragmentasinya menghalangi konsolidasi praktik monopoli regulasi, dan keberadaan jaringan informal aktor lokal yang mampu memengaruhi statistik pembunuhan. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: etnografi (saya tinggal selama lima bulan di sebuah komunitas berpenghasilan rendah di Recife), dengan lusinan wawancara semi-terstruktur formal dan informal, dan observasi non-partisipan.

Temuan utama dari penelitian yang masih berlangsung ini membuat saya berpendapat bahwa modus tindakan Polisi Militer (PM) dalam komunitas tersebut adalah mekanisme penjelasan utama untuk perlunya mencari bentuk-bentuk alternatif penegakan ketertiban. Dalam komunitas, PM bertindak nyaris tanpa akuntabilitas, mengubah rutinitas melalui tindakan yang tak dapat diramalkan yang biasanya melibatkan penggunaan kekerasan secara tidak proporsional dan serangkaian pengekangan terhadap penduduk. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga dengan legitimasi rendah dan efektivitas terbatas dalam menengahi konflik

Mungkin temuan yang paling relevan dari penelitian ini adalah bahwa pola pengaturan kekerasan di masyarakat diperintahkan atau disahkan oleh aktor lokal yang memiliki sekadar legitimasi relatif di kalangan penduduk. Ini adalah proses yang di dalamnya tidak ada sistem tindakan sosial atau peran tetap preskriptif yang reguler, seperti misalnya dalam kasus Mafia (Gambetta, 1993), atau pada Primeiro Comando da Capital (PCC) (Feltran, 2010). Juga, tidak ada peran geng lokal, seperti dalam kasus yang diteliti oleh Bourgois (2003) dan Venkatesh (2009).

Meskipun tindakan-tindakan ini tidak mendorong transformasi yang langgeng berupa dikuranginya jumlah episode kekerasan, namun aksi-aksi tersebut menunjukkan fungsi yang jelas, karena tindakan-tindakan tersebut akan menghasilkan bentuk kontrol terhadap kekerasan yang lebih absah daripada tindakan polisi. Tindakan-tindakan tersebut mungkin berfungsi sebagai mekanisme yang kurang lebih disengaja untuk mitigasi konflik daripada sebagai kerangka kerja permanen untuk pengurangan pertikaian. Fakta bahwa para pendukung regulasi biasanya bertindak diam-diam membuat tindakan mereka tidak terlihat jelas oleh sebagian besar penduduk. Dengan demikian, inisiatif semacam itu tidak menjadi model tindakan yang kepatuhannya mendapatkan lebih banyak pendukung, sehingga mencegah mereka menjadi cara yang layak untuk memenuhi tuntutan yang ada di bidang regulasi kekerasan. ■

Referensi

Bourgois, P. (2003) *In search of respect: Selling crack in El Barrio*. Cambridge: Cambridge University Press.

Feltran, G. (2010) "Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo." *Caderno CRH* 23(58).

Gambetta, D. (1993) *The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection*. Cambridge: Harvard University Press.

Venkatesh, S. (2009) *Gang leader for a day*. London: Penguin UK.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ricardo Caldas Cavalcanti
<ricardocaldas13@gmail.com>

› Ketimpangan Profesional di Brasil

oleh **Lucas Pereira Wan Der Maas**, Universitas Federal Minas Gerais (UFMG), Brasil

Di Brasil pendakian tangga profesi dan perolehan ijazah tinggi sudah tidak lagi merupakan jaminan yang pasti bagi keunggulan seseorang di pasar kerja.

Karena adanya ekspansi dan demokratisasi pendidikan tinggi yang berlangsung di dalam negeri, dunia profesional di Brasil telah berubah. Antara 2000 dan 2010, penduduk yang berijazah universitas telah meningkat lebih dari dua kali lipat, termasuk lebih banyak orang yang biasanya berpartisipasi rendah dalam pendidikan tinggi, khususnya lebih banyak kaum perempuan, orang-orang yang mengidentifikasikan diri sebagai kulit hitam atau coklat, dan orang-orang berpenghasilan rendah.

Sementara di negara-negara berpenghasilan tinggi ekspansi dalam akses ke universitas dimulai pada tahun 1960-an, hingga mencapai lebih dari 50% dari Angka Partisipasi Murni, di Brazil hal tersebut baru dimulai di tahun

»

1980-an. Antara 2000 dan 2010 proporsi orang-orang berusia 18 sampai 24 tahun yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan tinggi meningkat dari 28.4% menjadi 48.5%. Namun proporsi orang-orang yang secara efektif mengakses pendidikan tinggi hanya berkisar antara 9.1% dan 18.7%. Angka Partisipasi Murni naik dari 7.4% ke 14%, angka yang masih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara Amerika Latin seperti Cile dan Argentina, yang pada 2010 meraih angka di atas 30%.

Di samping itu, masuknya profesional yang baru lulus dari universitas ke dalam pasar kerja tidak memenuhi permintaan yang sesuai. Sekarang dijumpai adanya skenario inflasi ijazah (*credential inflation*), yaitu kombinasi antara persyaratan pendidikan tinggi, kurangnya penyerapan profesional ke dalam pasar kerja, meningkatnya persaingan untuk menduduki posisi profesional, dan devaluasi ekonomi dari ijazah. Inflasi ijazah tidak hanya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tetapi juga menurunnya kemampuan masyarakat untuk memproduksi kelebihan melalui ijazah yang mengalami devaluasi sebagai suatu mekanisme distribusi.

Penelitian disertasi doktor saya bertujuan memahami bagaimana perluasan landasan sosial kelompok-kelompok profesional dan devaluasi ijazah yang menyertainya mempengaruhi proses-proses stratifikasi sosial yang didasarkan pada profesionalisme, khususnya dalam artian konservasi dan perolehan posisi-posisi yang terkait dengan kelas menengah. Studi saya difokuskan pada lintasan (*trajectories*) dua profesi di bidang kesehatan—kedokteran dan perawatan—dengan secara empiris menganalisis ketimpangan antar- dan intra-profesi antara 1991 dan 2010.

Data demografi, pendidikan tinggi, dan pasar kerja dari sumber-sumber publik digunakan di samping data primer yang dikumpulkan melalui suatu survei daring kepada suatu sampel dari 217 orang dokter dan 222 orang perawat. Lintasan dikonstruksi melalui analisis *multiple correspondence* dan *cluster*, yang bertujuan untuk secara empiris mengorganisasi ruang profesional di seputar variabel-variabel yang menggambarkan jalur-jalur individu yang berbeda mulai dari keluarga asal, melalui pelatihan profesional, sampai masuk ke pekerjaan. Analisisnya memungkinkan penafsiran ruang profesional dari posisi, pemisahan, dan penggantian dari para agen.

Sekurang-kurangnya ada empat temuan yang perlu dicatat: (i) suatu peningkatan signifikan dalam ijazah dan lulusan sebagai akibat dari peningkatan lowongan dalam pendidikan tinggi antara 1991 dan 2010; (ii) suatu ekspansi dalam landasan sosial rekrutmen, khususnya di kalangan perempuan, mahasiswa berpenghasilan rendah, dan mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai kulit hitam atau coklat; (iii) suatu depresiasi terhadap ijazah di kalangan kelas menengah dalam konteks peningkatan persaingan untuk meraih posisi berpenghasilan [tinggi] dalam pasar profesional; dan (iv) suatu peningkatan pada hirarki horisontal dalam populasi *undergraduate*, dengan kemunduran bagi kaum perempuan, orang berkulit hitam dan coklat, remaja, dan para anggota profesi yang kurang berprestise.

Lintasan-lintasan yang telah diidentifikasi (meskipun bukan satu-satunya kemungkinan) menunjukkan pentingnya warisan keluarga dan jalur pendidikan tinggi dalam mengakses posisi-posisi terkemuka dalam ruang profesional. Periode kelulusan dan usia para profesional pun menyumbang pada diferensiasi antar- dan intra-profesional. Segmentasi gender juga memainkan peran, karena partisipasi perempuan lebih tinggi di lintasan yang kurang terkapitalisasi. Perbedaan antar- dan intra-profesional secara bersamaan mereproduksi dan memperkuat ketimpangan dalam ruang profesional. Perbedaan-perbedaan semacam itu diungkapkan pula dalam persepsi kelas para responden.

Secara singkat, keterbukaan terhadap profesionalisme di Brasil antara 1991 dan 2010 telah mengubah definisi ruang profesional, yang telah menjadi kurang terkapitalisasi dan lebih timpang. Meskipun demikian, struktur internalnya dalam artian pembagian antar- dan intra-profesional tidak berubah, di mana profesionalisme dipertahankan sebagai suatu mekansme untuk reproduksi posisi-posisi tinggi, meskipun gerakan-gerakan kenaikan sosial telah mengalami ekspansi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Lucas Pereira Wan Der Maas
<lucaswander@hotmail.com>

› Lintasan Kelas Menengah di Rio de Janeiro

oleh **Izabelle Vieira**, PPCIS/UERJ (Universitas Negara Bagian Rio de Janeiro), Brasil

Ilustrasi oleh Arbu.

Pada tahun 2000-an Brasil mengalami suatu momen ekonomi yang menguntungkan, di kala penduduk mengalami kenaikan tingkat penghasilan dan konsumsi. Pada tahun 2014, suatu krisis politik dan ekonomi yang serius meledak di dalam negeri, yang terutama dirasakan melalui hilangnya pekerjaan dan devaluasi mata uang.

Dengan tujuan memahami proses mobilitas sosial dan dampak krisis baru-baru ini pada kehidupan kelas menengah, suatu penelitian kualitatif dilaksanakan, yang terdiri atas pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam perorangan dengan 28 orang penghuni suatu kondominium di lingkungan hunian Pechincha di Rio de Janeiro.

Para peserta penelitian mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian suatu stratum antara dalam struktur sosial, yang sering dirujuk sebagai "kelas menengah" atau istilah lain terkait.

Para responden mengenali naik dan turunnya proses mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh Igor (42, pengemudi): "*Lihat, saya pernah di sekolah menengah. Dan saya pernah, saya tidak akan katakan di puncak, tetapi hampir di sana, dan sekarang saya berada di bawah.*" Persepsi umum ialah bahwa periode lompatan (*boom*) merupakan suatu khayalan karena tidak memiliki landasan politik, ekonomi dan sosial yang kuat.

Pada tahun-tahun berlangsungnya peningkatan, menurut refleksi kelompok yang diteliti, dimensi konsumsi merupakan pendorong proses diferensiasi sosial. Di masa kini, waktu menghadapi krisis ekonomi, mereka harus mengurangi pola konsumsi mereka, sehingga barang [konsumsi] menjadi perbatasan simbolis yang tidak memuaskan: "*Barang konsumsi memberikan suatu pandangan yang tidak pantas yang mengesankan bahwa seseorang telah berkembang dalam kehidupan*" (Arthur, 46, perwira angkatan udara); "*Saya pikir kelas menengah sangat perhatian pada iklan. Ini mendorong mereka untuk bepergian, tetapi sekali anda bepergian, anda akan kembali ke kenyataan anda [tertawa]*" (Gilmar, 64, pedagang).

Mereka yang diwawancara melaporkan bahwa dalam keluarga mereka terdapat harapan tinggi dari orang tua bahwa anak-anak mereka akan lebih terdidik daripada mereka sendiri. Para orang tua ini telah melakukan "pengorbanan" nyata bagi anak-anak mereka agar mereka dapat masuk sekolah dasar dan sekolah menengah di lembaga swasta. Transmisi nilai dan perilaku merupakan salah satu faktor utama untuk menolak sekolah publik: "*[…] ini soal hidup bersama anak-anak lain dengan pendidikan yang demikian berbeda, bukan?! Ini keprihatinan terbesar*" (Ilza, 47, penganggur, keamanan).

Orang-orang yang diwawancara merasa sangat tidak aman dalam mempertahankan posisi sosial mereka dan, dalam artian ini, sekolah swasta merupakan sebuah simbol dan suatu perangkat kepemilikan kelas: "*Mungkin anak saya perlu belajar di sekolah publik, dan saya sudah membayangkan diri saya sendiri di suatu kelas yang lain. Itu akan aneh!*" (Lara, 42, penganggur, keamanan).

Karena mereka tidak memiliki akumulasi kekayaan, kelas menengah hanya memiliki pengetahuan dan ketrampilan kerja. "Modal" ini perlu diperbaharui tiap generasi, suatu hal yang memerlukan upaya dan komitmen. Karena tidak mampu melihat suatu cakrawala perbaikan bagi diri mereka sendiri dalam konteks krisis masa kini, kelas menengah ini bertaruh pada anak-anak mereka sebagai jaminan bagi proyek peningkatan sosial mereka. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Izabelle Vieira
<representar.mg@hotmail.com>

› Penghematan:

Kompromi terhadap Universalisme dalam Layanan Kesehatan?

oleh **Maria Petmesidou**, Universitas Democritus Thrace, Yunani, **Ana Guillén**, Universitas Oviedo, Spanyol, **Emmanuele Pavolini**, Universitas Macerata, Italia

Setiap perubahan dalam ruang lingkup layanan yang disediakan secara kolektif dan kondisi yang menetapkan hak atas layanan tersebut dapat secara signifikan mengubah kontur universalisme dan pola-pola solidaritas yang mendasarinya. Italia, Spanyol, Portugal, dan Yunani telah memiliki sistem perawatan kesehatan universal sejak akhir 1970-an-awal 1980-an. Namun, kedua negara yang terakhir menonjol karena universalisme mereka yang "tidak lengkap", karena jenis perawatan campuran yang mempertahankan ketidaksetaraan dalam penyediaan layanan yang bertahan hingga akhir-akhir ini. Ini menggabungkan sistem kesehatan nasional dengan cakupan asuransi kesehatan sosial untuk kelompok sosial yang berbeda dan pengeluaran swasta yang tinggi. Krisis keuangan mengakibatkan beban besar pada keempat sistem perawatan kesehatan, di mana Yunani mengalami beban paling mendalam dan untuk rentang waktu yang lebih lama.

Apakah krisis dan penghematan telah mendorong keempat sistem perawatan kesehatan tersebut ke suatu jalur yang mengarah pada transformasi yang nyata dalam ruang lingkup dan isi [dengan prinsip] universalisme? Jawaban singkatnya adalah bahwa sejauh ini bukti yang ada tidak secara jelas menunjuk ke arah ini. Dalam dekade terakhir, serangkaian kebijakan serupa diterapkan di keempat negara, seperti meningkatnya pembagian beban biaya (sebagian besar untuk obat-obatan), perubahan dalam kisaran pelayanan, dan pengurangan sumber daya manusia dan material. Namun, sejauh mana langkah-langkah ini telah menggeser beban biaya perawatan kepada pasien dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan sangatlah bervariasi di antara empat negara tersebut. Selain itu, di Yunani dan Portugal, yang menghadapi krisis utang negara paling serius (dan datang dalam program *bailout*), pertemuan dari tekanan eksternal dan internal memicu perubahan yang signifikan yang ditujukan untuk mengatasi fragmentasi sistem, meningkatkan transparansi, dan mempromosikan pemerataan layanan, meskipun dengan layanan untuk umum yang lebih ramping.

› Pengeluaran publik yang menurun dan kebutuhan yang tidak terpenuhi

Pada puncak krisis (2008-2013) pengeluaran kesehatan masyarakat per kapita (diukur dalam Standar Daya Beli sebagai dasar perbandingan, dan pada harga konstan tahun 2010) anjlok secara drastis (sekitar 30%) di Yunani. Pengeluaran ini turun 12% di Portugal, 8% di Italia, dan 3% di Spanyol. Selanjutnya, angka ini hampir stagnan di Yunani dan Italia, tetapi tren kenaikan moderat berlanjut di Spanyol dan Portugal. Namun, di keempat negara tersebut kesenjangan vis-à-vis rata-rata EU15 (yaitu, dari 15 negara anggota sebelum perluasan timur Uni Eropa) melebar. Pada 2017, pengeluaran kesehatan masyarakat per kapita di Yunani turun hingga sepertiga dari rata-rata EU15 dan setengahnya di Portugal. Hal ini lebih dekat dengan rata-rata ini di Spanyol dan Italia. Sebaliknya, khususnya sejak 2013, pengeluaran swasta telah meningkat di empat negara tersebut, yang baru-baru ini mencakup antara 40% (di Yunani) dan 24% (di Spanyol) dari total pengeluaran kesehatan.

Sejauh ini Yunani menunjukkan kebutuhan yang tidak terpenuhi yang paling tinggi dalam perawatan medis, sebagian besar karena biaya perawatan kesehatan tidak terjangkau. Di negara ini, bahkan rumah tangga berpendapatan menengah, khususnya yang mempunyai anak dan orang usia lanjut, menghadapi kendala biaya untuk perawatan kesehatan. Oleh karena itu, risiko bahwa pembayaran pribadi akan menjadi "bencana" bagi anggaran rumah tangga tetap tinggi. Di Spanyol dan Italia, meningkatnya waktu tunggu untuk perawatan spesialis dan perawatan di rumah sakit selama krisis merupakan hambatan utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap tingkat perawatan kesehatan yang berbeda. Meski demikian, prevalensi kebutuhan yang tidak terpenuhi tetap terendah di Spanyol. Namun, di kedua negara ini terdapat kesenjangan regional yang cukup besar dalam distribusi sumber daya kesehatan. Ini sangat jelas di Italia, dengan wilayah selatan yang kekurangan sumber daya memadai dibandingkan dengan wilayah utara/tengah.

»

“Di Yunani, bahkan rumah tangga berpendapatan menengah, khususnya yang mempunyai anak dan orang usia lanjut, menghadapi kendala biaya untuk perawatan kesehatan.”

Di Yunani (dan sampai batas tertentu juga di Portugal) reformasi yang mencakup ambang batas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan dokter (seperti batasan jumlah rujukan untuk tes diagnostik/laboratorium, batas atas jumlah obat yang diresepkan bulanan, dll.) menjadikan sistem lebih transparan dan berkontribusi pada pengendalian biaya. Tetapi pada saat yang sama, hal-hal tersebut berdampak pada daya tahan dan arah berjalannya sistem. Ini diperparah oleh jalur-jalur perawatan yang masih (kurang lebih) terfragmentasi antara perawatan rumah sakit primer dan khusus di kedua negara. Selain itu, di keempat negara tersebut, prevalensi yang tinggi untuk rawat inap di rumah sakit untuk beberapa penyakit kronis (seperti diabetes, hipertensi, asma, dan lain-lain) mencerminkan ketidakefisienan dalam batasan pencegahan-perawatan primer, dengan implikasi yang negatif terhadap keadilan.

› Poin-poin yang menjadi perhatian

Beberapa poin perhatian utama adalah sebagai berikut. Pertama, penyesuaian kebijakan kesehatan terhadap sumber daya sektor publik yang tertekan akan tetap berlangsung. Hal ini tercermin dalam terus naiknya belanja kesehatan swasta per kapita, dan lambatnya kenaikan (atau stagnasi) belanja publik. Kedua, pada prinsipnya kelayakan cakupan tetap komprehensif, tetapi dalam praktiknya keterbukaan akses merupakan tantangan tersendiri bagi sejumlah kelompok rentan (karena berbagai kombinasi alasan—seperti biaya yang tidak terjangkau, waktu tunggu yang lama, jarak, dll.—di setiap negara). Ketiga, asuransi kesehatan swasta (berdasarkan pekerjaan atau sukarela) berkembang: antara tahun 2005 dan 2015, dengan jumlahnya yang naik dua kali lipat di Spanyol dan naik secara nyata di Portugal. Biaya ini juga meningkat di Italia, sementara di Yunani krisis menghentikan tren kenaikan yang baru terjadi. Tetapi di negara yang terakhir ini, pembayaran pribadi tetap tinggi. Sejauh ini, asuransi kesehatan swasta dicari terutama untuk akses yang lebih cepat ke perawatan spesialis dan terutama ditujukan untuk karyawan-karyawan beberapa perusahaan besar.

Bagaimana tren ini akan berkembang di masa depan dan kemungkinan kompromi terhadap cakupan universal sangat tergantung pada sejumlah faktor, seperti kebijakan yang mengatur ulang kombinasi publik-swasta, preferensi pekerja, kebijakan perpajakan, dll. Jika asuransi kesehatan kerja menjadi komprehensif (yaitu mencakup mayoritas populasi pekerja dan diatur dengan ketat, seperti yang terjadi misalnya di beberapa negara Eropa Utara), hal itu dapat mempertahankan kesetaraan dalam akses. Ini dapat meringankan beberapa tekanan terhadap keuangan publik tetapi pada saat yang sama mempertahankan cakupan universal. Namun, jika asuransi pekerjaan hanya mencakup beberapa kelompok (pekerja yang diistimewakan) dari populasi pekerja, maka asuransi tersebut berpotensi mengubah solidaritas menjadi suatu jenis pekerjaan-mutualis yang pada akhirnya dapat mengikis universalisme.

Akhirnya, di masa mendatang yang dapat diramalkan, sistem publik akan ditantang lebih lanjut oleh serangkaian tekanan keuangan yang serius yang menyertai kemajuan teknologi yang cepat di sektor kesehatan dan meningkatnya kebutuhan akan layanan langkah-langkah pencegahan “hulu” (karena seluruh empat negara berkinerja buruk) dan layanan sosial “hilir” (tetapi sebagian besar jangka panjang) karena penduduk yang semakin menua. Ini mungkin terjadi sebagai pemicu lebih lanjut untuk menata ulang batasan publik-swasta, menggeser dinamika solidaritas sosial dalam perawatan kesehatan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Maria Petmesidou <marpetm@otenet.gr>
Ana Guillén <aguillen@uniovi.es>
Emmanuele Pavolini <emmanuele.pavolini@unimc.it>

› Tunjangan Pengangguran

di Era Baru Kerja Kasual

oleh **Daniel Clegg**, Universitas Edinburg, Inggris Raya

Kontrak kerja tanpa jam kerja minimum (zero-hours contracts) telah merupakan topik yang senantiasa menuai protes perburuhan di Inggris Raya. Foto oleh Christopher Thomond.

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan pendapatan bagi orang dewasa yang secara fisik masih mampu bekerja selalu menjadi pertanyaan paling kontroversial dalam kebijakan sosial. Dengan tujuannya untuk memberi perlindungan kepada mereka yang kehilangan penghasilan akibat tereksklusi dari pekerjaan berupah di luar kemauannya, tunjangan pengangguran telah lama dikritik sebagian kalangan sebagai subsidi bagi mereka yang justru dengan sukarela mengundurkan diri dari pekerjaan. Kritik semacam ini secara khusus bergaung di dalam diskursus media dan debat politik dekade ini. Kebijakan yang memperketat persyaratan penerima manfaat—seperti meningkatkan persyaratan bagi pencari kerja untuk membuktikan upaya mereka untuk kembali bekerja, disertai dengan sanksi dalam bentuk pengurangan tunjangan atau penangguhan bagi yang tidak patuh—barangkali menjadi kebijakan reformasi tunjangan pengangguran paling menonjol di negara-negara Eropa lebih dari seperempat abad terakhir ini. Langkah semacam ini dilakukan untuk menanggapi peningkatan keprihatinan publik mengenai penyalahgunaan ketentuan tunjangan pengangguran, yang secara paradoks justru memperkuat persepsi umum bahwa penyalahgunaan tersebut telah tersebar secara luas.

› Fragmentasi pekerjaan dan ketidakpastian kesempatan kerja

Namun keprihatinan yang telah berlangsung lama terhadap terjadinya penyalahgunaan tunjangan pengangguran ini, dan wacana terkait seputar tanggung jawab pencari kerja, mengabaikan tantangan utama yang dihadapi oleh kebijakan tunjangan pengangguran pada awal abad ke-21 ini. Tunjangan pengangguran [seharusnya] dikembangkan di pasar kerja di mana pekerjaan dengan kontrak (*dependent work*) semakin direorganisasi untuk memperpanjang jam kerja dan ketersediaan pekerjaan yang lebih berkelanjutan bagi pekerja

»

(pria). Penghapusan pekerjaan tidak tetap (*decasualization*) pada angkatan kerja [tidak hanya] muncul sebagai hasil dari pertumbuhan manufaktur, tetapi secara aktif juga menjadi tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan publik maupun perundingan kolektif antara pemberi kerja dan pekerja (*collective bargaining*). Sekarang, sebaliknya, ekonomi yang didominasi sektor jasa di negara-negara demokrasi yang kaya justru menyaksikan ledakan berbagai tipe hubungan kerja yang tidak standar, terutama kembalinya jenis pekerjaan jangka pendek dan tidak berkesinambungan (misalnya berdasarkan panggilan [rekrutmen]), yang seringkali berselubung sebagai pekerjaan wirausaha (*self-employment*). Teknologi baru semakin memfasilitasi fragmentasi tugas kerja, dan mempercepat kehadiran "*gig economy*" [pasar kerja yang ditandai kerja lepas dengan kontrak jangka pendek]. Pemerintah sendiri, paling tidak, enggan melawan kecenderungan ini, dan [justru] sering mempromosikannya sebagai jalan ke arah pertumbuhan, daya saing, dan peningkatan lapangan kerja. Serikat pekerja yang melemah telah terbukti relatif tak berdaya melawannya. Kita sedang tergelincir ke era baru dunia kerja kasual.

Bagi banyak orang pada waktu sekarang ini, terutama mereka yang memiliki ketrampilan rendah, pengangguran menjadi suatu bentuk "risiko sosial" yang sangat berbeda dengan [risiko] tunjangan pengangguran yang diberikan sebagai bentuk kompensasi. Pengangguran tidak lagi merupakan suatu periode yang kadang-kadang lowong di antara pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni secara stabil dan berjangka panjang, melainkan semakin menjadi suatu ciri yang berulang-ulang dalam kehidupan pekerja yang ditandai dengan urutan pekerjaan yang sedikit-banyak berjangka pendek, tidak teratur, dan dengan jangka waktu kerja yang tidak pasti. Batas antara menganggur dan bekerja telah menjadi semakin tidak jelas. Apakah seorang pekerja yang tiap bulan bekerja di minggu pertama dan terakhir, tetapi tanpa pekerjaan di antara waktu itu, akan dianggap sebagai pekerja atau penganggur dalam bulan itu? Apakah status ekonomi seorang pekerja yang memiliki dua pekerjaan paruh waktu sekaligus tetapi kemudian kehilangan salah satu pekerjaannya, akan dianggap masih memiliki pekerjaan atau telah kehilangan pekerjaan?

› Tunjangan pekerja rendahan: dibayar karena bekerja?

Tren kebijakan yang benar-benar menandai tantangan kompleks yang dihadapi dalam kebijakan tunjangan pengangguran dalam konteks pasar kerja yang baru bukanlah adanya dorongan kuat untuk memperketat persyaratan, melainkan perkembangan yang lebih sulit dan tidak merata dari tunjangan jaminan sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah (*in-work social security benefits*). Diperkenalkan dan Diperluasnya di sejumlah negara kesejahteraan di Eropa beberapa tahun terakhir ini, baik dalam bentuk persyaratan baru yang berdiri sendiri ataupun melalui modifikasi kriteria yang memenuhi syarat untuk penerima asuransi pengangguran atau tunjangan bantuan, tunjangan bagi pekerja berpenghasilan rendah ini menepis pandangan bahwa orang tidak bekerja karena mereka kurang berusaha, kurang motivasi, atau kurang bertanggungjawab. Tunjangan bagi pekerja berpenghasilan rendah diperlukan, semata-mata karena dalam pasar tenaga kerja kontemporer Eropa kesempatan yang tersedia bagi banyak pencari kerja untuk dapat dipekerjakan kembali adalah pekerjaan bergaji rendah dan kurang terjamin, dibandingkan dengan tunjangan bagi mereka tidak bekerja, meskipun perbedaan nilainya kecil.

Namun penambahan pendapatan yang sudah ada melalui sistem tunjangan sosial merupakan pendekatan kebijakan yang dilanda berbagai kesulitan tersendiri. Apabila yang ditawarkan adalah insentif yang bernilai bagi seorang penganggur untuk kembali bekerja, tunjangan bagi pekerja berpenghasilan rendah tidak hanya memberi tambahan pada penghasilan mereka, tetapi juga jaminan bahwa apabila pekerjaan mereka yang baru cepat hilang mereka tidak akan mengalami hal yang lebih buruk daripada jika mereka tidak menerima pekerjaan yang pertama. Ini membuka pintu bagi situasi di mana periode bekerja dan tidak bekerja bisa nyaris terus menerus silih berganti, yang secara potensial menginstitusionalisasi pekerjaan jangka pendek, hubungan kerja yang pendek, melalui subsidi permanen yang implisit dari sistem tunjangan. Usulan bagi penetapan suatu penghasilan dasar universal justru mengandung cacat ini. Di mana tunjangan pekerja rendahan menyasar kelompok berpendapatan rendah untuk menghemat biaya, tunjangan tersebut cenderung menghasilkan tarif pajak efektif bagi pekerja yang mencari tambahan jam kerja atau tambahan pendapatan, [sehingga] justru semakin mengunci pekerja dalam pekerjaan berupah rendah.

› Flexicurity atau menciptakan stabilitas?

Dihadapkan pada tantangan ekonomi riil ini, baru-baru ini beberapa negara di Eropa—seiring dengan reformasi asuransi pengangguran tahun 2019 di Prancis—mengumumkan pembatasan signifikan untuk tunjangan bagi pekerja penghasilan rendah, lagi-lagi dengan menekankan keyakinan mereka terutama pada persyaratan untuk mendorong para penganggur pindah ke pekerjaan yang stabil. Ketika tunjangan bagi pekerja penghasilan rendah dipertahankan, "persyaratan kerja berpenghasilan rendah" telah diterapkan pula sebagai upaya melakukan kontrol perilaku yang lebih ketat terhadap pelaku klaim tunjangan bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk mendorong kemajuan dalam pekerjaan mereka, sebagaimana ini diatur dalam sistem Kredit Universal baru di Inggris Raya. Dalam kedua kasus ini tanggung jawab atas realitas pasar kerja lapisan bawah kontemporer tampaknya diletakkan di atas pundak mereka yang kesempatan ekonominya paling dibatasi secara langsung oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

Inti nyata dari persoalan ini adalah sangat sulitnya mengadaptasi sistem transfer tunai di pusat negara kesejahteraan modern Eropa, yang memiliki logika kompensasi risiko, ke dalam konteks suatu pasar kerja yang diprediksi akan semakin tidak pasti bagi sedemikian banyak orang. "*Flexicurity*"—kebijakan ideal berupa kombinasi antara fleksibilitas pasar kerja dan jaminan sosial—adalah suatu *portmanteau* [gabungan konsep] yang rapih, tetapi hanya menawarkan sedikit acuan praktis tentang bagaimana sebuah sistem pengaturan penghasilan bisa melindungi pekerja kasual tanpa menimbulkan pembengkakan biaya, dampak yang tidak diinginkan, atau keduanya pada waktu yang sama. Perlindungan terhadap pengangguran hanya akan tetap masuk akal, jika pasar tenaga kerja Eropa mampu menciptakan suatu tingkatan stabilitas dasar bagi kehidupan pekerja. Ini membutuhkan pengaturan ketenagakerjaan yang lebih baik, bukan pengetatan kontrol terhadap perilaku pekerja yang rentan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Daniel Clegg <Daniel.Clegg@ed.ac.uk>

› Subjektifikasi Kebijakan Sosial, Polarisasi Masyarakat

oleh **Roland Atzmüller**, Universitas Johannes Kepler, Austria

Evolusi rezim kesejahteraan, khususnya di Eropa tetapi tidak hanya di sana, telah didominasi oleh suatu pergeseran dari apa yang disebut sebagai kegiatan kesejahteraan pasif yang terikat pada model pertumbuhan berdasarkan upah (*Fordism*), ke apa yang dinamakan keadaan penghematan dan dominasi kegiatan kebijakan sosial yang berorientasi pada penawaran (*supply side*). Ini telah dilaksanakan oleh berbagai proyek reformasi neoliberal nasional sejak tahun 1980-an dan 1990-an dan mengalami radikalisasi setelah 2008. Reformasi ini menuntut peningkatan tanggung jawab diri dari individu dan keluarga mereka dalam hal perlindungan sosial terhadap risiko pasar kapitalis. Privatisasi perlindungan sosial (pensiun, kesehatan) di banyak negara merupakan paradigma dari perkembangan ini dan mengarah pada peningkatan ketidakamanan dan ketidaksetaraan.

Namun [proses] pertanggungjawaban atas diri-sendiri (*self-responsibilization*) oleh individu-individu ini terkait erat dengan kegiatan yang bertujuan untuk menyesuaikan secara permanen subjektivitas mereka (sikap terhadap pekerjaan, keterampilan, dan kompetensi) dengan perubahan dinamika pasar dan krisis sosial. Kebijakan-kebijakan sosial individualisasi dan subjektifikasi tersebut terutama diarahkan untuk mengamankan, melipatgandakan, dan melenturkan pertukaran pilihan antara kekuatan tenaga kerja dan modal melalui mobilisasi semua orang dewasa yang berjiwa-raga sehat. Hal ini mencakup kegiatan seperti perluasan pengasuhan anak maupun peningkatan (permanen) dari kelayakan kerja individu dalam perekonomian formal. Mengingat artikulasinya dengan penghematan, pergeseran ke kebijakan sosial yang berorientasi pada modal manusia berlangsung dengan mengorbankan tuntutan lebih luas terhadap perlindungan dan perawatan sosial yang bertujuan memastikan kohesi sosial dan integrasi kelompok sosial yang rentan. Hal ini telah menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan eksklusi sosial di banyak negara karena kelompok-kelompok seperti orang usia lanjut, orang dengan disabilitas, dan orang yang mengidap penyakit kronis semakin dipandang sebagai faktor biaya non-produktif.

Perubahan-perubahan ini telah menyebabkan meningkatnya arti penting apa yang dinamakan layanan kesejahteraan, yang tugas utamanya adalah pengolahan orang secara kontroversial melalui penggabungan kontradiktif antara pekerjaan sosial dan pedagogi sosial dengan kebijakan pasar tenaga kerja secara aktif, pendidikan dan pelatihan vokasi (VET), dll. Kegiatan pelayanan kesejahteraan semakin dikontrakkan ke organisasi sektor sukarela atau bahkan ditransfer ke sektor swasta dan dikontrol secara ketat melalui rezim pendanaan baru (upah berdasarkan keluaran [produksi], upah berdasarkan kinerja, kontrak jangka pendek, dsb.). Perkembangan-perkembangan ini tidak hanya menundukkan para penerima layanan kesejahteraan pada kegiatan-kegiatan yang semakin dirinci dan sulit ditolak yang menjanjikan untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatur diri sesuai dengan tuntutan pasar. Perkembangan-perkembangan tersebut juga menciptakan ketegangan dan tuntutan baru bagi karyawan dalam pelayanan kesejahteraan karena mengharuskan adanya keseimbangan antara kelangkaan dana yang terkait dengan penghematan, tuntutan profesional terhadap kualitas pekerjaan mereka, dan harapan serta perlawanan para klien.

Hal ini menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi penelitian kritis karena individualisasi dan subjektifikasi rezim kesejahteraan dan kebijakan sosial melampaui fokus pada komodifikasi/dekomodifikasi dalam rezim kesejahteraan. Analisis-analisis ini berfokus pada cara-cara berbeda yang ditempuh rezim kesejahteraan untuk melindungi para pekerja, setidak-tidaknya untuk sebagian, dari dampak sosial negatif sebagai akibat akumulasi dan pasar tenaga kerja kapitalis (dekomodifikasi) serta stabilisasi bentuk-bentuk keluarga tradisional berdasarkan pencari nafkah pria, atau memungkinkan perempuan untuk mendapatkan hak-hak sosial dengan upaya sendiri dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar. Sepenuhnya sadar akan adanya kerancuan dalam kebijakan sosial di masyarakat pasar kapitalis, analisis-analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana apa yang disebut Keynes sebagai negara kesejahteraan mendukung perkembangan model-model pertumbuhan ekonomi dan konsumsi di Utara Global dari

»

“Mengingat artikulasinya dengan penghematan, pergeseran ke kebijakan sosial yang berorientasi pada modal manusia berlangsung dengan mengorbankan tuntutan lebih luas terhadap perlindungan dan perawatan sosial”

1945 sampai 2008. Dari sudut pandang ini, reformasi kesejahteraan neoliberal dapat digambarkan sebagai strategi untuk rekomodifikasi tenaga kerja melalui pelenturan dan liberalisasi pasar tenaga kerja serta rezim kesejahteraan dan untuk marketisasi perlindungan sosial.

Meskipun pergeseran ke kebijakan sosial yang berorientasi pada penghematan dan sisi penawaran menunjukkan betapa jauh kebijakan-kebijakan tersebut telah tunduk pada dinamika ekonomi, namun di sebagian besar negara upaya neoliberal untuk menghemat rezim kesejahteraan dan memotong pengeluaran sosial selama lebih dari tiga dekade tidak benar-benar berhasil dalam menurunkan keseluruhan tingkat pengeluaran. Namun, hal ini sama sekali tidak mengungkapkan apakah hak-hak individu atas transfer dan layanan sosial cukup memadai. Sebaliknya, reorganisasi berdampak besar dan konfigurasi ulang dari rezim kebijakan sosial tengah berlangsung yang bertujuan mengubah hak-hak dan kewajiban maupun sikap dan kegiatan yang diharapkan dari individu dan keluarga mereka mengenai pekerjaan yang berbayar, pengasuhan anak, VET, gaya hidup yang produktif dan sehat, norma budaya, dst. Setidaknya dari perspektif Eropa, individualisasi dan subjektifikasi kegiatan kebijakan sosial yang dijabarkan mengakibatkan–meskipun secara nasional pasti bervariasi–polarisasi yang terfragmentasi di dalam, maupun di antara rezim-rezim kesejahteraan sebagai akibat ketidakseimbangan ekonomi internasional dan krisis akumulasi finansial, maupun strategi yang didominasi penghematan untuk mengatasi krisis gagal bayar utang negara (*souvereign debt crises*) berikutnya.

Polarisasi terfragmentasi di dalam dan di antara rezim-rezim kesejahteraan bergerak antara kebijakan-kebijakan aktivasi yang berorientasi pada tunjangan kerja (*workfare*) bagi mereka yang berada di ujung bawah pasar tenaga kerja di satu sisi, dan apa yang dinamakan strategi investasi sosial, di sisi lain. Tunjangan kerja berfokus pada kegiatan untuk mengintegrasikan para penganggur dan orang miskin yang mampu bekerja, maupun orang lain yang secara ekonomi tidak aktif tanpa mempunyai alasan yang sah bagi ketiadaan partisipasinya (misalnya keibuan), ke dalam pasar tenaga kerja dengan cara apa pun. Di sisi lain, meningkatnya arti penting apa yang disebut strategi investasi sosial bertujuan pengabsahan kembali peran kebijakan publik melalui penegakan yang disebut pengeluaran produktif dan kegiatan yang meningkatkan dinamika dan daya saing ekonomi. Kegiatan investasi sosial difokuskan pada adaptasi permanen dan penataan ulang keterampilan dan kompetensi–yaitu modal manusia–dari individu-individu, maupun perluasan fasilitas penitipan anak. Namun perluasan penitipan anak tersebut tidak terlalu bertujuan untuk mengubah pembagian kerja gender dalam rumah tangga, melainkan lebih untuk memobilisasi perempuan untuk pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, alih-alih mengubah struktur ekonomi untuk mengatasi dampak yang merusak dan rawan krisis dari akumulasi dan marketisasi, kebijakan-kebijakan ini difokuskan pada penundukan dan adaptasi orang-orang pada tuntutan globalisasi kompetisi dan pasar-pasar yang semakin lentur dan rawan. Perkembangan ini merupakan suatu bentuk manajemen krisis yang disubjektifkan, yang menuntut dari individu-individu kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka maupun karakteristik subjektif lainnya yang dianggap perlu untuk pasar yang lentur dan terglobalisasi. Dengan demikian, keharusan untuk mengatasi efek destruktif dari krisis ekonomi finansial dan perubahan struktural digeser ke individu dan mempersempit kemungkinan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya, sebagai semacam kebijakan sosial pasca-Polanyi perkembangan ini mentransfer tugas untuk secara sosial melekatkan perekonomian dan menanggulangi dampaknya terhadap masyarakat ke individu. Hal ini mengikis kohesi dan integrasi sosial, sehingga merupakan ancaman tidak hanya bagi masyarakat nasional tetapi juga bagi Uni Eropa secara keseluruhan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Roland Atzmüller
<roland.atzmueller@jku.at>

› Dukungan untuk Kebijakan Keluarga di Eropa Selatan

oleh **Sigita Doblytė**, anggota Komite Penelitian ISA mengenai Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan Sosial (RC19) dan **Aroa Tejero**, Universitas Oviedo, Spanyol

Pengaruh nilai budaya terhadap dukungan publik bagi kebijakan keluarga yang lebih baik berbeda-beda di antara negara-negara kesejahteraan di Eropa Selatan.

Salah satu tantangan yang dihadapi individu dan negara kesejahteraan saat ini adalah perlunya lintasan (*trajectories*) kerja dan kehidupan yang lebih seimbang. Ketika negara-negara kesejahteraan berusaha mendorong partisipasi kerja perempuan sebagai sebuah strategi perlindungan melawan kemiskinan, rumah tangga mengalami kesulitan dalam menggabungkan tanggung jawab perawatan dan pekerjaan. Penyediaan perawatan anak dapat diserahkan ke pasar–meskipun menciptakan beban keuangan bagi orang tua –atau kepada layanan perawatan anak yang dibiayai negara dan/atau disediakan oleh negara yang mungkin dianggap lebih adil dan selaras dengan logika investasi sosial.

› Nilai-nilai budaya dan penyediaan perawatan

Namun negara-negara kesejahteraan di Eropa berbeda dalam hal ruang lingkup kebijakan mengenai rekonsiliasi pekerjaan-keluarga ini. Masyarakat Eropa Selatan, secara khusus, seringkali dicirikan dengan dominasi nilai-nilai budaya konservatif dan peran sentral yang dimainkan oleh keluarga dalam penyediaan perawatan. Negara-negara ini membelanjakan jauh lebih sedikit dana untuk tunjangan keluarga daripada negara-negara Nordic atau Eropa Kontinental dan tampaknya menempatkan prioritas rendah pada kebijakan keluarga daripada kebijakan perlindungan sosial lainnya. Ketika diukur dengan persentase dari seluruh pengeluaran tunjangan, pengeluaran publik untuk tunjangan keluarga di seluruh negara-negara tersebut lebih rendah daripada rata-rata pengeluaran negara Uni Eropa, dengan proporsi di Yunani, Portugal, dan Spanyol berada pada peringkat lima terendah di Eropa pada tahun 2016. Meskipun demikian, Survei Sosial Eropa pada tahun yang sama menunjukkan bahwa negara-negara kesejahteraan di wilayah Mediterania yang disurvei–Italia, Portugal, dan Spanyol–merupakan negara-negara yang paling mendukung perluasan kebijakan rekonsiliasi pekerjaan-keluarga

»

meskipun hal itu berarti pajak yang lebih tinggi untuk semua, yaitu bahkan ketika individu diingatkan bahwa tambahan layanan publik menyiratkan adanya pembiayaan tambahan.

Studi-studi empiris yang beragam menemukan bahwa sikap publik terhadap kebijakan-kebijakan sosial seringkali dibentuk oleh kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan diri kelompok-kelompok sosial. Sebagai contoh, keluarga yang memiliki anak kecil atau kelompok usia yang berpotensi menjadi orang tua mungkin memperlihatkan dukungan lebih besar bagi layanan lebih baik keluarga. Namun beberapa studi juga menekankan pentingnya nilai budaya sebagai pendorong perilaku terhadap negara kesejahteraan dan kebijakan-kebijakannya. Dalam artikelnya yang berjudul "*Welfare state policies and the development of care arrangements*" (2005), Dr. Birgit Pfau-Effinger, profesor sosiologi pada Universitas Hamburg, berargumen bahwa pemikiran budaya mengenai perawatan dan tanggung jawab negara, keluarga, dan pasar melekat pada wacana publik dan membentuk pengaturan dan kebijakan mengenai perawatan dalam sebuah negara.

› Perbedaan antara negara-negara Eropa Selatan

Oleh karena itu, penelitian kami justru bertujuan untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh kebutuhan dan nilai-nilai budaya dalam membentuk keinginan publik untuk membayar pajak lebih tinggi untuk layanan keluarga yang lebih baik di masyarakat Eropa Selatan, di mana penyediaan perawatan secara tradisional diberikan oleh keluarga tetapi terjadi peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja yang mungkin membutuhkan partisipasi aktor lain. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Eropa, kami menyoroti adanya kebutuhan perawatan yang tidak terpenuhi di Eropa Selatan, yang dibuktikan dengan tingginya tingkat dukungan untuk layanan keluarga yang lebih baik. Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan pola yang beragam tentang bagaimana kepentingan diri dan nilai budaya mempengaruhi sikap ini di antara negara-negara yang berbeda. Walaupun negara-negara kesejahteraan Eropa Selatan seringkali dianggap memiliki kemiripan dalam hal peran nilai-nilai gender dan keluarga tradisional, temuan penelitian kami membuktikan adanya perbedaan-perbedaan penting di antara mereka. Kami percaya bahwa terdapat ruang lebih besar untuk memperluas layanan bagi keluarga di beberapa negara ini daripada di negara lain.'

Di Portugal, sangat tinggi dan normalnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja secara umum, dan ibu-ibu pada khususnya, menghasilkan tingkat yang tinggi dan konsisten terhadap solidaritas pada dukungan kesejahteraan di antara perempuan dan laki-laki dari kelas sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini disertai dengan tidak adanya pengaruh signifikan dari nilai-nilai budaya yang berbeda-beda dan lebih tingginya solidaritas di antara generasi yang lebih tua. Semuanya itu tampaknya mengindikasikan adanya ruang bagi kebijakan yang lebih murah hati bagi keluarga di negara ini.

Namun di Italia dukungan bagi layanan yang lebih baik bagi keluarga berbeda antar kelompok-kelompok sosial. Kelas sosial yang secara ekonomi kurang beruntung dan lebih rendah secara signifikan kurang mendukung kebijakan-kebijakan keluarga, yang mungkin dibentuk oleh relatif tingginya beban pajak di Italia. Dampak nyata dari nilai-nilai budaya juga ditemukan, walaupun arahnya tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang diharapkan: baik individu-individu yang menempatkan prioritas lebih tinggi pada tradisi dan konformitas maupun mereka yang menganut nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan, atau kesejahteraan bagi semua kurang menunjukkan dukungan bagi perluasan kebijakan rekonsiliasi pekerjaan-keluarga.

Akibat yang tidak terduga dari nilai-nilai yang a priori sejajar dengan logika negara kesejahteraan mungkin terkait dengan beban pajak di Italia, di mana perkembangan selanjutnya dapat mengancam penghasilan keluarga dan, oleh karena itu, melawan nilai-nilai yang telah disebutkan. Dengan kata lain, keluarga mungkin masih dilihat sebagai institusi perawatan yang paling memadai di Italia, dan penerimaan keadilan sosial atau kesetaraan mungkin menghasilkan dukungan untuk kebijakan perlindungan penghasilan daripada layanan publik tentang perawatan anak. Memang, penelitian tentang Nilai-nilai Eropa pada tahun 2017 menunjukkan adanya dominasi nilai-nilai keluarga tradisional di Italia: 52% setuju atau sangat setuju bahwa anak-anak menderita jika ibu mereka bekerja, dibandingkan dengan 26% di Spanyol.

Seperti yang dikatakan terakhir, Spanyol tampaknya telah berpindah secara lebih jelas dari budaya gender dan keluarga yang tradisional daripada Italia: individu yang memegang nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan lebih bersedia membayar pajak lebih tinggi untuk layanan keluarga yang lebih baik, tetapi tradisi dan konformitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dukungan kesejahteraan. Lebih lanjut, dukungan yang lebih tinggi dari orang tua yang memiliki anak kecil dan dukungan lebih rendah orang tua dengan anak usia di bawah tiga tahun yang dalam perawatan anak-anak secara formal memperlihatkan tidak terpenuhinya kebutuhan perawatan dalam keluarga dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya, sedangkan individu yang berjuang secara ekonomi atau mereka yang tinggal di kota besar cenderung memperlihatkan tingkat solidaritas yang lebih rendah.

Sebagai kesimpulan, meskipun hasil di Portugal mengisyaratkan bahwa keluarga mungkin menjadi relatif kuat dan tuntutan mereka untuk layanan yang lebih baik mungkin bisa berhasil, hal ini belum tentu terjadi dalam kasus Spanyol, dan, pada khususnya, Italia. Meskipun demikian, institusi sosial lain seperti para majikan mulai memainkan peran yang lebih substansial dalam menyediakan perawatan anak atau pengaturan kerja yang lebih fleksibel, yang masih terbatas, walaupun di Eropa Selatan menjadi semakin penting. Tetapi kesenjangan dalam memperoleh akses ke dukungan ini mengancam prinsip investasi sosial. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Sigita Doblytė <doblytesigita@uniovi.es>
Aroa Tejero <tejeroaroa@uniovi.es>

› Menjadi Sukarelawan di Jerman:

Beramal atau Ekonomi Bayang-bayang?

oleh **Silke van Dyk** dan **Tine Haubner**, Universitas Friedrich-Schiller di Jena, Jerman

Pelayanan sosial yang dibutuhkan terlalu sering didelegasikan kepada para sukarelawan. Kredit: Matthias Zomer/pexels.com.

Kita kini tengah mengalami krisis perawatan dan reproduksi sosial yang disebabkan oleh dilucutinya negara kesejahteraan, kebutuhan baru karena perubahan demografis, serta perubahan dalam hubungan gender dan keluarga. Seiring dengan semakin kurang tersedianya jumlah wanita yang dapat menjadi sumber daya penuh waktu untuk kebijakan sosial, potensi kerja perawatan tak berbayar–juga dan secara khusus di luar ranah keluarga–menjadi kian penting dan kian didukung negara. Warga negara semakin sering dihimbau untuk membuat komitmen bagi kebaikan bersama. Keterlibatan warga (*civic engagement*) serta kerja sukarela diperlakukan sebagai sumber daya (re-)produktif baru dan sukarelawan dielu-elukan sebagai pahlawan kehidupan sehari-hari.

Berlatar belakang situasi ini, kami melakukan sebuah proyek penelitian empiris di Jerman Timur dan Barat guna mengetahui bagaimana kerja sukarela digunakan serta dieksploitasi oleh negara untuk keperluan tersedianya pelayanan serta perawatan. Kami juga tertarik pada cara konstelasi ini dialami, ditafsirkan, dan dibentuk baik oleh insan yang terlibat itu sendiri maupun penerima bantuan mereka. Walaupun sudah tersedia banyak kajian yang umumnya mengafirmasi berbagai jenis keterlibatan dan amal, namun sebuah telaah ekonomi politik terhadap kerja sukarela, yang secara sistematis mengungkap dan merefleksikan secara kritis implikasi politik, sosial, serta ekonomi terhadap praktik ini belum dikembangkan. Kami menggunakan istilah "ekonomi bayang-bayang" untuk

»

menggambarkan konteks ini, karena kita berhadapan dengan wilayah kerja informal yang merepresentasikan faktor kesejahteraan dan berkontribusi bagi penciptaan nilai (melalui jam kerja tak berbayar)–di luar pekerjaan reguler yang dilindungi asuransi sosial. Oleh sebab itu, kami ingin tahu secara konkret sejauh mana promosi, kebutuhan, serta penggunaan kerja sukarela oleh negara sebagai kendaraan untuk proses substitusi, informalisasi, serta deprofesionalisasi pekerjaan reguler.

Di sini, *substitusi* terkadang berarti aktivitas yang sebelumnya merupakan pekerjaan reguler bergeser ke konteks pekerjaan sukarela. Ada sejumlah contoh dari hal ini dalam kajian kami, semisal dalam konteks pengasuhan penuh waktu di sekolah di kala "pendamping remaja" secara sukarela mengisi kekurangan guru di sekolah atau sukarelawan pembantu keluarga menggantikan dukungan negara bagi keluarga. Kami juga menemukan contoh mengenai munculnya kebutuhan perawatan baru yang tidak dipenuhi oleh ekspansi lapangan kerja reguler, tetapi dengan menciptakan bidang serta bentuk keterlibatan baru – contohnya, dalam perawatan para usia lanjut. Selain bentuk substitusi langsung dari pekerjaan reguler atau dicegahnya ekspansi pekerjaan reguler, kajian kami memperlihatkan dampak lebih jauh dari substitusi, seperti penurunan perawatan keluarga dan ketiadaan pekerja terampil (misalnya di bidang keperawatan, kerajinan, atau penasihat hukum) juga dikompensasi oleh sukarelawan.

Sementara kerja sukarela serta keterlibatan warga lazimnya sangat dipuji di seluruh negeri, kami mengamati suatu tren deprofesionalisasi akibat perkembangan ini. Orang awam yang kurang terlatih mengambil alih pekerjaan profesional di bidang pendidikan, bantuan terhadap keluarga, perawatan para usia lanjut, kelas bahasa Jerman untuk pengungsi, atau bantuan hukum. Pelayanan non-profesional ini terutama ditujukan kepada mereka yang kekurangan sumber daya untuk mengisi kekosongan pada bantuan negara atau membeli pelayanan profesional swasta untuk kebutuhan baru. Karenanya, penggunaan dan eksploitasi kerja sukarela oleh negara kesejahteraan tidak mempengaruhi semua warga secara merata: sebaliknya, orang dapat mengamati munculnya "pelayanan yang buruk untuk orang miskin" yang tak mampu membeli bantuan profesional.

Kendati demikian, bukan hanya kualitas dari pelayanan yang diberikan yang dapat bermasalah, melainkan juga kondisi para sukarelawan, yang dalam bidang tertentu menjadi karyawan semu – tanpa hak sosial terkait. Khususnya di bidang di mana sukarelawan diharapkan dapat diandalkan, tenang, serta berpengalaman – misal, perawatan para usia lanjut, bekerja dengan kaum disabilitas, atau perawatan di sekolah penuh waktu – "kontrak sukarela" dan tunjangan pengeluaran di luar biaya pengganti-an pengeluaran memainkan peranan yang kian penting. Tunjangan ini biasanya jauh di bawah upah minimum, sedangkan pada saat yang sama standar kerja dan perundingan pemberi kerja-pekerja diabaikan. Dengan cara ini, keterlibatan yang sangat dipuji juga berkontribusi kepada prekaritisasi dan informalisasi kerja, setidaknya di beberapa bidang-bidang pelayanan sosial umum.

Di Jerman Timur pada khususnya, keterlibatan warga dan kerja sukarela terpaut dekat dengan pasar kerja, dalam arti bahwa mereka acap dilakukan oleh para pengangguran yang berharap dapat kembali ke pasar kerja. Dalam wawancara dengan sukarelawan serta pakar, kami juga mendapati pernyataan yang membingkai keterlibatan sebagai substitusi simbolik untuk kerja berbayar. Hasil penting lain dari penelitian empiris kami ialah pusat-pusat kerja, yang terkadang mengirimkan orang-orang yang sudah menganggur lama untuk melakukan kerja bakti warga. Selain itu, ada perbedaan menarik antara negara-negara bagian baru (Jerman Timur) dan lama (Jerman Barat): selagi monetisasi kerja sukarela dipandang kritis di Jerman Barat lantaran–dalam pandangan yang banyak dianut–melukai watak dan kemurnian kerja sukarela, situasinya berbeda di Jerman Timur: kompensasi finansial untuk keterlibatan dianggap tidak bermasalah dan sah dalam artian upah yang adil untuk kerja harian. Di sini, warisan dari ciri kuat pekerjaan di Republik Demokrasi Jerman menjadi kentara, di mana terdapat kerja sukarela yang diarahkan oleh negara maupun bantuan serta solidaritas lingkungan sekitar, tetapi tidak ada konsep serta praktik keterlibatan warga yang khas.

Penelitian kami berfokus pada berbagai bidang keterlibatan dan kerja sukarela: bantuan pengungsi dan lingkungan sekitar, perawatan para usia lanjut, keterlibatan di sekolah, brigade pemadam kebakaran sukarela, keterlibatan dalam pelayanan rumah multi-generasi dan pelayanan transportasi lokal, sekadar beberapa contoh bidang yang paling berarti. Di semua bidang terdapat perkembangan yang bermasalah maupun yang sama sekali tidak bermasalah. Untuk perkembangan yang bermasalah, kami mendapati sebuah era baru dari reproduksi sosial yang kami sebut "kapitalisme komunitas," di mana komunitas sosial di luar keluarga kian dimanfaatkan sebagai sumber daya baru untuk mengatasi krisis reproduktif. Namun pandangan kritis kami terhadap penggunaan kerja sukarela oleh negara tidak berarti bahwa negara harus mengambil alih semua kerja (sosial) tanpa terkecuali. Dalam hal bergesernya pelayanan dan infrastruktur publik ke bidang kerja sukarela, kritik kami tertuju pada bidang-bidang di mana kesempatan fundamental dalam hidup digantungkan pada bantuan sukarela ketimbang hak sosial yang terjamin. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Silke van Dyk <silke.vandyk@uni-jena.de>
Tine Haubner <tine.haubner@uni-jena.de>

› Akankah Uni Eropa Mempertahankan Pilar Sosialnya?

oleh **Beatrice Carella**, Scuola Normale Superiore, Florence, Italia

Pilar Hak-hak Sosial Eropa yang ditandatangani pada bulan November 2017 mewakili inisiatif sosial utama Komisi Eropa. Kredit: European Commission website.

Pada tanggal 17 November 2017, para presiden Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa bersama-sama menandatangani deklarasi politik Pilar Hak-hak Sosial Eropa (European Pillar of Social Rights/EPSR) yang mengabadikan prinsip-prinsip sosial yang dianut dan dipupuk oleh Uni Eropa (EU). Penandatanganan tersebut mewakili inisiatif sosial utama dari Komisi yang dipimpin oleh Jean-Claude Juncker, untuk membawa isu 'Eropa Sosial' kembali ke dalam perdebatan seputar masa depan integrasi Eropa. Sejak pengangkatannya pada tahun 2014, Presiden Juncker telah menempatkan masalah dimensi sosial Eropa dalam wacana yang berbeda dari masa lalu: di saat sisi produktif negara kesejahteraan dan kebijakan sosial masih dititikberatkan, Komisi yang baru ini secara terbuka menyatakan adanya kebutuhan untuk memikirkan kembali masa depan dalam konteks implikasi sosial yang dimunculkannya–yang tak saja berhubungan dengan ekonomi dan pasar tenaga kerja, tetapi juga dengan kesetaraan sosial, keadilan, dan inklusi.

› Proses perumusan yang panjang dan dipermasalahkan

Dalam rangka narasi yang telah diperbaiki tersebut dan disertai dengan kesediaan untuk memutuskan mata rantai pola-pola kebijakan sebelumnya (pada saat dampak kebijakan penghematan mulai sepenuhnya terungkap), prakarsa Pilar dipresentasikan oleh Junker dalam Pidato Kenegaraan (*State of the Union Address)* pada September 2015. Pengumuman tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah fase perumusan agenda yang memakan waktu dua tahun: pada bulan Maret 2016, Komisi menerbitkan suatu garis besar pendahuluan dari dokumen tersebut dan kemudian membuka proses konsultasi publik yang sangat panjang dan mendalam

»

yang berlangsung hingga akhir tahun. Kekhasan konsultasi tersebut telah menunjukkan suatu upaya untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar dan lebih mengakar (*bottom-up*) dari beragam pemangku kepentingan dalam perumusan teks; makalah akademik dan beragam laporan, baik dari dengar pendapat maupun debat yang diselenggarakan oleh Komisi, dapat pula diakses publik sehingga kami dapat menyelidiki bagaimana beragam preferensi dapat pada akhirnya tercermin pada dokumen akhir. Ini adalah kunci untuk memahami kemungkinan perkembangan inisiatif di masa depan.

Analisis terhadap capaian konsultasi publik menunjukkan adanya variabilitas yang tinggi dalam tuntutan yang diajukan oleh berbagai peserta dalam proses perumusan. Kami lebih sering menemukan pemilahan dalam dua kelompok aktor utama. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil, konfederasi serikat pekerja, dan Parlemen Eropa menekankan adanya kebutuhan untuk menjamin suatu "landasan perlindungan sosial" untuk menjamin hak-hak warga negara dan pekerja bila terjadi guncangan ekonomi dan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara fleksibilitas dan keamanan di pasar tenaga kerja, selain menyerukan berbagai instrumen kebijakan untuk mengimplementasikan Pilar, termasuk merumuskan undang-undang baru untuk Uni Eropa serta pendanaan supranasional. Di sisi lain, terdapat pemberi kerja dan asosiasi bisnis, bersama-sama dengan beberapa negara anggota, yang memiliki keprihatinan terhadap masalah inklusi sosial dan perlindungan secara umum (tanpa hubungan langsung dengan fungsi pasar tenaga kerja) dan sangat menentang adopsi undang-undang baru atau mekanisme pendanaan di bidang sosial. Kelompok aktor kebijakan ini mempromosikan integrasi yang lebih lanjut secara eksklusif melalui alat koordinasi kebijakan "lunak", disertai dengan prinsip subsideritas.

› Tindakan penyeimbangan bernilai simbolik

Dengan melihat versi final dokumen, kami dapat melihat bahwa Komisi telah berhasil menyeimbangkan pandangan yang berbeda tersebut sebagai berikut: pada tingkat diskursif, lembaga-lembaga Uni Eropa menunjukkan narasi yang berubah di sekitar dimensi sosial dengan meninggalkan tidak saja posisi yang berorientasi pada penghematan tetapi juga gagasan "investasi sosial" (seperti dalam Paket Investasi Sosial 2013), untuk beralih ke ranah perlindungan hak dan mempertimbangkan inklusi sosial dan kesetaraan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, sehingga mengikuti mengikuti garis yang disarankan oleh organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja. Namun, instrumen yang diusulkan untuk mempraktikkan Pilar, Komisi rupanya juga merangkul posisi yang dianjurkan oleh sektor bisnis dan beberapa negara anggota dengan hanya mengandalkan langkah-langkah koordinasi dan pemantauan yang tidak mengikat. Sementara produk akhir umumnya dipahami dengan baik oleh beragamnya pelaku kebijakan, hasil dari inisiatif EPSR adalah dokumen deklarasi politik yang memuat sejumlah prinsip dan aspirasi yang diakui oleh tiga lembaga utama Uni Eropa. Satu-satunya inovasi kebijakan adalah serangkaian indikator sosial baru (Papan Skor Sosial) yang akan diintegrasikan secara longgar dalam arsitektur koordinasi makroekonomi secara keseluruhan. Sejauh ini, nilai tambah Pilar terletak dalam sifat simbolisnya; terwujudnya potensi yang melekat untuk memicu perubahan pada dimensi sosial Uni Eropa tergantung pada kemauan politik para aktor yang akan terlibat dalam implementasinya.

Hasil pemilihan Parlemen Eropa (PE) dan pengangkatan Dewan Komisaris yang baru pada tahun 2019 memberikan gambaran yang tak terlalu menjanjikan dalam hal ini. Di tingkat Uni Eropa, tampaknya birokrat dan kelompok politik mengakui pentingnya menangani masalah sosial dari perspektif supranasional. Dalam manifesto mereka untuk pemilihan EP, semua partai Eropa menganggap ranah sosial sebagai isu yang relevan atau bahkan lebih penting daripada tahun 2014, terutama Partai Sosialis Eropa, Partai Hijau (kedua partai ini juga secara langsung menyebutkan Pilar) dan Aliansi Kebebasan Eropa. Selain itu, Presiden Komisi yang baru diangkat, Ursula von der Leyen, membuat referensi eksplisit ke Pilar dalam pidato pengantar dan pedoman politiknya dan menyebutkan dianutnya suatu "rencana aksi" untuk pengimplementasian EPSR. Namun, peran masing-masing negara anggota akan menjadi sangat penting dalam tindak lanjut Pilar seperti tertera dalam perumusan dan rencana adopsi, dan oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan juga perkembangan di tingkat nasional.

› Peran Negara Anggota: Kasus Italia

Menjelang pemilihan Parlemen Eropa di Italia, isu EPSR tidak hadir dalam manifesto dan diskusi publik, dan para pihak yang mendukung penguatan dimensi sosial Uni Eropa (seperti +Europa/ALDE, Europa Verde/Greens, dan la Sinistra/GUE/NGL) menderita kekalahan dalam pemilihan umum. Ini adalah juga partai-partai yang sebetulnya telah membingkai program-program mereka secara erat dengan kelompok partai Uni Eropa mereka dan dalam kampanye pemilihan umum, mereka membahas isu-isu yang relevan baik di tingkat nasional maupun supranasional. Meskipun pemilihan Parlemen Eropa terakhir hampir tak menunjukkan "ke-Eropaan" melainkan lebih dipengaruhi oleh agenda politik dalam negeri, bukan hanya di Italia tetapi di semua negara anggota, kasus Italia mungkin bukan yang paling representatif bila kita melihat hasil akhir pemilihan umum. Faktanya, dengan sikap integrasi pro-UE, baik ALDE maupun Partai Hijau/EFA dengan sikap pro-integrasi Uni Eropa mereka berhasil mendapatkan kursi baru di Strasbourg, sehingga berpotensi mengimbangi suara untuk partai nasionalis dan Eurosceptil. Namun, dalam suatu bidang seperti kebijakan sosial, di mana peran negara anggota, masih menonjol, fragmentasi tinggi di bidang politik yang muncul dari Parlemen Eropa menjadikan masa depan dimensi sosial Uni Eropa semakin tidak pasti. Pada saat yang sama, hal ini dapat menciptakan suatu kesempatan bagi para aktor supranasional, khususnya Komisi yang baru, untuk mendorong integrasi yang lebih kuat di bidang sosial, yang dibangun di atas landasan–Pilar –yang dibuat oleh para pendahulu mereka. ■

Seluruh korespondensi ditujukann kepada Beatrice Carella
<beatrice.carella@sns.it>

› Kecerdasan buatan merupakan kecerdasan siapa?

oleh **Paola Tubaro**, Centre National de la Recherche Scientifique, Université Paris-Saclay, Prancis

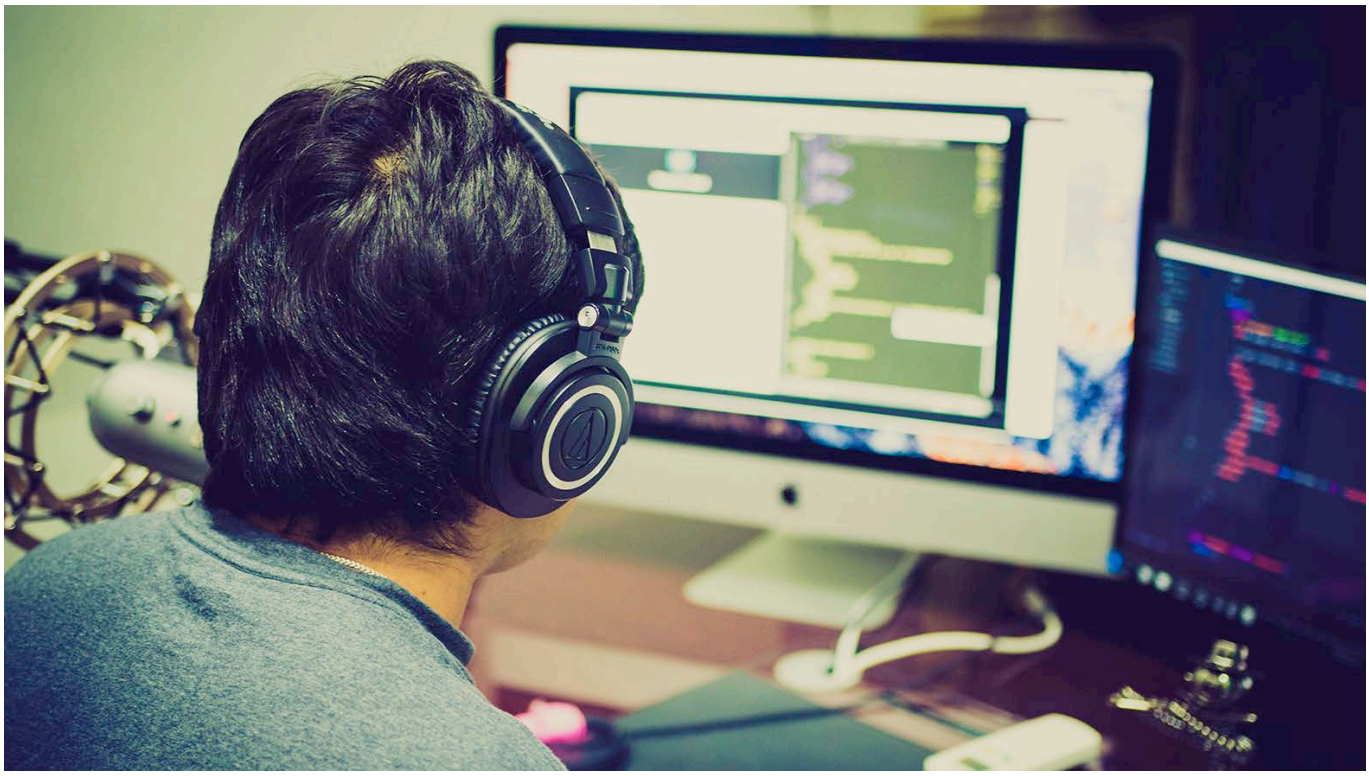

Hanya dengan manusia yang nyatalah kecerdasan buatan menjadi 'cerdas.' Kredit: Hitesh ChHdhary/pexels.com.

Keberhasilan luar biasa dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI) saat ini bertumpu pada "pekerjaan mikro" dari banyak pria dan wanita nyata. Mereka menandai objek dalam gambar, menyalin tanda terima komersial, menerjemahkan sekelumit teks, dan merekam suara mereka sambil membaca dengan keras kalimat-kalimat pendek. Sederhana dan berulang-ulang, tugas-tugas ini umumnya membutuhkan kualifikasi yang rendah dan dibayar tidak lebih dari beberapa sen. Pekerja, yang bukan karyawan formal melainkan sub-kontraktor yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, melaksanakannya dari jarak jauh dengan *smartphone* atau laptop mereka melalui laman khusus.

Bagaimana tentara pekerja bayangan ini mendukung AI? Ambil contoh asisten vokal yang bertenaga teknologi AI, seperti Alexa atau Siri. Sebelum mereka dapat mengenali permintaan pengguna, asisten vokal harus dihadapkan pada banyak contoh ucapan manusia, seperti misalnya orang yang bertanya tentang cuaca. Mesin akan "belajar" bahwa semuanya berarti sama meskipun ada perbedaan nada suara dan intonasi, aksen regional, atau adanya suara latar belakang, dan nantinya akan dapat mengenali permintaan serupa oleh pengguna baru. Oleh karena itu, pekerja mikro diperlukan untuk menghasilkan contoh-contoh tersebut, merekam suara mereka sambil bertanya mengenai cuaca. Produsen AI juga mengandalkan pekerja mikro untuk menguji asisten "pintar" mereka dan memeriksa apakah mereka berfungsi sesuai dengan rencana.

Amazon mempopulerkan pekerjaan mikro pada awal 2000-an dengan "*Mechanical Turk*" mereka. Awalnya sebuah layanan internal di mana karyawannya bertugas untuk membersihkan

»

daftar produk, Amazon malah membukanya untuk klien luar yang memungkinkan mereka mengunggah HIT (Tugas Kecerdasan Manusia) untuk dikerjakan oleh pekerja mikro dari luar. Amazon dengan tepat menyebut perangkatnya sebagai "kecerdasan buatan tiruan" (*artificial artificial intelligence*) untuk menekankan bahwa yang terbaik adalah melakukan alih daya (*outsourcing*) kepada manusia karena mereka dapat melakukan tugas lebih efisien daripada komputer. Saat ini, lebih banyak laman dan aplikasi yang mengikuti contoh Amazon dan mengusulkan varian-varian: misalnya Appen Australia, Clickworker Jerman, American Lionbridge dan Microworkers, untuk menyebutkan beberapa.

Di manakah para pekerja mikro yang membuat semua ini terjadi? Karena beberapa tugas dapat dilakukan secara daring (*online*) dan tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat tertentu (misalnya, mengidentifikasi tomat dalam gambar slada), beberapa pekerja tinggal di negara-negara di mana biaya tenaga kerja bertarif rendah. Dalam hal ini, geografi kerja mikro menghidupkan kembali pola alih daya yang terkenal. Namun, tugas lain membutuhkan pengetahuan atau keterampilan lokal, dan tidak dapat dilakukan di luar negeri. Misalnya, rekaman kalimat untuk asisten vokal membutuhkan pekerja yang berbicara bahasa, dengan aksen dan dialek di negara di mana asisten dijual. Memang, sebagian besar pekerja *Mechanical Turk* berbasis di AS. Dengan suatu tim kolega, kami membuat studi yang disebut "*Digital Platform Labor*" (DiPLab) pada tahun lalu di Prancis, suatu negara industri maju lain, dan menemukan banyak pekerja mikro di sana.

Siapa orang-orang yang bekerja mikro di negara seperti Prancis? Bukan hanya pelajar atau milenial, menurut survei kami. Lebih dari 60% pekerja mikro Prancis berusia antara 25 dan 44 tahun, dan memiliki pekerjaan utama selain kerja daring. Mereka bekerja (misalnya) di sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik, dan menggunakan pekerjaan mikro sebagai sumber pendapatan tambahan. Ironisnya untuk tugas-tugas yang membutuhkan kualifikasi terbatas, pekerja mikro berpendidikan lebih baik daripada populasi umum: di Prancis, lebih dari 40% memiliki setidaknya gelar sarjana. Sedikit lebih dari separuh semua pekerja mikro Prancis adalah perempuan, lebih sering sudah berkeluarga. Mereka lebih mungkin bekerja paruh waktu daripada pria, lebih sering bergantung pada pasangannya untuk mendapatkan penghasilan, dan mencurahkan lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga, mereka menggunakan semua waktu istirahat mereka antara pekerjaan utama dan aktivitas rumah untuk melakukan kerja mikro daring. Penghasilan tambahan dari pekerjaan mikro diterima, tetapi biayanya adalah beban tambahan selain pekerjaan formal dan pekerjaan perawatan –membuat mereka tidak punya banyak waktu untuk bersantai.

Pekerjaan mikro mengungkapkan masalah ketidakamanan ekonomi yang luas, meskipun tersembunyi. Lebih dari 20% pekerja mikro Prancis hidup di bawah ambang kemiskinan, dihitung sebagai setengah dari pendapatan rata-rata (median) dalam negara, sementara kurang dari 10% populasi umum berada dalam situasi ini. Dengan latar belakang tersebut, pekerjaan mikro daring merupakan upaya untuk mengatasi: bagian terbesar responden survei kami mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka melakukan kerja mikro adalah karena membutuhkan uang. Namun, pendapatan bulanan rata-rata dari pekerjaan mikro di Prancis (ketika semua platform digabungkan) didistribusikan secara sangat asimetris. Sejumlah besar pekerja mikro "sesekali" yang terhubung secara sporadis menghasilkan lebih rendah dari rata-rata yaitu sekitar 21 euro per bulan, sementara beberapa orang yang "sangat aktif" berhasil mendapatkan hingga 1.500-2.000 euro per bulan dengan bekerja mikro penuh waktu (atau hampir penuh waktu).

Jika pekerjaan mikro memiliki potensi untuk setidaknya memberi sedikit dukungan bagi orang yang memiliki lebih sedikit alternatif di pasar kerja standar atau yang membutuhkan pengaturan kerja yang fleksibel (misalnya karena tugas perawatan seperti yang ditunjukkan di atas), hal tersebut juga mengandung risiko yang spesifik. Pekerjaan mikro tidak menyediakan bentuk perlindungan sosial, perawatan kesehatan, atau tunjangan pensiun. Saat ini tidak ada cara untuk memasukkan pengalaman kerja mikro sebagai bagian dari karier profesional: misalnya, reputasi yang didapatkan di satu laman tidak ditransfer ke laman lain. Secara psikologis, pekerjaan mikro bisa sangat menyusahkan. Ketika, seperti yang sering terjadi, pekerja mikro tidak mengetahui klien dan/atau tujuan tugas yang mereka lakukan, aktivitas mereka kehilangan makna. Sebagai contoh, salah seorang responden kami, yang tidak mengetahui kontribusinya pada AI, bertanya-tanya, "mengapa saya diminta untuk menggambar lingkaran di sekitar tomat dalam gambar?" Lebih lanjut, ketika tugas ditolak oleh seorang klien (dan karena itu mereka tidak dibayar), pekerja mikro tidak memiliki sarana untuk mengajukan banding atas keputusan itu atau setidaknya untuk mengetahui mengapa itu keputusan itu dibuat. Terlebih lagi, mereka beroperasi secara terpisah satu sama lain. Mereka bekerja mikro dari rumah dan tidak memiliki apa pun seperti area kopi di kantor; juga laman yang pekerjaan mikro tidak menyediakan ruang digital bagi pekerja untuk bertemu, setidaknya daring. Inisiatif aktivis atau serikat pekerja seringkali diperlukan untuk menciptakan infrastruktur semacam itu.

Karena kerja mikro melayani pengembangan industri AI mutakhir, dan karena tugas-tugas tersebut terutama dilakukan oleh orang-orang dalam situasi kerentanan, penting untuk mulai berpikir serius tentang solusi yang dimungkinkan. Laman dan aplikasi mikro dapat melakukan bagian mereka, dengan meningkatkan transparansi mereka dan dengan menawarkan jaringan dan layanan dukungan. Pembuat kebijakan dan serikat pekerja harus berbuat lebih banyak untuk merancang bentuk-bentuk perlindungan baru bagi para pekerja yang tidak tipikal. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Paola Tubaro <paola.tubaro@lri.fr>

› Museum Kebaruan Unggul

oleh **Lévio Scattolini**, Universitas Negara Bagian Rio de Janeiro (UERJ), Brasil.

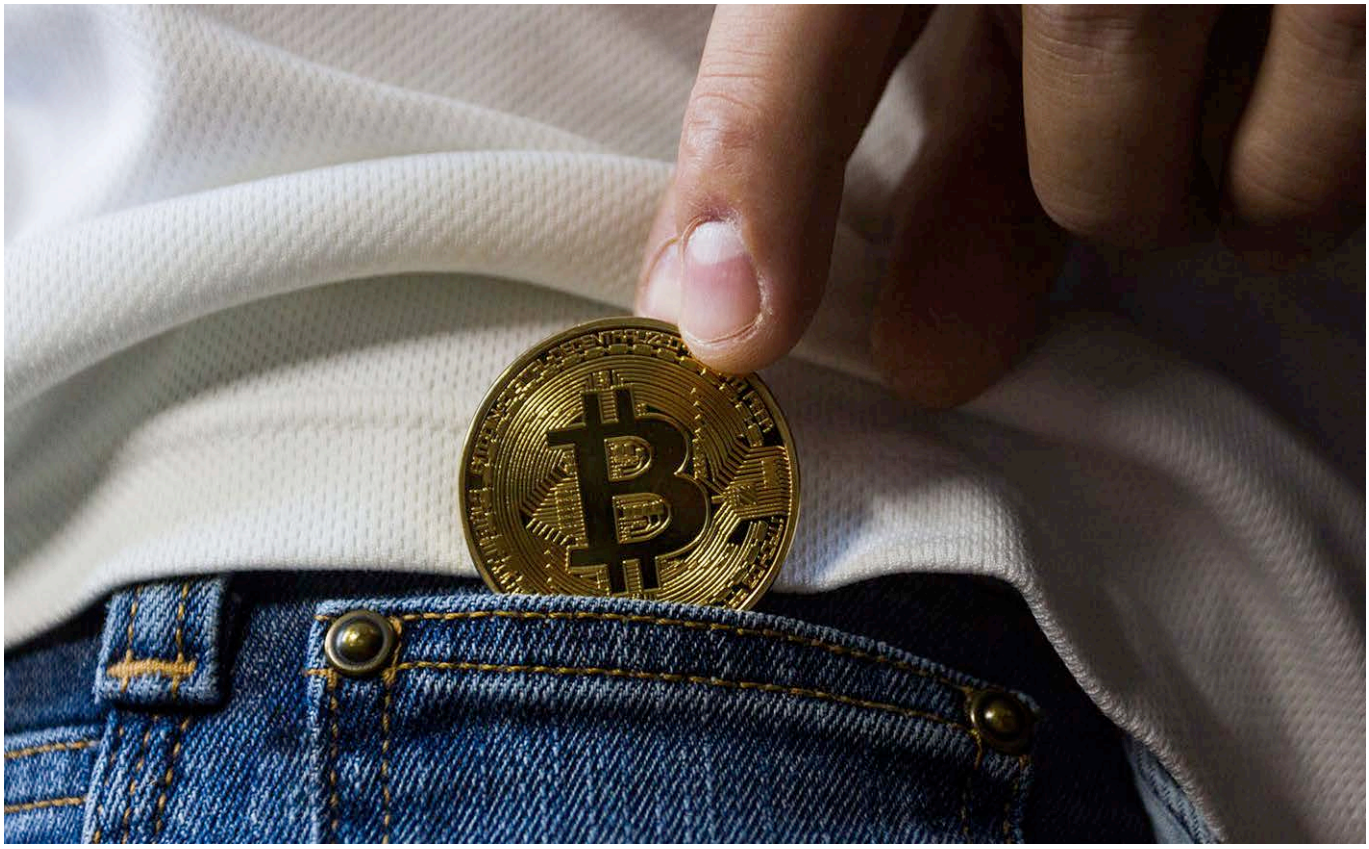

Cryptocurrency membawa harapan besar terhadap adanya suatu sistem finansial yang lebih demokratis. Kredit: Worldspectrum/pexels.com.

Mereka yang agak skeptis tentang apa yang masih bisa diberikan oleh kapitalisme dalam hal pencapaian peradaban cenderung mencurigai janji-janji seputar teknologi, seperti apa yang dinamakan Era Digital atau Era Informasi. Kecerdasan Artifisial, Machine Learning, Big Data, Internet of Things (IoT), Blockchain, Cryptocurrency, dan bahkan telepon seluler digital, perluasan baru dari tubuh dan jiwa kita, tidak dianggap sebagai penanda zaman baru yang akan hadir, tetapi sebagai mekanisme penutup dari masa depan. Menemukan bukti untuk mendukung hipotesis ini atau bahkan membuktikan bahwa hal tersebut akan terjadi tidaklah menjawab pertanyaan yang lebih besar dan jauh lebih lama: *mengapa kita terus-menerus melihat solusi dan struktur baru yang kian menjauh dari cita-cita yang menjadikannya hidup, dan, pada dasarnya berakhir dengan penyusunan kembali masa lalu dengan suatu kedok baru?*

Ada beberapa dimensi dalam menanggapi isu ini; saya ingin menekankan suatu dimensi yang cukup konkret dan mendesak, yang menyorot akar sosial yang biasanya diabaikan dalam perdebatan semacam ini. Dalam ranah gagasan, bentuk *cryptocurrency* langkah pemberontakan terhadap penyalahgunaan tak terbayangkan yang dilakukan oleh sistem finansial–dengan izin dan dukungan dari negara-negara di seluruh dunia–yang memuncak pada krisis ekonomi 2008. Sebenarnya, sebagai tanda protes, sebuah laporan *Times* yang mengumumkan niat pemerintah Inggris Raya untuk meluncurkan suatu *bailout* kedua untuk bank-bank pada tanggal 3 Januari

»

2009 telah ditandai dalam kode sumber Bitcoin sebagai bukti stempel waktu mengenai hari peluncurannya. Namun tidak hanya itu, rancang-bangun teknologi memang dirancang untuk mengambil alih kekuasaan yang berasal dari pengendalian sistem keuangan dari tangan "para perantara" dan mendistribusikannya kepada orang-orang biasa, yaitu masyarakat umum.

Masalah yang didiagnosis di sistem keuangan tradisional ialah bahwa sistem tersebut secara mendasar berakar pada kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan sentral dalam hal validasi transaksi dan penerbitan mata uang. Dengan kata lain, justru lembaga-lembaga keuangan, seperti bank swasta dan bank sentral, yang menjamin bahwa A memiliki uang dalam jumlah tertentu dan, setelah mentransfer jumlah tersebut ke kepemilikan B, tidak dapat menggunakannya lagi. Kita mendelegasikan wewenang kepada lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan tugas-tugas yang relevan ini dan berharap bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Meskipun saat ini hal tersebut tidak muncul sebagai masalah penting bagi sebagian besar orang karena tersembunyi dan jauh dari kehidupan sehari-hari, lembaga-lembaga keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah *polis* [negara-kota di zaman Yunani], khususnya dalam suatu formasi sosial di mana segala sesuatu diproduksi untuk pertukaran–yang pada akhirnya adalah untuk memperoleh uang.

Dalam hal ini, kemungkinan menciptakan suatu jaringan buku catatan keuangan (*ledger*) yang terdesentralisasi, terbuka untuk semua orang yang ingin terlibat di dalamnya, di mana transaksi dicatat dan divalidasi melalui suatu mekanisme koordinasi konsensus di antara semua node yang berpartisipasi, terlihat sebagai ide yang cukup memadai dan menarik. Terlebih lagi jika kita menganggap bahwa jaringan ini toleran terhadap kesalahan (dapat beroperasi dengan baik jika satu atau beberapa node gagal), memiliki penerbitan mata uang yang tidak dapat diubah (terbatas pada 21 juta koin), memungkinkan orang untuk bertransaksi nyaris seketika dari mana saja dengan akses internet, dan telah bekerja di bawah upaya serangan besar-besaran, tanpa kerusakan struktural besar, selama lebih dari sebelas tahun. Faktanya, rancang-bangun koordinasi sistem terdistribusi di belakang Bitcoin dilakukan dengan sedemikian elok sehingga menjadi teknologi yang berdiri sendiri, dengan serangkaian implementasi lain, yang disebut Blockchain.

Pada tahun 2019, Bitcoin memuncak pada US$225 miliar dolar dalam nilai pasar dan memiliki lebih dari 120 juta transaksi yang tercatat di jaringan digital asalnya selama periode satu tahun. Haruskah kita menyimpulkan bahwa kenyataan ini telah merevolusikan sistem keuangan dan memberikan kekuasaan kepada rakyat biasa? Tidak secepat itu. Setelah suatu awal yang pasang-surut dan ragu-ragu, mulai 2014 dan seterusnya, lembaga keuangan, perusahaan, dan pemain pasar besar mengubah pendekatan mereka terhadap *cryptocurrency* dan mulai berinvestasi secara besar-besaran di dalamnya dan meneliti teknologinya. Cita-cita bahwa pengguna umum dengan komputer pribadi mereka akan menjadi mayoritas dalam jaringan dan memiliki kontrol atasnya sangat ditantang oleh kenyataan. Saat ini, "penambangan" Bitcoin dikendalikan oleh "ladang" besar, yang merupakan istilah untuk berbagai perusahaan besar kompleks yang memiliki mesin, energi, dan sumber daya–atau, dengan kata lain, Modal–untuk memproses lebih baik "bukti jerih payah" yang dibutuhkan. Akhirnya, patut disebutkan pengumuman Facebook baru-baru ini bahwa mereka berniat, dengan bermitra dengan beberapa di antara perusahaan terbesar di dunia, termasuk lembaga keuangan, untuk menciptakan *cryptocurrency* sendiri–yang secara bijak dinamakan Libra–dengan tujuan melakukan apa yang telah gagal dilakukan Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya, yaitu mempopulerkannya. Hal ini berarti kita sedang berada di ambang menyaksikan platform [teknologi berbasis web] media sosial terbesar di dunia, yang telah secara tidak pantas mengambil data dari milyaran orang selama lebih dari sepuluh tahun, bersekutu dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menciptakan untuk pertama kalinya sebuah bank sentral yang benar-benar global, yang dimiliki secara pribadi dan maha tahu tentang para penggunanya.

Di sini, kita dapat membuktikan pentingnya analisis kritis sebagai cara untuk mengarahkan tindakan kita secara memadai ke dalam ranah global. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dari suatu diagnosis pragmatis bahwa masalah sistem keuangan saat ini dikenal sangat tergantung pada kepercayaan terhadap lembaga-lembaga terpusat sebagai "perantara," muncul suatu solusi pragmatis untuk mereformasi dan menerapkan suatu desentralisasi "jaringan kepercayaan" yang terbuka. Namun, bagaimana jika masalah sistem keuangan kita bukan berasal dari wujudnya tetapi dari kontennya? Maksud saya, bagaimana seseorang bisa mencoba menciptakan suatu "masyarakat tanpa perantara" (*disintermediated society)* dengan mengandalkan figur perantara sosial yang paling menonjol di zaman kita, [yaitu] uang? Bukankah uang yang pertama-tama menyebabkan perlunya perkembangan dan pertumbuhan institusi verifikasi yang terpusat? Bukankah itu logika intrinsik dari akumulasi uang tanpa akhir yang menghasilkan konsentrasi dan sentralisasi?

Klaim saya bukanlah bahwa Bitcoin atau ribuan *cryptocurrency* baru tidak berharga, tetapi bahwa jika bentuk kapitalis dari organisasi sosial diterima begitu saja, jika implikasi dari sosiabilitas melalui uang tidak ditempatkan ke dalam perspektif, teknologi baru ini akan ditakdirkan untuk seterusnya menyusun kembali masa lalu, kondisi sosial yang diperlukan agar Modal dapat mereproduksi dirinya sendiri. Dengan menjelaskan secara eksplisit gerakan kontradiktif berupa kenaikan nilai dari nilai (*valorization of Value*)–uang yang harus menjadi lebih banyak uang–kita mungkin memiliki diagnosis yang lebih baik dari masalahnya, dan, dari sana, mungkin dapat muncul solusi, struktur, atau teknologi yang lebih baik untuk suatu masa depan yang berbeda: suatu proses material baru untuk produksi kehidupan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Lévio Scattolini <leviosj@gmail.com>

› Apa yang Dibutuhkan oleh Digitalisasi Keberlanjutan?

oleh **Felix Sühlmann-Faul**, Jerman

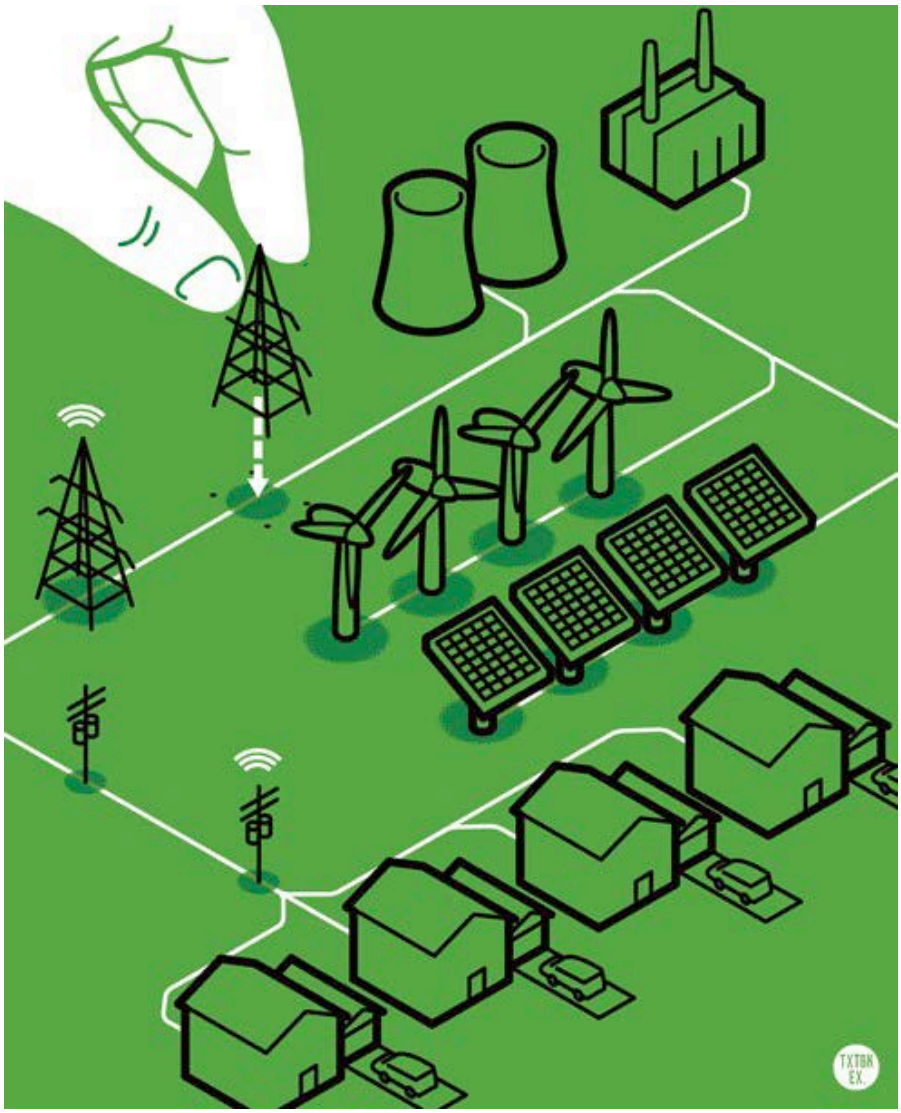

Sumber energi terbarukan melibatkan digitalisasi untuk distribusi yang cerdas. Kredit: James Provost/Flickr. Beberapa hak dilindungi.

Banyak hal menunjukkan kepada kita apa arti digitalisasi. Ambil contoh toko rekaman. Kita pernah mendengar sebuah lagu yang kita sukai di radio, kemudian seorang teman memberi tahu kita judul lagu tersebut, setelahnya kita segera bergegas ke toko rekaman dan membeli musiknya dalam bentuk media. Suatu hal berbentuk material yang menjadi milik kita. Seiring perkembangan zaman, tindakan yang dulu dianggap biasa, kini hampir tidak pernah terlihat lagi. Layanan *streaming*, didasarkan pada platform model bisnis, memberikan akses ke jutaan lagu dan menggantikan toko kaset yang telah ketinggalan zaman. Industri musik telah banyak berubah. Salah satu penyebab utama dari perubahan ini adalah data sebagai alat utama produksi. Platform model bisnis seperti ini bekerja dengan mengumpulkan banyak informasi tentang pengguna mereka. Misalnya, genre musik apa yang kita dengarkan, kapan, seberapa sering, dan di mana. Selain itu: Apa gender kita? Apakah kita punya anak? Di mana kita tinggal? Berapa penghasilan rumah tangga kita?

Informasi inilah yang membuat sebagian besar platform sangat sukses: Mereka mengetahui preferensi dan sikap kita serta dapat memprediksi perilaku kita. Layanan mereka menarik karena mereka beradaptasi dengan kepribadian kita. Berbagai platform turut menjual informasi yang dikumpulkan ini ke agen iklan, yang sekarang dapat menawarkan kemungkinan konsumsi yang ditargetkan secara pribadi. Ini adalah salah satu bagian besar dari apa arti digitalisasi saat ini: Koneksi kuat antara kapitalisme dan teknologi.

»

Kecenderungan ini terkait langsung dengan fakta bahwa digitalisasi sering kali tidak dapat berekonsiliasi dengan keberlanjutan. Laporan krusial Brundtland (1987) kepada PBB menyatakan: "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita, anak-anak kita, dan anak-anak mereka harus memiliki kesempatan untuk menjalankan 'kehidupan yang baik.'" Apa arti pernyataan ini? Tentu saja, pernyataan ini berimplikasi pada aspek kebudayaan. Dalam masyarakat Barat, yang dipengaruhi oleh ide-ide humanisme dan pencerahan, norma komunitas terpaut oleh nilai-nilai seperti hak dasar yang demokratis, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, keragaman, privasi, lingkungan yang sehat, dan "kebebasan" – apa pun artinya. Namun demikian, sebagian besar dari poin-poin ini dipengaruhi oleh digitalisasi yang didorong oleh kepentingan ekonomi secara masif. Privasi, misalnya, tidak dapat dijaminkan oleh platform yang keberhasilan luarannya didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu tentang kita. Selain itu, lingkungan yang sehat tidak pernah menjadi tujuan kepentingan ekonomi dan hal ini tidak berubah di era digital.

Digitalisasi membutuhkan konstruksi perangkat dan infrastruktur, penambangan, serta transportasi bahan baku. Penggunaan perangkat digital semata-mata menciptakan konsumsi energi sekitar 10% dari kebutuhan listrik global. Jika tren ini terus mempertahankan lajunya, maka kebutuhan akan melonjak hingga 20% pada tahun 2025. Akibatnya, produksi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bertanggung jawab atas 3,7% dari emisi CO2 buatan manusia dan akan meningkat menjadi sekitar 8% pada tahun 2025. Penambangan bahan baku menghasilkan masalah besar terkait keberlanjutan di negara tuan rumahnya. Republik Demokratik Kongo adalah contoh yang sangat mengerikan dalam hal ini. Kongo adalah salah satu negara pemasok terpenting untuk tungsten, tantalum, timah, kobalt, dan emas. Mineral-mineral ini tidak tergantikan untuk pembuatan perangkat keras digital. Tentu saja, penambangan menyebabkan masalah ekologi yang umum, seperti erosi, air tanah beracun, dan kepunahan spesies. Namun, masalah di tingkat sosial bahkan lebih besar: Perang saudara yang berdarah mengguncang negara ini. Berbagai pasukan pemberontak yang telah berperang selama 30 tahun bertanggung jawab atas jatuhnya jutaan korban sipil. Tambang – yang menyuplai mineral tak tergantikan untuk perangkat keras digital – berada dalam cengkeraman pasukan pemberontak yang membiayai senjata mereka melalui penjualan mineral ini. Inilah mengapa hasil tambang tersebut dijuluki "mineral konflik." Konsekuensi pahit: kelaparan, kekerasan seksual, penyakit, perbudakan modern, tentara anak-anak.

Demikian, ada pula kabar baik: Beberapa bidang keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan menggunakan alat digitalisasi. Contoh pertama adalah pergeseran ke arah penggunaan energi terbarukan. Untuk menggunakan sumber energi terbarukan secara efisien, tidak ada jalan lain kecuali memanfaatkan platform digitalisasi, berhubung produksi energi cenderung terdesentralisasi, sulit diprediksi, terjadi pada waktu yang berbeda per hari, dan terkadang hanya sejumlah kecil yang dapat diproduksi. Penyimpanan dan distribusi harus terjadi dengan sangat cepat untuk memanfaatkan energi yang mudah berubah ini. Hal ini hanya dapat dicapai melalui dukungan teknologi komputer yang mampu bergerak dengan kecerdasan artifisial.

Contoh lain adalah transportasi berkelanjutan. Pergeseran dari transportasi berbahan bakar fosil, kemacetan lalu lintas di pusat kota, dan polusi debu berpartikel mikro membutuhkan reduksi drastis penggunaan mobil pribadi. Namun, seringkali terdapat kesenjangan informasi yang besar serta masalah mengenai perbandingan moda transportasi alternatif. Terdapat penyedia jasa yang berbeda, model penetapan harga yang berbeda, waktu perjalanan yang berbeda, serta aspek-aspek lainnya. Cukup sulit untuk meninjau seluruhnya secara singkat. Tetap saja, ada solusi mudah untuk mengatasi masalah ini karena sekarang ponsel cerdas telah lazim digunakan. Banyak proyek penelitian di Jerman mengevaluasi masalah ini dengan cara meningkatkan layanan aplikasi digital dari penyedia transportasi umum setempat dan menambahkan semua informasi yang relevan dari area-area berbeda dalam aplikasi ini. Saat ini seseorang dapat membandingkan jasa penyedia mobil tumpangan, perusahaan penyewaan sepeda, bus, kereta api, dan sebagainya. Anda dapat melihat berapa lama durasi perjalanan, moda transportasi apa yang termurah, bagaimana menggabungkan moda yang berbeda satu sama lain, serta memesan dan membayar melalui aplikasi ini. Digitalisasi dapat mempermudah perjalanan secara berkelanjutan.

› Pelajaran apa yang dapat kita petik?

Penelitian yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan bahwa keberlanjutan dianggap penting dalam masyarakat. Namun, melakukan aksi/tindakan berkelanjutan adalah hal yang sama sekali berbeda. Orang-orang cenderung enggan meninggalkan mobil pribadi mereka atau berhenti bepergian dengan pesawat. Di sinilah letak pentingnya politik. Banyak langkah relevan yang dapat diambil, seperti menurunkan pajak untuk perbaikan perangkat digital atau merumuskan undang-undang bahwa semua perangkat elektronik wajib diperbaiki terlebih dulu (tidak langsung dibuang) apabila mengalami kerusakan. Namun demikian, langkah terbesar adalah membayar harga yang wajar untuk suplai bahan baku mentah. Harus ada kompensasi finansial terhadap penghancuran ekologis dan sosial yang diakibatkan oleh penambangan. Konsekuensi parah memang akan timbul, tetapi di saat bersamaan membuka jalan menuju ekonomi pasca-pertumbuhan melalui pajak yang lebih tinggi pada eksploitasi sumber daya alam.

Digitalisasi yang mendayagunakan peluangnya untuk menciptakan cara produksi dan kehidupan yang lebih berkelanjutan serta menghindari risiko konsumsi energi yang semakin besar dan perusakan alam adalah upaya bersama. Perundang-undangan yang cerdas adalah satu aspek. Lebih lanjut, individu harus mendukung upaya ini melalui keterlibatan politik, voting, dan menyesuaikan gaya hidup. Keberlanjutan berakar pada kebercukupan, tetapi digitalisasi mengaburkan ambang batas konsumsi. Kita harus senantiasa mengawasi fakta ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Felix Sühlmann-Faul
<kontakt@suehlmann-faul.com>

› The Fairwork Foundation:

Penelitian Aksi terhadap *Gig Economy*

oleh **Srujana Katta**, **Kelle Howson**, dan **Mark Graham,** Institut Internet Oxford, Universitas Oxford, Inggris.

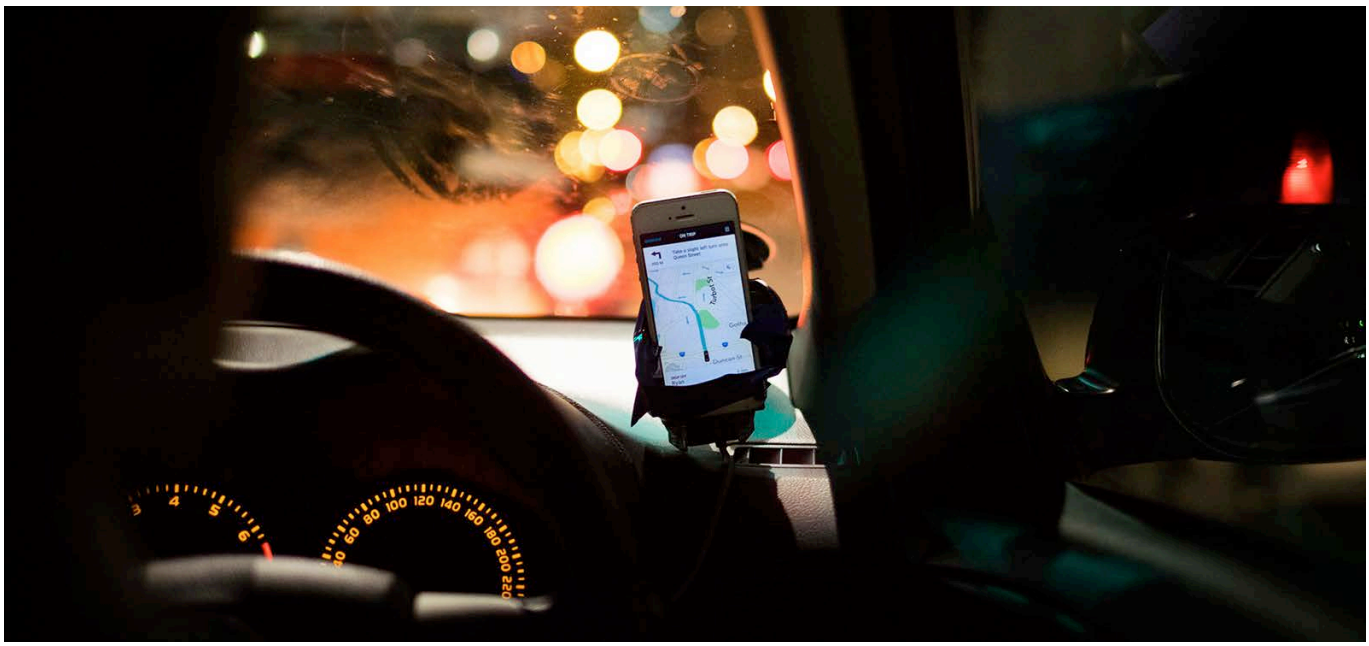

Sejak dekade terakhir menumpang kendaraan (ridesharing) secara komersial telah menjadi cara transportasi yang populer. Kredit: Noel Tock/ Flickr. CC BY-NC 2.0.

Ola Cabs, perusahaan berbagi tumpangan India, adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan di seluruh dunia yang model bisnisnya bergantung pada penggunaan platform digital untuk mencocokkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Secara khusus, aplikasi seluler Ola memungkinkan penumpang yang membutuhkan transportasi untuk terhubung dengan pengemudi terdekat. Platform tenaga kerja digital seperti Ola terdiri dari yang biasa disebut sebagai "*gig economy*" [pasar kerja yang ditandai kerja lepas dengan kontrak jangka pendek], di mana perusahaan–melalui platform digital (sering didukung oleh algoritma yang dijaga ketat)–mengontrak pencari kerja untuk melakukan "*gig*" [kerja lepas jangka pendek] yang bersifat sambil lalu dan sedikit demi sedikit. Model *gig economy* berupa lapangan kerja yang dialokasikan dan dikelola secara algoritmik telah membuat terobosan besar-besaran ke dalam beragam kegiatan ekonomi, mulai dari berbagi tumpangan dan pengiriman, hingga pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lepas secara umum.

Ola, suatu perusahaan yang secara khas berciri *gig economy*, menyebarkan narasi mengenai kebebasan dan fleksibilitas dalam merekrut "mitra pengemudi" untuk mengemudi mobil-mobil mereka untuk perusahaan. Sesuai dengan mantra dasar *gig economy*, di situs webnya, Ola menjamin calon pengemudi "jam kerja yang fleksibel," "kebebasan kerja," dan kemampuan untuk "mendapat respek." Selain memungkinkan orang untuk mengemudi mobil mereka sendiri di bawah bendera Ola, perusahaan juga menyewakan mobil kepada mereka yang tidak memilikinya, dengan harga $10-16 per hari. Pengemudi yang berminat dapat "mengemudi mobil dengan risiko nol" setelah pembayaran uang muka yang tidak dapat dikembalikan (sekitar $56) dan uang jaminan (antara $293 dan $432).

Dalam narasi Ola, para mitra pengemudi adalah orang-orang giat berdaya mandiri yang terbebas dari kendala pekerjaan tradisional, dan bergerak aktif di antara tugas-tugas yang menarik. *Gig work* (kerja lepas) seolah-olah menawarkan prospek yang menarik

»

berupa manajemen diri, memanfaatkan aset yang ada, dan lebih banyak waktu untuk keluarga atau kegiatan lainnya. Daya pikatnya terletak pada tawaran kepada pekerja untuk menjalankan pengendalian yang lebih besar atas banyak aspek pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Namun kenyataannya sering kali jauh dari apa yang dijanjikan. Manajemen terbuka oleh seorang majikan manusia digantikan oleh bentuk-bentuk kontrol yang diaktifkan secara algoritmik, yang lebih tersembunyi dan tersebar.

Pada bulan Desember 2019, *The Economic Times* melaporkan bahwa Ola menskors seorang mitra pengemudi di Mumbai setelah seorang penumpang mengeluh bahwa pengemudi tersebut tertidur di belakang kemudi, dan hampir menyebabkan mereka kecelakaan. Pengemudi mengatakan dia telah berada di belakang kemudi selama lebih dari dua puluh jam. Di permukaan, tindakan Ola untuk menskorsnya adalah tindakan yang wajar untuk memastikan keselamatan penumpang dan pengemudi. Namun, episode ini menggambarkan berbagai masalah struktural yang menandai sektor berbagi tumpangan, dan *gig economy* yang lebih luas–yaitu, upah yang buruk, kondisi kerja yang tidak aman, dan ketiadaan proses hukum yang menghormati hak hukum semua pihak. Laporan tersebut mengutip ucapan seorang perwakilan dari organisasi pekerja: "Jika mereka tidak mengemudi untuk jangka waktu lama, seperti 14-15 jam, mereka tidak dapat membayar sewa harian ke Ola, Uber, dll."

Platform *gig economy* sering berpendapat bahwa mereka hanyalah perusahaan teknologi yang menghubungkan mereka yang ingin menjual tenaga mereka dengan mereka yang ingin membelinya. Dengan logika ini, dengan melintas yurisdiksi, platform mengklasifikasikan pekerja gig sebagai "kontraktor independen," "wiraswasta," atau setaranya, bukan sebagai karyawan. Klasifikasi ini memungkiri hubungan kontrol yang ada, di mana platform menentukan persyaratan kerja dan pembayaran, dan menggunakan metode pengelolaan jaringan yang sangat efektif. Hasil dari kontrak yang mengecoh ini adalah bahwa semakin banyak pekerja gig yang tidak dicakup oleh undang-undang ketenagakerjaan dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk perlindungan dan tunjangan, seperti tunjangan sakit atau liburan, dan kontribusi pensiun. Platform mengalihdayakan biaya kepada pekerja, seperti untuk sewa atau pemeliharaan kendaraan, asuransi, dan bahan bakar. Pekerja bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran pajak. Pandangan mengenai fleksibilitas memilih jam kerja ditinggalkan karena kecenderungan penurunan upah (didorong oleh platform yang dengan cepat memperbanyak tenaga kerja mereka), dan suatu gamified digital interface [interaksi digital berbasis permainan game] yang memberikan imbalan bagi mereka yang bekerja lebih lama. Selain itu, platform tidak berkewajiban untuk menjamin jumlah pekerjaan minimum, dengan adanya kelebihan pasokan tenaga kerja yang mengakibatkan adanya periode ketersediaan pekerjaan yang lebih rendah, dan waktu tunggu yang lebih lama di antara pekerjaan tanpa dibayar. Kelebihan persediaan tenaga kerja yang sama ini berarti bahwa pelanggan jarang harus menunggu lama untuk layanan yang mereka inginkan. Secara berama-sama, kesemua faktor ini secara terus-menerus mendorong pekerja untuk bekerja dengan giliran yang lebih lama, sehingga sebagai akibatnya menanggung risiko yang lebih besar dan berpotensi membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain, seperti dalam kasus pengemudi Ola yang mengantuk.

Baik Ola, maupun konteks India, tidak unik–masalah sama berupa upah rendah, kerja berlebihan, dan paparan risiko secara teratur muncul di seluruh *gig economy* secara global. Kondisi ini dapat dan sedang ditangani dalam berbagai cara, termasuk melalui regulasi yang menargetkan status pekerjaan pekerja dan kewajiban platform. Yang mendasari ini adalah aksi kolektif dari bawah ke atas dan organisasi pekerja, dan upaya pihak ketiga untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong praktik-praktik yang lebih adil.

Dalam semangat yang terakhir itulah Fairwork Foundation, sebuah proyek penelitian aksi yang berbasis di Universitas Oxford, didirikan pada tahun 2018 sebagai kolaborasi antara ilmuwan sosial dan pengacara perburuhan yang bekerja untuk menangani praktik-praktik tidak adil dalam *gig economy*. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari lebih dari 300 pekerja *gig* di berbagai

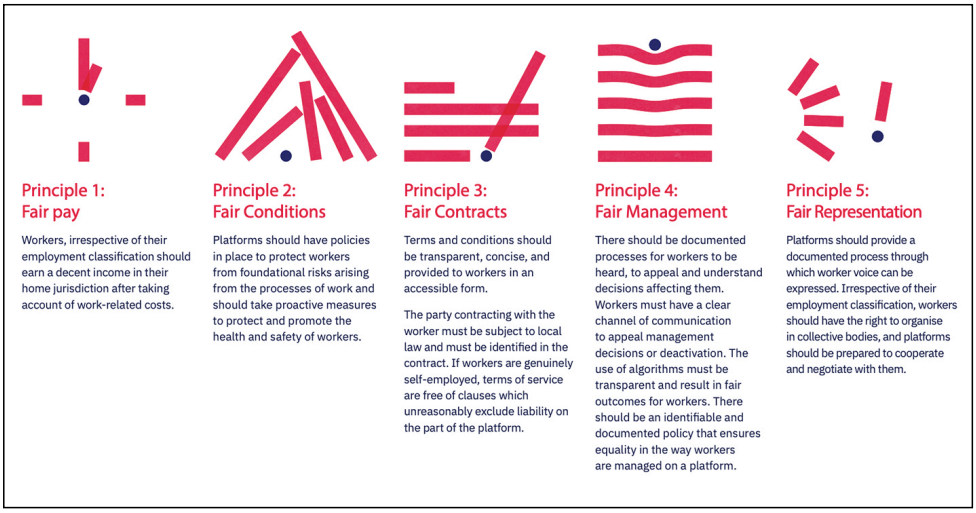

Prinsip-prinsip Fairwork. Kredit: The Fairwork Foundation.

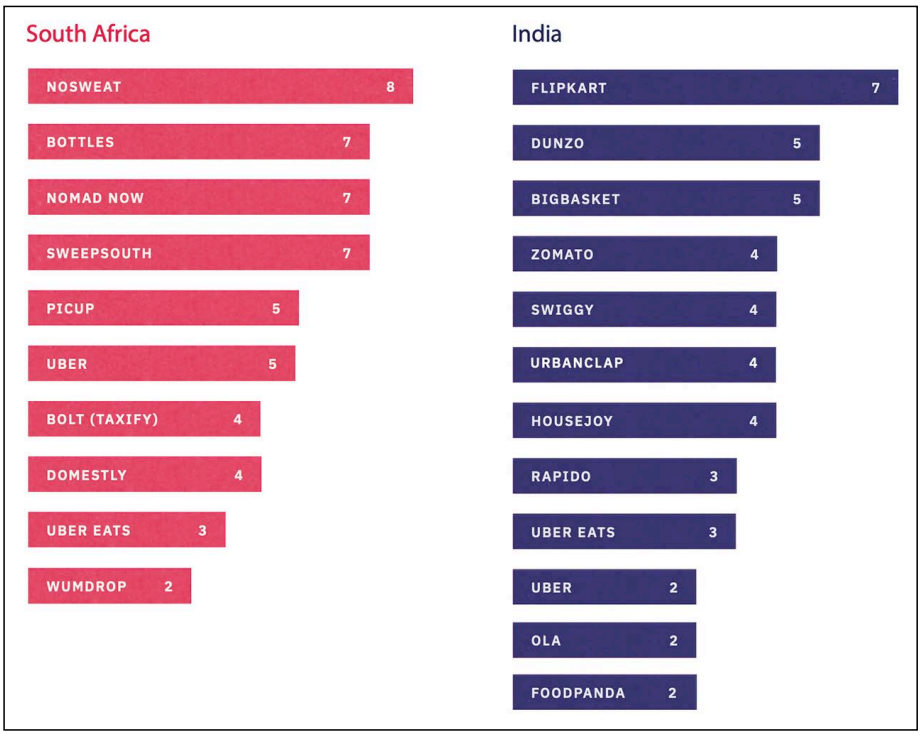

Tabel pemeringkatan Fairwork tahun 2019 di Afrika Selatan dan India. Kredit: The Fairwork Foundation.

negara di Afrika, Asia, dan Eropa, kami telah mengembangkan lima prinsip kerja platform yang adil: upah yang adil, kondisi yang adil, kontrak yang adil, manajemen yang adil, dan perwakilan yang adil.

Kami melakukan penelitian (termasuk wawancara dengan pekerja dan manajemen platform) dengan siklus tahunan untuk mengevaluasi platform *gig economy* terhadap prinsip-prinsip ini. Kami kemudian memberi mereka skor sampai 10, dan menampilkan skor mereka baik dalam kartu skor individu maupun secara komparatif dalam tabel liga "keadilan". Untuk melakukan ini, kami menetapkan ambang batas untuk masing-masing dari lima prinsip berdasarkan keadaan lokal (misalnya, "upah yang adil" ditafsirkan berbeda di tempat yang berbeda). Platform yang memperoleh skor baik diizinkan menggunakan *kite mark* [lambang jaminan mutu] kami untuk menandakan bahwa mereka adalah perusahaan yang lebih adil.

Melalui kerja ini, kami bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja bagi pekerja, perusahaan, konsumen, dan regulator untuk membayangkan ekonomi berbasis platform yang mewujudkan janji tentang peluang kerja yang diperluas, mata pencaharian berkelanjutan, dan pemberdayaan pekerja.

Setelah keluhan penumpang, Ola segera mengambil tindakan disipliner dan korektif terhadap pengemudi yang kelelahan, termasuk mengharuskannya menghadiri konseling. Tetapi mungkin tidak semua kesalahan harus dibebankan pada pengemudi. Tidak mungkin untuk menasihati seseorang untuk tidak terlalu lelah, atau kurang bergantung pada sumber pendapatan yang rentan. Jika Ola, dan platform seperti mereka, sebaliknya secara proaktif memasukkan prinsip-prinsip Fairwork ke dalam cara-cara pekerja dikelola, kita mungkin melihat hasil yang lebih aman dan lebih adil bagi pekerja dalam *gig economy*. Pengemudi yang menerima bayaran (upah) bersih yang adil dan bekerja untuk platform yang struktur bonusnya tidak mengandung pemberian imbalan bagi kerja yang berlebihan (kondisi) akan cenderung memilih untuk menutup program aplikasi daripada menerima pekerjaan lain pada ujung hari kerja yang berat. Dalam kasus-kasus di mana kewajiban pembayaran dikomunikasikan dengan jelas, pekerja kemungkinan akan mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat sebelum mendaftar (kontrak). Pekerja di platform dengan prosedur proses hukum (manajemen) yang responsif akan dapat mengajukan banding atas tindakan disipliner dan kasus mereka didengar oleh seorang manusia. Dan pekerja yang mampu memiliki badan kolektif independen yang diakui oleh platform (perwakilan) kemungkinan akan mampu menuntut kesepakatan yang lebih adil dengan persyaratan mereka sendiri. Sebaliknya, Ola dan sebagian besar platform lain telah berhasil mengalihdayakan tidak hanya biaya dan risiko, tetapi juga tanggung jawab untuk kondisi kerja yang tidak aman bagi pekerja.

Pada dasarnya kami ingin mempertegas melalui prinsip-prinsip kami bahwa pekerjaan yang tidak pasti, tidak aman bukanlah suatu kondisi yang alami, diperlukan, atau dapat diterima dari suatu ekonomi yang berbasis platform modern. Hak-hak buruh yang diperjuangkan dengan gigih dan telah dimenangkan sedang diabaikan oleh jalan pintas cerdas (*smart workarounds*) di lebih banyak sektor. Meskipun perasaan bahwa tidak ada alternatif sangat mengakar dan platform mungkin tampak tidak tersentuh, mereka sangat sensitif terhadap persepsi publik. Pengguna platform (baik pekerja maupun konsumen) memiliki kekuatan lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan dalam menggambarkan dan mewujudkan masa depan kerja yang lebih adil. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Srujana Katta <srujana.katta@oii.ox.ac.uk>
Kelle Howson <kelle.howson@oii.ox.ac.uk>
Mark Graham <mark.graham@oii.ox.ac.uk>

› Kapitalisme, Kelas, Perseteruan

oleh **Donatella della Porta**, Scuola Normale Superiore, Florensia, Italia

Protes di Hongkong pada tahun 2019. Kredit: Studio Incendo/Flickr. Hak tertentu dilindungi.

Peringatan ke lima puluh [gerakan] "Musim Gugur yang Hangat" (*Hot Autumn*) di tahun 1969, yang mendorong para sosiolog seperti Colin Crouch dan Alessandro Pizzorno berbicara tentang "kebangkitan perjuangan kelas," telah ditandai oleh kemunculan suatu gelombang protes global besar-besaran, termasuk demonstrasi jalanan dan pembangkangan sipil yang melibatkan jutaan orang, dan meledak secara serentak di berbagai tempat yang saling berjauhan seperti Lebanon, Cile, Catalunya, dan Hong Kong. Di "Musim Gugur yang Hangat" tahun 2019, perjuangan-perjuangan melawan ketidaksetaraan ekstrim dan para elit korup bergaung bersama berbagai protes anti-penghematan pada permulaan dekade, maupun dengan Gerakan Keadilan Global (*Global Justice Movement*) pada permulaan milenium.

Ketika protes-protes menentang penghematan muncul kembali secara berkala menjelang akhir tahun 2010-an, mobilisasi-mobilisasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan atau pemanasan global mengambil alih beberapa kerangka isu dari gelombang-gelombang [protes] di masa lalu, dengan menempatkan isu-isu tersebut di dalam suatu kritik tentang hubungan sosial dan politik yang ada. Kelompok-kelompok yang terkait dengan jaringan-jaringan yang cair, sering memobilisasi warga-warga untuk pertama kalinya. Sementara [gerakan-gerakan seperti] Jumat untuk Masa Depan (*Fridays for Future*), Pemberontakan melawan Kepunahan (*Extinction Rebellion*) dan

»

Ni Una Menos menjembatani isu-isu kekerasan terhadap alam dan perempuan dengan isu-isu eksploitasi kapitalis, mobilisasi-mobilisasi besar-besaran Musim Gugur yang Hangat di tahun 2019 berakar pada perpecahan nasional yang juga mengungkapkan kemarahan terhadap perkembangan kapitalis global yang meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan menghambat hak-hak sipil serta kebebasan politik. Kadang-kadang represi brutal terhadap pembangkangan sipil di jalan-jalan dan di pengadilan-pengadilan memicu berbagai protes lebih lanjut melalui sebuah spiral politisasi dengan momen-momen radikalisasi.

Sementara neoliberalisme dan krisisnya menimbulkan banyak ketidakpuasan, yang sering diekspresikan dalam bentuk-bentuk protes yang disruptif, kapitalisme sebagai sebuah konsep dan topik penelitian dalam kajian-kajian gerakan sosial telah menjadi terpinggirkan. Demikian pula dengan analisis kelas dan konflik kelas. Namun sejak Resesi Besar (*Great Recession*) tahun 2008, telah muncul perhatian yang berkembang terhadap basis-basis struktural dari berbagai konflik sosial dan perwujudan-perwujudannya dalam politik-politik kelembagaan maupun (khususnya) dalam politik perseteruan (*contentious politics*). Asumsi-asumsi yang mapan tentang peran dari kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan proses-proses pembingkaian muncul karena adanya kebutuhan untuk mengikuti perkembangan yang mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial ekonomi untuk melakukan berbagai protes. Sebagaimana saya jelaskan pada bagian selanjutnya, untuk membawa kembali kapitalisme ke dalam analisis tentang protes kita perlu menjembatani literatur tentang gerakan sosial dengan kontribusi-kontribusi kritis terhadap aspek ekonomi politik dari kapitalisme neoliberal.

› Transformasi dalam kapitalisme dan gerakan sosial baru

Penelitian tentang gerakan-gerakan perburuhan memperlihatkan transformasi kapitalisme berjangka panjang yang mengarah pada menurunnya [peran] pekerja-pekerja industrial dan kesadaran kelas mereka maupun kapasitas organisasionalnya. Sejalan dengan ini, penelitian empiris dalam kajian-kajian gerakan sosial membahas meluasnya perpecahan-perpecahan di luar pabrik, penempaan identitas-identitas kolektif baru, dan perlawanan terhadap hirarki-hirarki masyarakat dan pasar. Khususnya sejak tahun 1970-an, dengan menganggap pembelahan kelas sebagai kondisi yang tenang, beberapa ilmuwan gerakan sosial sebenarnya telah memperlihatkan karakter pascaindustrial dan pascamateri dari gerakan-gerakan baru yang menjadi fokus mereka.

Dengan berteori tentang apa yang disebut gerakan sosial baru, karya-karya para ilmuwan gerakan sosial seperti Alberto Melucci dan Alain Touraine mengkhususkan perhatian mereka pada beberapa karakteristik gerakan sosial dalam masyarakat yang terpogram (atau pascaindustri). Karena kontrol informasi merupakan sumber utama kekuasaan sosial, konflik-konflik diharapkan untuk berpindah dari tempat kerja ke bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, elaborasi informasi, sains dan teknologi, dan media massa. Aktor-aktor sentral dalam konflik yang baru tidak lagi terkait dengan produksi industri tetapi lebih pada penggunaan dan kontrol sumber daya kognitif dan simbolik. Dalam masyarakat-masyarakat kontemporer, investasi dalam penciptaan pusat-pusat aksi yang otonom bagi tindakan individu diperkirakan akan menghadapi ketegangan dengan kebutuhan integrasi yang lebih erat melalui peningkatan kontrol atas motif tindakan manusia. Sementara Touraine dan Melucci mengadopsi visi canggih tentang konflik-konflik sosial utama dan penyebabnya, yang memberi bobot pada pengembangan apa yang bisa disebut kesadaran kelas, penelitian empiris tentang basis sosial "gerakan sosial baru" difokuskan pada posisi kelas dari para pemrotes. Dengan kecenderungan untuk membuat generalisasi dari beberapa gerakan dan beberapa negara, kajian-kajian memperlihatkan bahwa beberapa posisi kelas menengah – seperti pekerja kerah putih di lembaga layanan publik – lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam bentuk-bentuk perseteruan daripada, misalnya, para pekerja kerah biru.

› Kebangkitan konflik-konflik kelas

Sementara teori-teori dan analisis empiris ini berguna untuk menerangkan beberapa karakteristik politik perseteruan di wilayah tertentu di dunia pada momen-momen tertentu dari masa berkembangnya negara kesejahteraan, prediksi tentang berakhirnya konflik-konflik perburuhan dan protes-protes sebagai arena kelas menengah terbukti tidak akurat.

Pertama, bentuk kapitalisme Barat tidak hanya terbukti tidak menjadi model ke arah mana ekonomi dan masyarakat lain bergerak, tetapi bahkan di Barat pun kapitalisme justru mengembangkan bentuk-bentuk yang lebih eksploitatif daripada yang diprediksi oleh para teoretisi tentang masyarakat terprogram. Menurunnya pekerja industri tidak menghasilkan penurunan eksploitasi tenaga kerja. Sebaliknya, bersamaan dengan prekariatisasi kondisi kerja, proletarisasi kelas menengah menjadi lazim, dengan ditandai menurunnya otonomi serta gaji pada banyak profesi maupun pekerjaan kerah putih di sektor jasa. Seperti yang ditunjukkan David Harvey, dengan merujuk pada analisis Karl Marx, penciptaan laba melalui spekulasi finansial tumbuh sebagai alternatif atas penciptaan laba melalui produksi guna mengatasi masalah akumulasi yang berlebihan. Bersama dengan bentuk-bentuk akumulasi yang berorientasi pada reproduksi yang diperluas, dan dengan bagian dari nilai-lebih yang diinvestasikan kembali dalam produksi, pertumbuhan akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) telah terjadi, yang mengingatkan kembali pada akumulasi modal yang sejatinya (*original accumulation of capital*) yang terjadi melalui perluasan hubungan-hubungan khusus dengan formasi-formasi sosial non-kapitalis.

Konflik-konflik yang muncul kembali di seputar kondisi kerja menyasar pada

»

Protes di Cile pada tahun 2019. Kredit: Diego Correa/Flickr. Beberapa hak dilindungi.

masalah-masalah, yang terkait dengan apa yang Michael Burawoy klasifikasikan sebagai gerakan sosial melawan rekomodifikasi (pencabutan perlindungan sosial yang telah diperoleh); gerakan sosial menentang komodifikasi bidang-bidang kegiatan yang baru; dan gerakan sosial melawan ex-komodifikasi, didefinisikan sebagai pengenyahan komoditas yang ada sebelumnya dari pasar, seperti misalnya menyingkirkan para pekerja lama dari pasar kerja. Ketika logika akumulasi berdampak pada bentuk mobilisasi kolektif, kita dapat memperkirakan kemunculan protes-protes yang mengikuti logika yang berbeda karena adanya karakteristik khusus dari kapitalisme finansial yang meningkatkan fragmentasi kelas.

› Konflik-konflik kelas di era neoliberalisme mutakhir

Selain perdebatan tentang tren luas dari bergantinya proses-proses terbentuknya tatanan masyarakat, proses siklus jangka menengah dalam evolusi kapitalis juga harus dipertimbangkan ketika memperhatikan kondisi-kondisi yang mendorong kebangkitan konflik kelas di saat terjadinya krisis kapitalisme neoliberal. Dalam karya besarnya, Transformasi Besar (*The Great Transformation*), Karl Polanyi mengkhususkan perhatiannya pada gerakan ganda antara perlindungan sosial dan pasar bebas dalam perkembangan kapitalis. Sedangkan sebagai transformasi besar kedua, kapitalisme neoliberal didasarkan pada ideologi dominasi ekstrem pasar atas masyarakat, bukan dominasi sosial atas pasar.

Tren umum dari gerakan-gerakan maupun gerakan-kontra pemikiran Polanyi itu melekat dalam berbagai jenis kapitalisme yang berbeda yang tumbuh berdampingan dalam periode sejarah yang sama. Pertama-tama, seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan sistem dunia, kapitalisme mempunyai beragam bentuk di negara-negara inti, semi-pinggiran, dan pinggiran (*core, semi-periphery, and periphery*). Studi-studi tentang gerakan buruh telah mengkritik kecenderungan generalisasi tren geopolitik yang spesifik di tingkat global tersebut dengan menunjukkan bahwa ketika para pekerja industri mungkin memang mengalami penurunan di Barat, namun hal ini tidak terjadi di kawasan-kawasan Global Selatan. Kedua, Peter Hall, David Soskice, dan yang lainnya telah menaruh perhatian khusus pada variasi yang berbeda-beda dari kapitalisme yang menerapkan ekonomi pasar bebas di mana pasar merupakan elemen utama dari interaksi dan hubungan-hubungan, yang berlawanan dengan ekonomi pasar yang terkoordinasi. Penelitian akhir-akhir ini telah membahas perbedaan adaptasi dari variasi kapitalisme dalam Transformasi Besar kedua dan krisisnya selama Resesi Besar. Ketidakpuasan muncul dengan bentuk yang berbeda-beda yang berkaitan dengan ciri-ciri spesifik, saat berlangsungnya, dan intensitas dari krisis keuangan tersebut serta respons politik terhadapnya. Di negara-negara inti dan negara-negara pinggiran, apa yang

»

digambarkan oleh Beverly Silver sebagai jenis perjuangan kelasnya Polanyi dalam membela hak-hak lama berinteraksi dengan campuran berbeda-beda, dengan gerakan-gerakan sosial proaktif yang khas-Marx yang menantang sistem produksi yang ada.

› Agensi gerakan sosial

Sementara refleksi dalam kondisi ekonomi politik yang kritis ini memberikan wawasan yang berguna bagi analisis-analisis tentang basis-basis kelas dari konflik sosial, kapasitas berbagai kelompok sosial untuk membangun organisasi yang otonom maupun untuk menduduki posisi kekuasaan institusional merupakan pertanyaan terbuka yang dapat dipelajari oleh kajian-kajian gerakan sosial. Dengan kata lain, kajian-kajian gerakan sosial dapat menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan antisistemik dan/atau gerakan-gerakan kontra diciptakan melalui agensi dan muncul dalam konteks relasional yang luas. Dalam melakukan hal ini, kajian-kajian tersebut mungkin dapat berkontribusi untuk mendorong analisis tentang kelas yang jauh dari pendekatan strukturalis, dengan mempertimbangkan peran sumber-sumber daya bagi mobilisasi maupun peran dimensi politik yang otonom.

Yang terutama, ketika para ilmuwan Gerakan Sosial Baru berbicara tentang momen yang berbeda dalam perkembangan kapitalis, mereka membantu dalam menarik perhatian pada faktor-faktor penentu struktural dari konflik, sementara pada saat yang sama menyoroti pentingnya proses identifikasi. Dalam pengertian ini, mereka menentang penafsiran strukturalis terhadap Marxisme, yang telah dikontribusikan oleh pendekatan neo atau pasca-Marxis yang di antaranya untuk mengatasi [pemahaman tersebut] tanpa melakukan banyak penelitian tentang pengembangan spesifik sumber daya organisasi dan gagasan yang menjelaskan pergeseran dari struktur ke tindakan.

Mengenai hal ini, beberapa elemen yang ditunjukkan oleh pendekatan Gerakan Sosial Baru tetap relevan untuk memahami konflik kontemporer. Misalnya, pentingnya kontrol pengetahuan sebagai lawan dari menurunnya kepemilikan material atas alat-alat produksi, atau penolakan terhadap konsepsi hierarkis publik di negara-negara kesejahteraan yang mendukung definisi hak milik bersama, tetap penting dalam mobilisasi saat ini. Bukan suatu hal yang kebetulan, analisis Marxis baru-baru ini tentang gerakan sosial di era neoliberal, seperti yang dilakukan oleh Colin Barker, secara luas merujuk pada Melucci dan Touraine, khususnya ketika mereka menekankan pentingnya pengetahuan untuk wacana-wacana perlawanan berdasarkan pengakuan adanya kebutuhan-kebutuhan yang radikal dan upaya mengatasi penalaran awam (common sense) yang dominan. Juga, penelitian tentang gelombang-gelombang panjang dalam politik perseteruan menggarisbawahi peran akumulasi sumber daya simbolis dan material perlawanan terhadap kapitalisme, konsolidasi repertoar-repertoar tertentu untuk melakukan protes, dan stabilisasi saluran-saluran kelembagaan serta aliansi-aliansi dan jaringan-jaringan.

Seperti terlihat dalam studi baru-baru ini, bentuk dan intesitas perkembangan ekonomi konjungtural begitu juga perkembangan politik dari krisis tersebut memiliki efek yang relevan pada bentuk dan intensitas pertarungan. Analisis komparatif tentang gerakan sosial di negara-negara pinggiran Eropa telah menantang hipotesis yang meluas dalam kajian-kajian sosiologi perburuhan dan gerakan sosial bahwa gerakan-gerakan progresif berkembang pesat di era kemakmuran, ketika para pekerja memiliki kekuatan struktural, dan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan margin yang lebih tinggi untuk menginvestasikan keuntungan dalam peningkatan gaji dan pajak guna mendukung pembiayaan bagi [program] kesejahteraan. Analisis semacam itu menunjukkan bahwa pada tempat-tempat di mana krisis lebih menguat, khususnya di negara-negara seperti Islandia, Yunani, dan Spanyol, maka [krisis tersebut] akan memicu tingkat aktivitas yang lebih tinggi, dengan repertoar-repertoar aksi maupun bentuk-bentuk dan klaim-klaim organisasi yang baru dan bahkan mampu meraih keberhasilan politik. Namun demikian, refleksi tentang tantangan-tantangan yang berbeda bagi para aktor yang berseteru di masa kemakmuran versus masa krisis tetaplah relevan. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian tentang aktivisme buruh, krisis memang dapat diatasi melalui penciptaan sumber-sumber daya solidaritas selama protes berlangsung. Pemogokan panjang atau pendudukan pabrik, seperti berkemah di lapangan-lapangan atau demonstrasi para penganggur yang menjadi ciri protes anti-penghematan, memang dianalisis sebagai reaksi terhadap krisis yang kemudian menciptakan berbagai gagasan dan praktik inovatif. Dalam teori "krisis organik"nya Gramsci ketika krisis hegemoni kelas penguasa terjadi dalam beberapa kondisi politik dan sosial, militansi lokal dapat menyatu menjadi sebuah gerakan sosial yang lebih luas.

› Catatan penutup

Sebagai kesimpulan, pandangan kaum strukturalis tentang kelas cenderung mengabaikan cara-cara di mana kesempatan-kesempatan politik memediasi efek sosial-ekonomi serta proses mobilisasi sumber daya, yang selama ini telah menjadi fokus utama dari kajian-kajian gerakan sosial. Menjembatani kajian gerakan sosial dengan ekonomi politik (yang kritis) sangatlah penting untuk memahami keragaman, intensitas, dan waktu kemunculan dari gerakan-gerakan sosial yang telah dimobilisasi di berbagai belahan dunia dalam kurun waktu berbeda-beda, bertentangan dengan krisis kapitalisme neoliberal. Untuk melakukan ini, teori gerakan sosial harus lebih terlibat dengan analisis kritis tentang transformasi kapitalis yang menyelidiki proses akumulasi dan eksploitasi saat ini. Pada saat yang sama, analisis transformasi struktural kapitalisme dapat mengambil manfaat dari teori gerakan sosial: dengan menaruh perhatian pada mobilisasi atas ketidakpuasan-ketidakpuasan yang muncul. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Donatella della Porta <donatella.dellaporta@sns.it>

› Penghormatan bagi Pemikir Marxis Afrika Terkemuka,

Samir Amin

oleh **Vishwas Satgar**, Universitas Witwatersrand, Afrika Selatan dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Ekonomi dan Masyarakat (RC02) dan Gerakan Buruh (RC44)

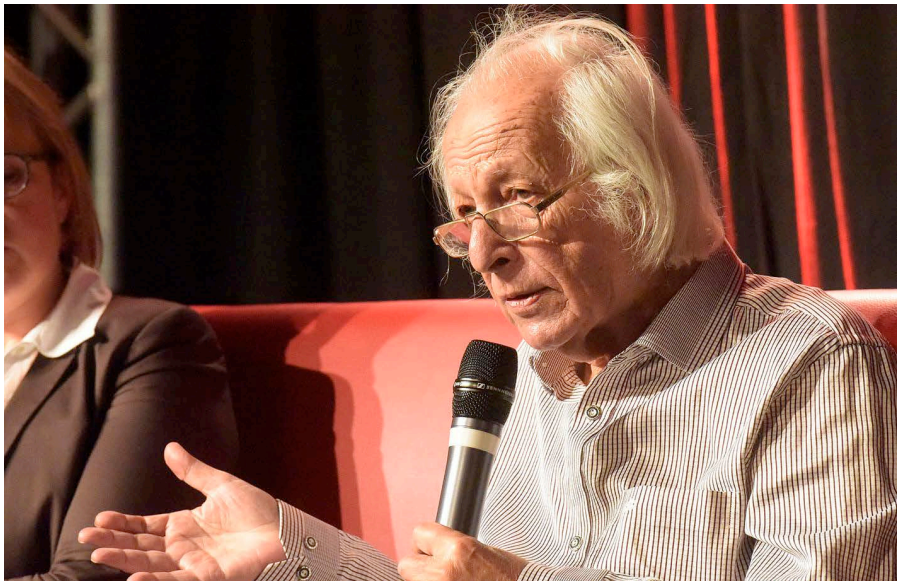

Samir Amin di Berlin, 2016. Kredit: Flickr. Beberapa hak dilindungi.

Samir Amin meninggal pada tanggal 12 Agustus 2018. Sejarah pemikiran Afrika abad ke dua puluh tidak akan lengkap tanpa mengakui sumbangannya. Perjalanan intelektualnya terjadi bersamaan dengan momen-momen penting dalam pembentukan Afrika modern: (i) bangkitnya nasionalisme Arab; (ii) pembelokan ke kiri di masa pascakolonial termasuk kebangkitan sosialisme dan sosialisme ilmiah Afrika; (iii) kontrol neokolonial melalui ketergantungan; (iv) kekalahan Pan-Afrikanisme dalam konteks reformasi ekonomi (*structural adjustment*) dan Perang Dingin; dan (v) proses globalisasi Afrika. Amin mengalami itu semua, mempelajarinya, dan bergulat secara intelektual dengannya.

Amin menulis sebagai seorang Marxis independen, menyusun agenda riset yang bersumber dari disertasi PhDnya (1957) yang meneliti keterbelakangan dan mekanisme-mekanismenya. Karya ini kemudian diterbitkan dengan judul *Accumulation on a World Scale – A Critique of the Theory of Underdevelopment* (1974) (*Akumulasi Berskala Dunia – Suatu Kritik terhadap Teori Keterbelakangan*). Amin adalah seorang intelektual yang melintas batas, tidak pernah dikekang oleh pengotakan ilmu. Ia memberi sumbangan-sumbangan penting bagi teori Marxis, analisis sistem dunia, teori pembangunan, analisis konjungtural tentang geopolitik global, usulan-usulan strategis, dan secara konsisten membela pentingnya sosialisme. Sosiologi telah memperoleh manfaat dari karya-karya Amin, yang juga diakui oleh ilmu ekonomi, hubungan internasional, teori pascakolonial, studi pembangunan, dan ilmu-ilmu lain. Dalam konteks Afrika, Amin ikut mendirikan Konsil Pengembangan Penelitian Ilmu Sosial di Afrika (CODESRIA) pada tahun 1973, dan menjadi Sekretaris Eksekutifnya. Lembaga ini telah mempengaruhi sekurangnya tiga generasi ilmuwan sosial dan ikut memajukan komunitas ilmu sosial Afrika.

Sebagai seorang Marxis, Amin tidak pernah terikat pada ortodoksi. Pendekatannya adalah dengan belajar dari Marx; Marx itu titik berangkat tetapi metode Marxis menuntut memberikan "jawaban Marxis bagi tantangan-tantangan saat ini." Ini membutuhkan inovasi konseptual dalam teori Marx tentang kapitalisme dan materialisme sejarah. Dalam hal ini, Amin tidak mendekati kapitalisme dengan definisi abstrak yang berpusat pada relasi modal-buruh. Bagi Amin, pendekatan semacam itu berakhir dengan ekonomisme dan pandangan yang "bertahap" mengenai evolusi kawasan-kawasan pinggiran, yang berarti bahwa "pinggiran terbelakang" harus mengejar ketertinggalan dari kawasan-kawasan pusat yang maju. Beda dengan itu, Amin percaya pentingnya memikirkan kapitalisme sebagai sistem dunia, sebagai unit analisis yang utama, dan pada tingkat abstraksi yang paling tinggi. Ini membutuhkan pemahaman sejarah tentang kapitalisme, analisis konkret mengenai imperialisme kekinian, dan analisis-analisis konjungtural. Amin kemudian berinovasi dengan konsepsi Marx tentang nilai dan menempatkannya dalam kapitalisme global. Ia mengembangkan suatu konsepsi tentang rente imperialis (*imperial rent*), pembangunan yang timpang, dan polarisasi global sebagai hal-hal yang inheren dalam sistem kapitalisme global. Yang

»

penting dalam teorinya tentang imperialisme adalah konsepsinya tentang tahap global kapitalisme monopolistik dengan lima jenis monopoli yaitu senjata pemusnah massal, teknologi, aliran finansial, sumber daya planeter, dan komunikasi. Dari perspektif ini "mengejar ketinggalan" yang dilakukan kawasan-kawasan pinggiran adalah sebuah delusi.

Pada saat universitas-universitas baik di Utara Global maupun Selatan sedang bergelut dengan tantangan dekolonialisasi, karya Marxisme Samir Amin yang non-Eurosentris (*non-Eurocentric*) menjadi penting dan baru. Ia juga membangun jembatan dan ruang dialog dengan orang-orang yang, dalam gairah dekolonisasi mereka, bersemangat untuk membuang Marxisme sebagai pemikiran Eurosentris. Amin menggugat momen Eurosentris dalam Marx, historiografi kapitalisme, dan modernitas Barat. Ia melakukannya dengan berinovasi terhadap gagasan "moda produksi tambahan" dan menempatkan kategori ini pada rentetan sejarah yang menunjukkan bahwa Eropa sebenarnya merupakan kawasan pinggiran dari peradaban prakapitalisme. Eropa datang belakangan ke dalam peradaban, dan karena transisinya yang beragam dari feodalisme ke kapitalisme, yang mengganggu sentralisasi surplus, Eropa bisa membangun diri seperti itu. Eropa berhasil membangun bukan karena keunggulan orang Kulit Putih dan eksepsionalisme. Ada kebetulan-kebetulan sejarah yang ikut membentuk sistem dunia sejak abad ke enam belas. Amin juga menggugat Erosentrisme dan keterkaitannya dengan ekonomisme, dengan mengajukan pendapat tentang pentingnya aliansi buruh dan petani di kawasan-kawasan pinggiran kapitalisme. Analisis kelas Marxis dan politik hendaknya tidak mereduksi agensi politik menjadi sekedar proletariat industrial. Lebih lanjut, ramalan-ramalan dini Amin dalam *Empire of Chaos* (1992), dalam mana aliansi blok Eropa pimpinan Amerika Serikat dan Jepang akan terus tanpa henti mereproduksi dan meluaskan pasar kapitalis mereka, menggarisbawahi pentingnya dekolonialisasi.

Konsepsi Samir Amin yang strategis tentang pemutusan hubungan (*delinking*), yang bukan membahas swasembada (*autarky*), juga menjadi dasar bagi proyek-proyek nasional-populer di berbagai negara dan daerah untuk menjamin agar proyek kedaulatan dibentuk oleh keharusan dekolonialisasi. Jadi, bagi Amin masalah utamanya adalah kendali terhadap hubungan antara negara-negara di kawasan pinggiran dengan kapitalisme global. Amin tidak mendukung reformasi ekonomi menurut cara monopoli global dan negara-negara pusat. Karena itu menurut pendapatnya, liberalisasi nilai tukar, swastanisasi perbankan, dan globalisasi pertanian, misalnya, semuanya bertentangan dengan pembangunan nasional.

Pada intinya, *delinking* merupakan proyek nasional-populer yang dibentuk oleh tiga kecenderungan: peran sentral negara (*statist*), kapitalis, dan sosialis. Amin membayangkan tiga kecenderungan ini didukung oleh suatu aliansi kelas (di negara-negara pinggiran ini berarti aliansi buruh dan petani) yang memimpin proyek ini. Masing-masing kecenderungan ini akan bertabrakan, bertentangan, dan bersaing satu sama lain untuk mengarahkan proyek nasional-populer tersebut. Mengikuti perkembangan gagasannya tentang *delinking*, ia secara jelas mengajukan beberapa syarat yang perlu bagi proses *delinking* itu.

Pertama, sebuah proyek nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat merupakan hal yang sangat penting. Ini tidak boleh dikurangi oleh jalinan hubungan dengan kapitalisme global. Contoh yang penting adalah kedaulatan pangan. Amin secara politis dan intelektual mendukung perspektif agraria yang menempatkan buruh tani, petani kecil, dan konsumen sebagai pemegang kendali sistem pangan. Sejak 1996, La Via Campesina, gerakan tani terbesar di dunia dengan lebih dari 200 juta orang anggota, ada di garis depan membela kedaulatan pangan sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan yang identik dengan rezim pangan yang dikendalikan oleh monopoli global. Amin menganggap penting kedaulatan pangan bagi pendekatan strategis *delinking*. Posisi semacam itu juga penting untuk berpikir tentang dekarbonisasi di dunia yang makin panas ini.

Kedua, *delinking* harus mempunyai dimensi regional atau subregional. Menurut Amin, meskipun negara merupakan fokus utama bagi *delinking*, ini harus dilakukan dalam konteks di mana blok politik dan ekonomi yang luas membangun relasi, misalnya di Afrika Selatan atau Afrika Barat, bahkan juga pada tingkat Afrika seluruhnya. Penataan regionalisasi semacam ini juga berarti membangun kekuatan yang perlu secara internal untuk mengendalikan hubungan dengan kapitalisme global. Artinya, *delinking* sebenarnya juga merupakan bentuk globalisasi alternatif yang digerakkan dari bawah dan bukan oleh kelas penguasa, monopoli global, dan aliansi pimpinan Amerika Serikat.

Ketiga, *delinking* juga merupakan usaha mewujudkan pergeseran kekuasaan dari pusat dalam sistem dunia. Sebuah konsep yang dekat dengan delinking dan penting untuk mewujudkannya adalah gagasan tentang dunia yang polisentris. Gagasan semacam itu membayangkan kekuasaan dibagi-bagi melalui internasionalisme. Pada masa hidup Amin, antara 1955 dan 1975, gerakan Non-Blok punya peran penting dalam dunia polisentris tersebut. Akan tetapi, setelah kekalahan dan kemunduran solidaritas Dunia Ketiga, pada tahun-tahun terakhir hidupnya Amin mulai menawarkan gagasan pentingnya organisasi Rakyat dan Buruh Internasional Kelima (*Fifth International of Peoples and Workers*). Amin mulai mengkritik keterbatasan Forum Sosial Dunia (*World Social Forum)* dan mencari dasar baru bagi solidaritas internasional yang berakar pada tinjauan kritis terhadap internasionalisme historis. Usulannya saat ini ditanggapi serius oleh banyak pihak, mengingat bangkitnya ancaman sayap kanan di dunia dan krisis sistemik kapitalisme global yang memburuk, termasuk krisis iklim.

Kami yang berada dalam konteks Afrika yang mengenal Samir Amin dan bernalar tentang dunia dalam dialog dengan pemikirannya sangat kehilangan karena kepergiannya. Issa Shivji, seorang ilmuwan sosial Afrika yang terkemuka, melukiskan realitas ini sebagai berikut: "Sebatang pohon Baobab telah tumbang." ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Vishwas Satgar
<Vishwas.Satgar@wits.ac.za>

› I. Wallerstein:

Seorang Sosiolog dan Intelektual yang Menjulang Tinggi

oleh **Sari Hanafi**, American University di Beirut, Lebanon dan Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional (2018-2022), dan **Stéphane Dufoix**, Universitas Paris Nanterre dan Institut universitaire de France, serta anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sejarah Sosiologi (RC08)

Immanuel Wallerstein di Universitas Eropa di Saint Petersburg, 2008. Foto oleh Alexei Kouprianov/Creative Commons.

Banyak peristiwa telah menggelisahkan komunitas sosiologi kita dalam beberapa bulan terakhir ini. Tiga orang sosiolog terkemuka telah berpulang: Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano, dan Erik Olin Wright. Namun Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA) pada khususnya berutang budi pada Wallerstein, yang pernah menjadi presidennya antara 1994 dan 1998. Beliau adalah penulis buku unggulan empat jilid yang banyak dipuji, *The Modern World-System*, yang mengusulkan analisis sistem dunia untuk melupakan teori modernisasi yang dominan – suatu analisis yang sekarang masih tetap sama memukaunya seperti di tahun 1970-an, tatkala beliau mulai menulis. Dengan berargumen bahwa ekonomi, politik dan sosiobudaya bukan arena tindakan

»

sosial yang otonom dan dengan menyerukan agar semua analisis secara simultan bersifat historis dan sistemik, ia menggeser pusat sosiologi ke seputar sejarah komparatif, ekonomi politik, dan teori-teori kapitalisme, meletakkan dasar bagi sosiologi antikolonial dan poskolonial.

Kontribusinya yang sangat besar bagi organisasi ialah "membuka" ISA dengan menjalin kontak langsung dengan para anggotanya dengan memulai tradisi penyampaian surat presiden kepada para anggota, dan dengan mengorganisasi konferensi-konferensi regional yang memupuk sosiolog generasi baru yang di kemudian hari akan menjadi pimpinan sosiologi nasional mereka maupun ISA.

Diterjemahkannya buku Wallerstein dalam banyak bahasa membuktikan pengaruhnya di seluruh dunia. Di dunia Arab lima di antara buku-bukunya dan banyak artikelnya diterjemahkan, dan persahabatannya dengan tokoh teori ketergantungan Samir Amin menjadikannya salah seorang pahlawan dunia Arab. Situasi ini merupakan suatu hal yang kompleks untuk dianalisis. Pada pandangan pertama, dalam buku-buku yang penting seperti *Unthinking Social Science* (1991) atau laporan Komisi Gulbenkian mengenai restrukturisasi yang diketuainya (1996), sangat sedikit ilmuwan sosial non-Barat yang dirujuk (Samir Amin dalam [buku] yang disebut pertama, dan Engelbert Mveng dalam [komisi] yang disebut kemudian). Namun suatu pandangan lebih dekat menunjukkan bahwa Pusat Fernand Braudel yang diketuainya di Universitas Binghamton merupakan suatu tempat di mana banyak ilmuwan sosial Amerika Latin dari kelompok Modernitas/Kolonialitas (seperti Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, dan Ramón Grosfoguel) menemukan suatu tempat berlabuh atau setidaknya suatu tempat untuk menyajikan analisis mereka di tahun 1990-an. Di samping itu, dalam Pidato Presidennya pada tahun 1998 sebelum Kongres Dunia Sosiologi ke-XIV di Montreal, tantangannya yang kedua (dari enam) terhadap "budaya sosiologi" tradisional ditujukan pada Eurosentrisme, dan ia menyampaikan kutipan panjang dari karya sosiolog Mesir dan Prancis Anouar Abdel-Malek.[1]

Secara dini pada tahun 1971, mengingat bahwa pembagian disiplin ilmu yang didirikan pada akhir abad kesembilan belas "tidak lagi mempunyai tujuan heuristis,"[2] Wallerstein menyerukan penyatuan kembali ilmu-ilmu sosial dengan humaniora dan sejarah. Ia mendorong kreasi ulang terhadap ilmu-ilmu tersebut dengan menerima bahwa "rasionalitas melibatkan pemilihan suatu politik moral dan bahwa peran kelas intelektual ialah untuk mengiluminasi pilihan-pilihan sejarah yang kita miliki bersama," sebagaimana dirumuskannya dalam *The End of the World as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century*. Ia berargumen bahwa tanpa "rasionalitas substantif" ini, para ilmuwan sosial akan menjadi tidak relevan secara sosial. Dalam komentar akhirnya pada tanggal 1 Juli 2019, ia mendorong kita untuk bersifat relevan: "Dunia dapat semakin menurun ke jalan-jalan simpang lebih lanjut. Atau mungkin juga tidak. Saya telah mengindikasikan di masa lalu bahwa saya berpikir bahwa perjuangan yang menentukan adalah suatu perjuangan kelas… Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang akan hidup di masa mendatang ialah untuk berjuang dengan diri mereka sendiri sehingga perubahan ini mungkin merupakan suatu perubahan yang nyata."

Ia percaya pada suatu krisis akhir dari kapitalisme, namun intelektual yang menjulang tinggi ini meninggalkan kita jauh sebelum suatu dunia yang lebih baik dapat dimungkinkan. ■

1. Wallerstein, I. (January 1999) "The Heritage of Sociology, the Promise of Social Science." *Current Sociology* 47(1): 1-37.

2. Wallerstein I. (November 1971) "There is No Such Thing as Sociology." *The American Sociologist* 6(4): 328.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb>
Stéphane Dufoix <stephane.dufoix@wanadoo.fr>

› I. Wallerstein:

Memberikan Koherensi Baru kepada Sosiologi

oleh **Frank Welz**, Universitas Innsbruck, Austria dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sejarah Sosiologi (RC08) dan Teori Sosiologi (RC16), dan **Anand Kumar**, Senior Fellow, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, India

"Ia mengutamakan kebutuhan untuk menjadi seorang sosiolog yang terlibat, tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga sebagai seorang guru sosiologi."

Sebagai hasil refleksi mengenai Kongres Dunia ISA tahun 2018 yang dipublikasikan di *Canadian Review of Sociology*, Frédéric Vandenberghe dan Stephan Fuchs menekankan bahwa "sosiologi telah hilang". Bagi mereka, suatu disiplin yang terfragmentasi telah kehilangan akar dan identitasnya. Salah satu dari pandangan global terkuat yang melawan fragmentasi dan spesialisasi dalam sosiologi adalah Immanuel Wallerstein. Wafatnya pada 31 Agustus 2019 pada usia 88 tahun merupakan suatu kehilangan besar bagi ilmu-ilmu sosial. Beban tanggung jawab yang sekarang diserahkan kepada kita–komunitas sosiolog global–sekaligus juga warisan keilmuwanan yang ditinggalkannya, sangatlah luar biasa. Terinspirasi oleh ide pokok Immanuel Wallerstein sejak akhir tahun 1970-an (ketika Anand Kumar melakukan studi di bawah bimbingannya di Binghamton) melalui serangkaian pertemuan yang panjang (tahun 1999 kami bersama melakukan video–wawancara dengannya di Paris[1]), kami akan mencoba mempresentasikan beberapa di antara idenya yang kami pikir paling relevan bagi sosiologi kontemporer.

Pertama, terkait dengan unit analisis: Ketika sosiologi internasional memperdebatkan "nasionalisme metodologis" dalam sosiologi pada peralihan abad yang baru (misalnya U. Beck, D. Chernilo), Wallerstein telah mengganti unit analisis ilmu sosial di tahun 1960-an ketika dia memutuskan bahwa ia tidak bisa mempelajari Afrika Barat pasca-kolonial sebagai masyarakat-masyarakat nasional tetapi hanya sebagai suatu bagian dari sistem sejarah dunia–titik berangkat dari mana dia membangun bukunya yang empat-volume: "Sistem Dunia Modern" (*The Modern World-System*). Kedua, menyasar metode kami (epistemologi) untuk memahami ilmu sosial, seruan awal Wallerstein untuk suatu ilmu sosial yang relasional telah menjadi tantangan penting dan menjanjikan bagi ilmu-ilmu sosial. Dengan menggunakan ide Ilya Prigogine tentang kompleksitas ilmu pengetahuan, di tahun 1990 Wallerstein mulai berargumen bahwa ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan akan menemukan medan baru bersama dalam ilmu-ilmu sosial (mengembalikan sosiologi ke pusat) dengan menggantikan pandangan dunia Newton mengenai repetisi, stabilitas, dan ekuilibrium dengan pandangan baru kajian kompleksitas mengenai suatu dunia historis dengan instabilitas, evolusi, dan fluktuasi. Seiring dengan pandangan ini, determinasi ekonomi neoklasik mengenai suatu ekuilibrium umum adalah salah. Juga, praktik tradisional kita dalam memisahkan ekonomi (bagi ilmu ekonomi), politik (bagi ilmu politik), dan sosiokultural (bagi sosiologi atau ilmu kemanusiaan) adalah salah. Analisis satu fenomena harus memperhitungkan pula hubungan relasional yang dibangun oleh yang lain. Sebagai contoh, etnisitas tidak bisa semata-mata hanya dianggap sebagai suatu warisan budaya masa lalu tetapi pada waktu yang bersamaan juga sebagai suatu moda strategi yang diterapkan dari atas dalam masyarakat untuk terus mengorganisasi masyarakat strata bawah (secara ekonomi) dan (secara politik) sebagai moda resistensi dari bawah ke atas[2]. Ketiga, agenda terselubung di balik penekanan Immanuel Wallerstein pada perkiraan epistemologi dan ontologi dalam sosiologi adalah komitmen Wallerstein untuk memperkuat koherensi dan efektivitas disiplin kita ini. Sudah sejak tahun 1990-an, sebagai presiden ISA, dia telah mengkritik pembelah sosiologi secara terus-menerus ke dalam bagian-bagian yang semakin kecil, suatu hal yang hanya bisa diatasi dengan memikirkan ulang sumber-sumber intelektual sosiologi yang dimiliki bersama.

Pada akhirnya, ia mengutamakan kebutuhan untuk menjadi seorang sosiolog yang terlibat, tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga sebagai seorang guru sosiologi. Ia melakukannya dengan menjadi seseorang peserta yang konsisten sebagai seorang "intelektual organik" dalam gerakan untuk keadilan dan keharmonian–dari protes anti perang di tahun 1960-an hingga resistensi anti-apartheid tahun 1970-an-1980-an, dan di dalam sidang-sidang Forum Sosial Dunia dari Afrika hingga Amerika Latin. Singkatnya, Immanuel Wallerstein akan dikenang sebagai seorang guru besar yang tidak hanya mengonfrontasi batas "sosiologi Barat" di tahun 1960-an tetapi juga merevitalisasi sosiologi di separuh abad berikutnya dengan membangun serangkaian konsep, teori, dan metode yang baru (pendekatan Sistem Dunia) untuk lebih memahami dinamika masyarakat kemanusiaan–khususnya "abad keenam belas yang panjang" dan guncangan abad kedua puluh. ■

1. Wawancara video dengan Immanuel Walletstein oleh Anand Kumar dan Frank Welz, 1999, https://www.youtube.com/playlist?list=PL49D592A64200367F.

2. Kumar, A. and Welz, F. (2001) "Culture in the World-System. An interview with Immanuel Wallerstein." *Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture* 7(2): 221-231.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Anand Kumar <anandkumar1@hotmail.com>
Frank Welz <frank.welz@uibk.ac.at>

› Karavan Migran

sebagai Strategi Mobilitas di Amerika Tengah

oleh **Veronica Montes**, Bryn Mawr College, AS

Para migran menetap di stadion Jesus Martinez di Mexico City. Kredit: Veronica Montes

Suatu siang di musim semi Mei 2019, saya kembali berjumpa dengan Lucia dan Hector. Ini adalah kali ketiga saya menjumpai mereka dalam rentang waktu enam bulan. Kali ini mereka berada di kota Tijuana di perbatasan AS-Meksiko. Lucia dan Hector adalah bagian dari ribuan migran asal Amerika Tengah yang menyeberangi wilayah Meksiko pada bulan Oktober dan November 2018 dalam rombongan yang dikenal dengan karavan Amerika Tengah. Para migran memakai karavan tersebut sebagai suatu strategi mobilitas untuk mencapai perbatasan AS-Meksiko. Pertemuan pertama kali saya dengan mereka terjadi di Meksiko City tanggal 5 November 2018, saat saya mengunjungi stadion yang dipakai sebagai tempat singgah bagi ribuan peserta karavan tadi yang mulai berdatangan ke kota itu tanggal 3 November.

Karavan yang pertama–totalnya ada empat pada 2018–berangkat pada tanggal 12 Oktober dari kota San Pedro Sula, Honduras dan tiba di Tijuana, Meksiko pada tanggal 12 November. Migrasi orang-orang Amerika Tengah yang menyeberangi wilayah Meksiko dengan tujuan ke Amerika Serikat itu bukan hal baru. Menurut Marta Sánchez Soler, koordinator Mesoamerican Migrant Movement (MMM), sekitar 800 hingga 1.000 migran Amerika Tengah masuk ke Meksiko tiap harinya. Diperkirakan bahwa di tahun 2014 misalnya, sekitar 392.000 migran Amerika Tengah menyeberangi wilayah Meksiko, dan sedikit turun angkanya menjadi 377.000 di tahun 2015. Jika kehadiran orang Amerika Tengah yang melintasi batas wilayah Meksiko bukan hal baru, mengapa karavan migran tersebut menarik perhatian sedemikian banyak orang secara nasional dan internasional?

Organisasi-organisasi pembela hak-hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa penculikan massal para migran di Meksiko telah menjadi sistem pemerasan skala besar yang permanen. Dalam bukunya *Violencias y migraciones centroamericanas en México*, María Dolores París Pombo menyatakan bahwa para migran dieksploitasi dalam pasar seksual dan kriminal di sepanjang rute migrasi dari sisi sebelah selatan sampai utara perbatasan Meksiko. Dalam konteks ini, kemunculan ribuan migran Amerika Tengah merupakan strategi mobilitas yang memungkinkan mereka bepergian melewati wilayah Meksiko secara aman, terjangkau secara ekonomi, dan cepat mencapai perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Jadi, meskipun strategi membentuk karavan untuk menyeberangi wilayah Meksiko bukan hal baru, kali ini kombinasi beberapa faktor membuatnya berbeda. Pertama, ada jumlah yang sangat banyak dan keragaman manusia yang luar biasa – keluarga-keluarga muda, ibu-ibu orangtua tunggal dengan anak-anak, pemuda-pemuda lajang, anak-anak tanpa wali, orang LGBTQ, dan sejumlah orang lanjut usia dan penyandang disabilitas – yang dengan cepat bergabung dengan karavan. Kedua, ketangkasan organisasi mereka. Ketiga, adanya tekad ribuan orang Amerika Tengah untuk berjalan di sepanjang jalan raya utama, menuntut hak untuk singgah melewati wilayah itu secara merdeka dan aman.

Mengapa orang-orang itu pergi meninggalkan rumah mereka, membahayakan keluarga, dan menuju perbatasan AS-Meksiko? Jawabannya rumit dan tiap negara di kawasan Amerika Tengah punya latar belakang sejarahnya sendiri. Laporan terbaru berjudul *"Disorder by design: a manufactured U.S. emergency and the real crisis in Central America"* (Kekacau-

»

Berupaya untuk senantiasa menyediakan informasi kepada para migran perihal hak dan alternatif mereka. Kredit: Veronica Montes.

an yang disengaja: keadaan darurat buatan Amerika Serikat dan krisis sesungguhnya di Amerika Tengah), yang diterbitkan oleh International Rescue Committee (Komite Penyelamatan Internasional) memberikan sedikit gambaran mengenai latar belakang yang mengakibatkan migrasi tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa para pencari suaka asal Salvador yang sampai ke Amerika Serikat datang dengan faktor-faktor stress psikososial parah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga sebagai akibat dari perang saudara berkepanjangan, kekerasan oleh negara, kemiskinan, bencana alam, dan akhir-akhir ini, kekerasan antar geng yang makin luas dan tanpa pandang bulu. Sejarah yang mirip juga terjadi di Guatemala yang diporak-porandakan oleh perang saudara selama 36 tahun–dari 1960 hingga 1996–dengan korban jiwa mendekati 200.000 orang dan kebanyakan keturunan masyarakat adat. Bagi Honduras, titik didihnya adalah tingginya tingkat korupsi, kudeta 2009, kemiskinan, dan kekerasan antar geng yang ekstrim yang telah mendorong ribuan orang Honduras meninggalkan negaranya. Dalam kondisi semacam itu, hidup menjadi sangat berbahaya dan membuat melarat jutaan orang Amerika Tengah.

Pada tanggal 11 November, kelompok pertama sekitar 300 orang dari karavan tersebut mulai berdatangan di Tijuana. Menurut satu laporan yang dikeluarkan oleh Colegio de la Frontera Norte (COLEF), sebuah lembaga penelitian yang terletak di Tijuana, sekitar 6.000 orang tinggal di suatu kompleks olah raga yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Dalam sebuah laporan yang diluncurkan pada tanggal 13 Desember, COLEF mendiskusikan lima kemungkinan skenario bagi orang-orang Amerika Tengah yang masih di Tijuana itu: (1) mencari suaka di Amerika; (2) mencari status pengungsi di Meksiko; (3) tinggal di Tijuana dan mencari kerja; (4) pemulangan sukarela atau paksa ke negara asal; dan (5) menyeberangi perbatasan AS-Meksiko secara diam-diam. Saya tambahkan skenario keenam: pindah ke kota lain di perbatasan AS-Meksiko. Kemungkinan terakhir ini dipilih oleh Lucia dan Hector. Perjumpaan saya yang kedua dengan mereka terjadi di Tijuana di akhir November 2018, beberapa minggu sebelum mereka pergi meninggalkan Tijuana menuju Reynosa, Tamaulipas–perjalanan sejauh 1.112 mil dan menuju salah satu kota perbatasan paling berbahaya di perbatasan Meksiko–dengan harapan, menurut mereka, akan mendapatkan pekerjaan di sektor konstruksi di kota itu.

Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diperoleh dari karavan 2018. Pertama, sebagai sebuah strategi mobilitas, karavan tersebut mewakili dualitas antara sorotan yang diberikannya kepada ribuan orang Amerika Tengah yang menyeberangi wilayah Meksiko dan tidak nampaknya para migran tersebut setelah mereka terdampar di perbatasan AS-Meksiko. Kedua, meskipun mobilisasi kolektif orang-orang yang bergabung dengan karavan merupakan salah satu faktor penentu yang membantu mereka kini sampai di perbatasan, mobilisasi kolektif itu sudah tidak ada karena orang telah berpencar-pencar ke Tijuana dan kota-kota perbatasan lain di Meksiko untuk mencari kelangsungan hidup mereka sendiri-sendiri. Hal itu membuat para peserta karavan berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketiga, karavan ini menunjukkan kepada dunia krisis migrasi yang terjadi di wilayah Amerika Tengah. Diperkirakan jumlah migran Amerika Tengah yang datang ke perbatasan AS-Meksiko bisa mencapai angka satu juta orang di penghujung 2019. Keempat, pemerintah Meksiko menghadapi satu persoalan yang rumit sebagai akibat dari krisis migrasi Amerika Tengah tersebut. Perbatasan sebelah selatan Meksiko tidak mempunyai infrastruktur untuk menampung ribuan migran–orang Amerika Tengah, Afrika, Kuba, Haiti dan migran antarbenua lainnya–yang terdampar di sana sambil menunggu untuk meneruskan perjalanannya ke perbatasan utara. Sementara itu, di perbatasan Meksiko sebelah utara, tempat-tempat singgah para migran disesaki ribuan orang yang berhasil sampai ke situ dan menunggu kesempatan untuk menyeberang ke AS baik untuk meminta suaka atau, kemungkinan terburuknya, menyeberang ke Amerika Serikat secara klandestin. Terakhir, saat ini ribuan migran asal Amerika Tengah menghadapi ketidakpastian dan kerentanan baik di Meksiko maupun di Amerika Serikat. Dalam banyak kasus, mereka bisa bertahan hidup berkat empati, solidaritas, dan belas kasih individu-individu dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menyokong dan menolong orang-orang seperti Lucia dan Hector yang sedang mencari kehidupan yang lebih baik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Veronica Montes
<vmontes@brynmawr.edu>

› Buffalo, NY:

Praktik Baik dalam Pemukiman Kembali Pengungsi

oleh **Aysegül Balta Özgen**, Pusat Kajian Etnisitas, Ras dan Imigrasi, Universitas Pennsylvania, AS dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Migrasi (RC31)

Erie County: Jumlah Imigran dan Pengungsi terbanyak dari 14 Negara Asal dari 2008 sampai 2016

Negara Asal	Jumlah Total (2008-2016)
Afghanistan	140
Burma	4.057
Bhutan	1.888
Burundi	79
Kongo	56
Republik Demokratik Kongo	958
Cuba	96
Ethiopia	77
Eritrea	321
Irak	1.322
Iran	54
Somalia	1.851
Sudan	176
Suriah	280

Buffalo Brief, Februari 2018, Partnership for the Public Good (PPG).

AS telah memiliki sistem pemukiman kembali pengungsi yang cukup baik sejak Undang-Undang Pengungsi 1980. Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri mengoordinasikan penerimaan pengungsi ke dalam negeri, dan Kantor Pemukiman Kembali di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengoordinasikan pemberian jasa setelah kedatangan mereka, bersama dengan sembilan lembaga sukarela. Sampai dengan pemangkasan jumlah oleh Presiden Trump beberapa tahun terakhir, AS terus-menerus merupakan negara penampungan pemukim paling besar di dunia, menerima sekitar 90.000 pengungsi setiap tahunnya. Pengungsi diterima secara permanen dan berada pada jalur cepat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Berbeda dengan migran kategori lainnya, mereka langsung berhak atas bantuan uang serta medis, di antara berbagai bantuan publik lainnya.

› Mengapa kota berskala menengah dan kecil?

Kesembilan lembaga sukarela yang disinggung di atas terlibat dalam perjanjian kerja sama dengan Departemen Luar Negeri, dan perwakilan mereka acap bertemu untuk mengevaluasi setiap kasus kedatangan pengungsi. Mereka memperhitungkan faktor-faktor seperti keluarga pengungsi yang bersangkutan yang sudah berada di AS, ketersediaan penerjemah, tempat tinggal, kelas bahasa Inggris, serta jasa kerja untuk menentukan di mana setiap pengungsi akan dimukimkan kembali. Sementara kota metropolitan besar seperti New York dan Los Angeles merupakan daerah tujuan imigran pada umumnya, belakangan ini kota berskala menengah dan kecil lebih dipilih sebagai tempat permukiman kembali pengungsi. Kota-kota yang lebih kecil memiliki biaya hidup yang lebih terjangkau, ketersediaan lebih banyak tempat tinggal, dan banyak di antaranya membutuhkan pertambahan populasi untuk kepentingan ekonominya.

Bufallo, New York merupakan salah satu kota berukuran menengah yang semakin banyak menampung pengungsi sejak 2006. Meskipun pada awalnya proses pemukiman ulangnya tak lepas dari tantangan, kini Buffalo menjadi model dari praktik baik. Lebih jauh, pengungsi memainkan peranan yang penting dalam revitalisasi kota bersangkutan.

Bufallo merupakan kota yang seperti banyak kota lainnya di wilayah *Rust Belt*–wilayah di Pertengahan Barat dan Timur Laut AS yang terkenal dengan industri beratnya, khususnya pabrik baja serta besi, pada abad ke-19 serta awal abad ke-20. Lantaran deindustrialisasi, globalisasi ekonomi, serta otomatisasi, kota-kota seperti Buffalo, Cincinnati, Cleveland, Dayton, Detroit, Pittsburgh, dan St. Louis mengalami penurunan pesat dalam jumlah penduduk dan perekonomian mengalami kemunduran. Kehilangan separuh dari penduduknya sejak 1950-an, Buffalo memiliki penduduk sekitar 260.000 dan tingkat kemiskinan 30,9% pada Juli 2018. Wilayah Buffalo-Air Terjun Niagara merupakan wilayah yang paling tersegregasi secara ras ke-8 di AS, dan terdapat ketimpangan ekonomi yang besar di antara daerah perkotaan dan daerah hunian di pinggiran kota. Serupa dengan kota-kota *Rust Belt* lainnya, Buffalo kini mengalami pertumbuhan penduduk kembali berkat imigran serta pengungsi. Tanpa pertumbuhan penduduk kelahiran luar negeri, pengurangan penduduk Buffalo pada kurun 2000 hingga 2014 bisa mencapai 4,7% ketimbang 3,3%.

Sejak 2002, lebih dari 15.000 pengungsi telah dimukimkan kembali di Buffalo. Kendati demikian, jumlah pengungsi sebenarnya lebih tinggi karena adanya migrasi sekunder: peng-

»

ungsi yang sebelumnya dimukimkan di kota lain berpindah ke Buffalo karena tempat tinggal yang lebih terjangkau serta jaringan bantuan komunitas yang kuat. Lima negara asal teratas dari para pengungsi adalah Myanmar, Somalia, Bhutan, Irak, dan Republik Demokratik Kongo. Imigran dan pengungsi terpusat di Sisi Barat kota di mana jumlah penduduk kelahiran luar negeri meningkat menjadi 16% pada 2017.

› Siapa aktornya?

Empat lembaga pemukiman kembali di Buffalo–*Catholic Charities, Jewish Family Services, Journey's End Refugee Services*, dan *International Institute of Buffalo*–bertanggung jawab atas layanan penerimaan dan penempatan pengungsi sepanjang tiga bulan pertama di AS. Petugasnya mencari apartemen dan melengkapinya dengan mebel sebelum pengungsi tiba, menjemput mereka di bandar udara, memulai pemasangan utilitas dengan menggunakan nama mereka, mendaftarkan mereka untuk bantuan publik serta kartu jaminan sosial, mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah, membukakan rekening bank, mengatur jadwal pertemuan untuk layanan kesehatan, serta mengajarkan mereka bagaimana menggunakan transportasi publik. Mereka menawarkan kelas bahasa Inggris, pekerjaan serta jasa penerjemahan, dan konsultasi hukum. Namun, lembaga pemukiman kembali tidak memperoleh banyak pendanaan dari pemerintah untuk bantuan yang melebihi sembilan puluh hari, dan pengungsi diharapkan sudah dapat mengurusi dirinya di akhir periode ini.

Keempat lembaga penempatan kembali pengungsi ini bukanlah satu-satunya aktor yang bekerja dengan pengungsi di Buffalo. Terdapat banyak organisasi nirlaba lain termasuk organisasi komunitas etnis/keagamaan para pengungsi sendiri, kantor Walikota, sekolah dan universitas, dan media lokal yang menciptakan suatu lingkungan selamat datang bagi para pengungsi di Buffalo. Mereka mengkhususkan diri dalam bidang yang berbeda-beda, saling bekerja sama, dan merujuk klien manakala mereka akan dapat dilayani dengan lebih baik. Kerja sama yang efisien antara para pemangku kepentingan ini membantu menjadikan Buffalo suatu contoh mengenai penempatan kembali yang baik.

Pengungsi bukan hanya manusia dengan kebutuhan yang harus dipenuhi; selepas mereka beradaptasi dengan kehidupan barunya mereka berkontribusi secara signifikan kepada komunitasnya. Mereka mengisi kembali daerah perumahan serta sekolah yang sudah kosong, membeli rumah serta memperbaikinya, mendirikan usaha baru, memastikan angkatan kerja terberdayakan, serta membayar pajak. Seperti kota-kota *Rust Belt* lainnya yang mengalami revitalisasi, terdapat narasi yang berkembang luas di antara pejabat kota serta media bahwa pengungsi baik bagi pertumbuhan kembali Buffalo. Tentu saja, pengungsi sendiri tidak dapat menyelamatkan kota, dan terdapat peningkatan proyek pembangunan seperti proyek pengembangan tepi danau, konsorsium rumah sakit universitas, serta pembangunan kembali daerah urban serta perumahan. Akan tetapi, pengungsi dielu-elukan untuk perannya dalam stabilisasi ekonomi serta pembangunan kembali khususnya di Sisi Barat Buffalo, memperkukuh perasaan kemajemukan dan multikulturalisme di komunitas, serta berkontribusi bagi pertumbuhan kembali ekonomi dengan usaha kecil lokalnya serta kewiraswastaannya. Karenanya, kota-kota *Rust Belt* bersaing satu sama lain untuk menarik pengungsi.

› Apakah tantangannya?

Terlepas kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi serta revitalisasi urban, yang disebut juga "*Renaissance* pengungsi" di Buffalo, terdapat tantangan dalam proses integrasi. Hal-hal tersebut adalah permasalahan struktural baik pada tingkatan nasional maupun lokal. Pertama, skema pendanaan untuk lembaga pemukiman kembali yang terbatas hanya untuk sembilan puluh hari awal per kasus, di mana diharapkan pengungsi akan dapat mengurus dirinya sendiri setelahnya, tidaklah realistis. Batas jumlah pengungsi yang diperbolehkan masuk ke AS diturunkan dari 30.000 tahun lalu menjadi 18.000 tahun ini, yang berujung pada pemangkasan anggaran yang lebih besar lagi. Tahun lalu, lembaga pemukiman kembali menggelar kampanye penggalangan dana besar-besaran dan Negara Bagian New York memberikan bantuan $2 juta untuk lembaga pemukiman kembali di New York, tetapi masa depan dari program-program tersebut tidak menentu. Dihadapkan pada penurunan jumlah pengungsi serta pemangkasan anggaran federal, pimpinan kota memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Buffalo terancam. Kedua, banyak dari pengungsi Suriah yang saya wawancarai di Buffalo mengungkapkan ketakutan serta kecemasan dideportasi setelah Presiden Trump mengeluarkan larangan kunjungan (*travel ban*). Terlepas mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan negatif dari penduduk setempat di Buffalo, retorika Islamofobia serta anti-pengungsi di berita nasional memantik perasaan tidak diterima di antara mereka. Ketika mereka merasa tidak disambut, pengungsi akan enggan untuk berintegrasi.

Pada tingkat lokal, tantangan-tantangannya lebih beragam. Buffalo merupakan kota yang sangat tersegregasi dan pengungsi umumnya ditempatkan di Sisi Barat oleh lembaga pemukiman. Namun, pekerjaan yang biasanya mereka kerjakan (seperti pencuci piring, pesuruh, koki, pengemas, perakit, dan pengangkut barang) tidak terdapat di Sisi Barat. Hingga mereka mampu membeli mobil, mereka tergantung pada transportasi publik yang tidak tersedia secara luas dan dapat diandalkan. Dana bantuan publik biasanya tidak cukup untuk menghidupi mereka, walhasil mereka bekerja untuk berbagai kerja paruh waktu pada jam-jam yang tak menentu, yang menghalangi mereka untuk mengikuti kelas bahasa Inggris pada jam-jam normal. Layanan perawatan anak tidak terjangkau untuk kebanyakan keluarga pengungsi, dan kecuali mereka dapat bergantung pada anggota keluarga lainnya, wanita yang memiliki anak kecil tidak dapat pergi ke kelas bahasa Inggris maupun bekerja. Hal ini berakibat pada isolasi dari wanita di rumah dan mencegah integrasi sosio-ekonomi mereka. Terakhir, banyak pimpinan komunitas mengamati bahwa masyarakat kelahiran Buffalo tidak tahu banyak tentang para pengungsi. Mengingat integrasi merupakan proses dua arah, tidaklah cukup bahwa para pengungsi mempelajari cara hidup orang Amerika serta berusaha menyesuaikan diri dengannya.

Pemukiman kembali tidak hanya menawarkan suatu solusi kokoh terhadap segelintir minoritas pengungsi rentan di seluruh dunia, namun juga memperkaya serta menolong kota yang menjadi tuan rumahnya. Negara bagian New York memukimkan kembali pengungsi dengan jumlah terbanyak ketiga di AS, dan Buffalo memukimkan pengungsi terbanyak di negara bagian tersebut. Pengalaman yang sudah dihimpun oleh Buffalo selama sepuluh hingga lima belas tahun terakhir menjadi suatu contoh mengenai praktik baik bagi kota-kota lainnya. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ayşegül Balta Özgen
<vmontes@brynmawr.edu>